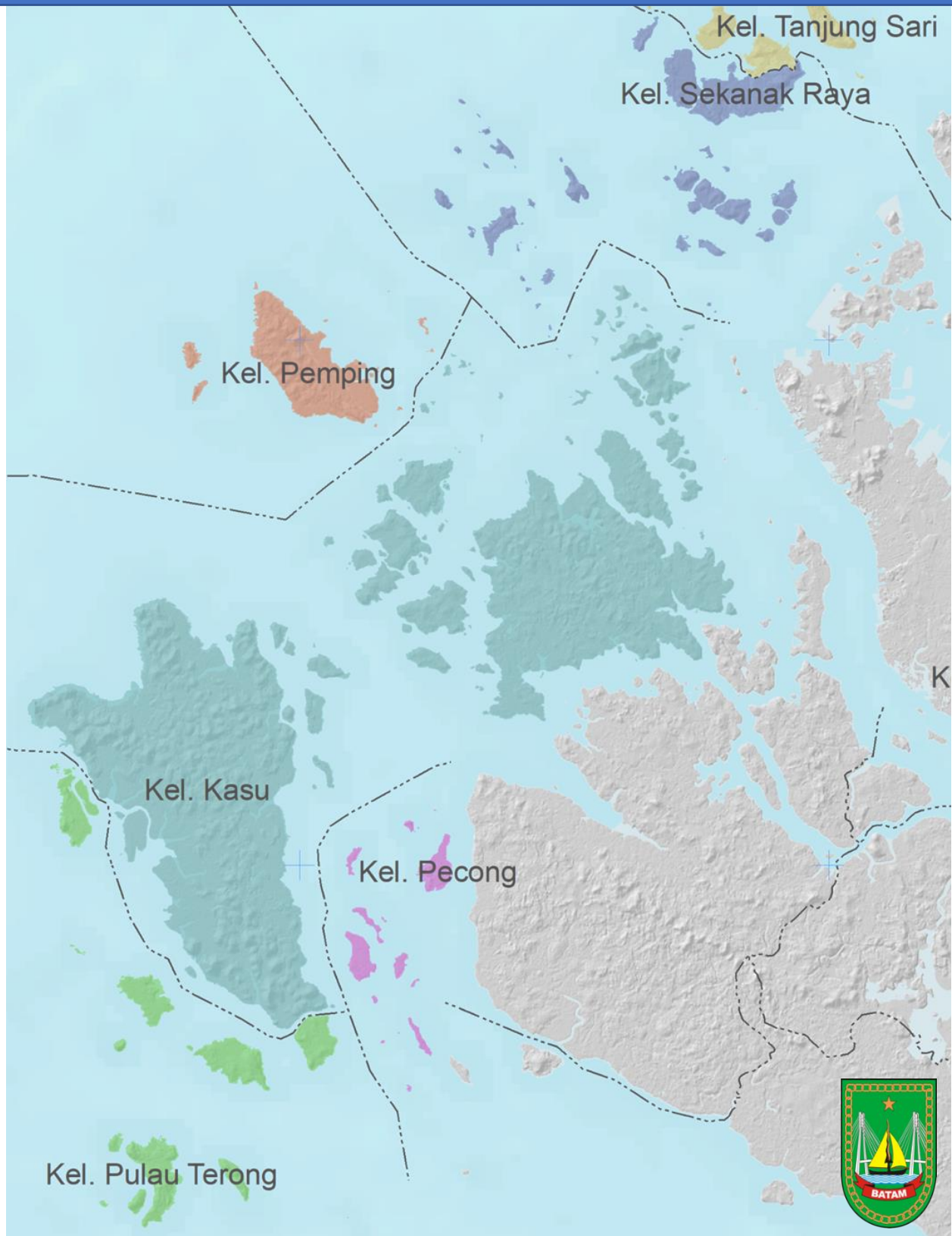


DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA DETIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH PERENCANAAN (WP) BELAKANG PADANG TAHUN 2022-2024



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Pendahuluan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Belakang Padang Tahun 2022-2042 dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yang meliputi Pendahuluan, Gambaran Umum Wilayah, dan Hasil dan Penyelenggaraan KLHS. Kajian Lingkungan Hidup Strategis) ini bertujuan untuk mendukung Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) pada RDTR WP Belakang Padang dari aspek lingkungan. Terintegrasinya aspek lingkungan hidup ditujukan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Belakang Padang Tahun 2022-2042. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat seluas- luasnya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Batam dengan tetap mengacu pada aspek lingkungan hidup.

Batam, Desember 2021

Walikota Batam

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Maksud , Tujuan, dan Sasaran	I-3
1.2.1. Maksud	I-3
1.2.2. Tujuan	I-3
1.2.3. Sasaran.....	I-4
1.3. Dasar Hukum	I-4
1.4. Ruang Lingkup	I-5
1.4.1. Lingkup Wilayah	I-5
1.4.2. Lingkup Substansi	I-6
1.5. Prinsip Dasar Pelaksanaan KLHS	I-18
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	II-1
2.1 Wilayah Administrasi dan Geografis.....	II-1
2.2 Kependudukan.....	II-3
2.3 Kondisi Sosial Budaya.....	II-5
2.3.1 Pendidikan	II-5
2.3.2 Kesehatan	II-7
2.3.3 Keagamaan.....	II-8
2.4 Kondisi Ekonomi.....	II-9
2.5 Kondisi Perumahan dan Pemukiman	II-12
2.6 Topografi/Kemiringan Lereng.....	II-14
2.7 Jenis Tanah.....	II-14
2.8 Klimotologi	II-15
2.9 Hidrologi	II-16
2.10 Geologi.....	II-17
2.11 Penggunaan Lahan	II-18
2.12 Jasa Ekosistem	II-19
2.12.1 Jasa Ekosistem Penyedia	II-19
2.12.2 Jasa Pengaturan	II-21
2.12.3 Jasa Budaya	II-22
2.12.4 Jasa Pendukung.....	II-23
2.13 Tinjauan Materi RTRW Kota Batam.....	II-24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENYELENGGARAAN KLHS	III-1
3.1 Persiapan Penyelenggaraan KLHS	III-1
3.2 Identifikasi Pemangku Kepentingan	III-1
3.3 Hasil Pelingkupan Isu Pembangunan Berkelanjutan	III-6
3.3.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan	III-6
3.3.2 Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	III-8
3.3.3 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis.....	III-13
3.3.4 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis ..	III-17
3.3.5 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas.....	III-24

3.4 Penjabaran Kajian Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis	
Prioritas.....	III-31
3.4.1 Ancaman kerusakan lingkungan akibat minimnya pengelolaan sampah darat dan sampah laut	III-31
3.4.2 Keterbatasan akses dan inovasi terhadap air bersih	III-32
3.4.3 Peningkatan risiko bencana pesisir dan pulau kecil.....	III-33
3.4.4 Konversi lahan bakau di wilayah pesisir	III-34
3.4.5 Mempertahankan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata (wisata sejarah dan religi)	III-35
3.4.6 Ancaman eksploitasi ilegal sumberdaya ikan di wilayah perairan Belakang Padang.....	III-36

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENDAHULUAN: Dinamika perkembangan Kota Batam sebagai KSN BBK dan KSN Perbatasan memunculkan kawasan pusat pertumbuhan. Dalam munculnya kawasan pusat perkembangan dapat mengintergrasikan banyak permasalahan lingkungan, seperti bagaimana kualitas lingkungan di Pulau Batam sebagai kawasan pusat perkembangan, bagaimana ke depan potensi investasi dan layanan infrastruktur demi keberlangsungan kemajuan di Pulau Batam, bagaimana kondisi penduduk dan kepadatan perkotaan di Pulau Batam, dan bagaimana keberlangsungan lingkungan hidup di Pulau Batam guna menunjang hajat hidup masyarakat di Pulau Batam dan sekitarnya. Sehingga permasalahan tersebut dapat memenuhi kebutuhan produk acuan, seperti pengaturan struktur kota, pengembangan sistem jaringan, peningkatan layanan sarana dan prasarana, arahan ruang investasi (zona pemanfaatan), pengaturan kegiatan, pengaturan kualitas lingkungan, pengendalian ruang, dan teknik pengaturan zonasi yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) WP Belakang Padang.

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan hadirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, tertata dan maju, yang dinyatakan oleh undang-undang dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Secara khusus tentang penataan ruang, proses penyusunan tata ruang salah satunya melalui tahapan pengolahan data dan analisis data dengan menggunakan teknik analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditentukan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, dalam membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana detail tata ruang maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan

kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Demi terwujudnya visi pembangunan di Pulau Batam sebagaimana telah disebutkan, maka perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 15 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) kabupaten/kota; serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Maksud dari kajian ini yaitu memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2022-2042. Sasaran dari penyusunan KLHS ini yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang Kota Batam yang telah terintegrasi dengan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sudah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Lingkup penyusunan KLHS ini adalah sesuai dengan batas deliniasi Kawasan Wilayah Perencanaan Belakang Padang yang mencakup enam kelurahan yaitu Kelurahan Kasu seluas 50,64 Ha, Kelurahan Pulau Terong seluas 5,79 Ha, Kelurahan Sekanak Raya seluas 5,02 Ha, Kelurahan Pemping seluas 4,25 Ha, Kelurahan Tanjung Sari seluas 2,04 Ha, dan Kelurahan Pecong seluas 1,38 Ha. Luas Kecamatan Belakang Padang secara keseluruhan yaitu 69,12 Ha (BPS, 2020).

GAMBARAN UMUM WILAYAH: Wilayah Perencanaan Belakang Padang terletak di Kecamatan Belakang Padang yang merupakan salah satu kecamatan dari duabelas kecamatan di Kota Batam. Kecamatan Belakang Padang terbentuk bersamaan dengan pemekaran kecamatan di Kota Batam berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran. Kecamatan Belakang Padang terletak

antara $1^{\circ} 831,38''\text{LU}$ dan $103^{\circ} 87464 \text{ BT}$. Luas wilayah daratan Kecamatan Kecamatan Belakang Padang tersusun dari 130 pulau yang terbagi pada setiap kelurahannya dan sebanyak lebih dari 32% dari pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni. Pulau terbanyak berada di Kelurahan Kasu yang juga memiliki luasan paling tinggi, yaitu sejumlah 40 pulau. Diikuti dengan Kelurahan Sekanak Raya dan Kelurahan Pulau Terong sejumlah 33 pulau dan 23 pulau secara berurutan.

Kelurahan Kasu yang merupakan kelurahan terluas di Kecamatan Belakang Padang menempati posisi jumlah penduduk terbanyak nomor 4 setelah Kelurahan Sekanak Raya (6.264 jiwa), Kelurahan Tanjung Sari (5.727 jiwa), dan Kelurahan Terong (3.393 jiwa) pada tahun 2019. Sementara Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Sekanak Raya memiliki penduduk terdapat berturut-turut pada periode tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2019, telah tercatat sebanyak 325 penduduk yang melakukan migrasi, diantaranya migrasi dalam satu kelurahan, antar kelurahan, antar Kecamatan, antar kabupaten/kota maupun antar provinsi.

Kondisi curah hujan di Kecamatan Belakang Padang berada pada rentang $59.019-129.808 \text{ mm}^2/\text{tahun}$. Dominasi kelurahan di Kecamatan Belakang Padang memiliki curah hujan diatas $82.615 \text{ mm}^2/\text{tahun}$, hanya Kelurahan Kasu bagian timur yang memiliki perbedaan curah hujan tahunan yaitu pada rentang $59.019 \text{ mm}^2/\text{tahun} - 82.615 \text{ mm}^2/\text{tahun}$. Berikilm tropis dengan suhu minimal 23° C dan suhu maksimum sekitar 35° C , serta suhu rata-rata sekitar $28,5^{\circ} \text{ C}$. Kecamatan Belakang Padang didominasi oleh jenis akuifer dengan produktivitas rendah, terlebih pada Kelurahan Kasu merupakan daerah air tanah langka atau tidak berarti. Kondisi ini menyebabkan penduduk di Kecamatan Belakang Padang sangat bergantung pada air hujan sebagai intake waduk, dan air kemasan sebagai sumber air bersih.

Kecamatan Belakang Padang terdiri dari penggunaan lahan berupa gedung/bangunan, hutan, lahan terbuka, pasir darat, perkebunan, permukiman, rawa, semak belukar, tegalan, waduk dan empang. Namun, didominasi oleh penggunaan lahan berupa Hutan dan Perkebunan pada enam

kelurahannya. Selain itu, terdapat lahan permukiman yang cukup mendominasi Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Sekanak Raya.

PERUMUSAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: Pelaksanaan KLHS dilakukan melalui tahapan pelaksanaan sesuai PP 46 tahun 2016 dan Permen LHK 69 Tahun 2017 dengan melengkapi pendokumentasian pada setiap tahapannya.

IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PB).

Dari tahap identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan Konsultasi Publik, terdapat sebanyak 37 isu pembangunan berkelanjutan dengan hasil pengelompokkan 12 isu lingkungan hidup, 6 isu ekonomi dan 3 isu sosial.

ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PB) STRATEGIS.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap daftar Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan unsur: 1. Lintas sektor dan pemangku kepentingan; 2. Lintas wilayah; 3. Lintas waktu; maka diperoleh hasil pemusatan isu sebanyak 20 yang terdiri dari 12 isu lingkungan hidup, 5 isu ekonomi dan 3 isu sosial.

ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PB) PALING STRATEGIS.

Penentuan isu PB paling strategis dilakukan dengan melihat keterkaitannya antara lain: 1. Karakteristik Wilayah; 2. Tingkat Pentingnya Potensi Dampak; 3. Keterkaitan Antar Isu PB; 4. Keterkaitan dengan Muatan KRP; dan 5. Hasil KLHS dari KRP di atasnya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, didapatkan sebanyak 18 isu prioritas yang terdiri dari 11 isu lingkungan hidup, 4 isu ekonomi, dan 3 isu sosial.

PEMUSATAN ISU PRIORITAS.

Perumusan isu PB prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan parameter antara lain: 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan; 2. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup; 3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem; 4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam; 5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam; 6. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; 7. kerentanan

dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; 8. tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat; 9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan 10. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat. Adapapun hasil perumusan Isu Pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Ancaman kerusakan lingkungan akibat minimnya pengelolaan sampah darat dan sampah laut
2. Keterbatasan akses dan inovasi terhadap air bersih
3. Peningkatan risiko bencana pesisir dan pulau kecil
4. Konversi lahan bakau di wilayah pesisir
5. Mempertahankan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata (wisata sejarah dan religi)
6. Ancaman eksploitasi ilegal sumberdaya ikan di wilayah perairan Belakang Padang

IDENTIFIKASI KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM: Proses dilakukan melalui dua proses tahapan yaitu identifikasi KRP yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup dan KRP memerlukan kajian dalam KLHS. Identifikasi KRP dilakukan terhadap KRP RDTR yang terdiri dari 261 indikasi program.

KRP YANG BERDAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP. Berdasarkan hasil identifikasi maka didapatkan 18 KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup

KRP YANG MEMERLUKAN KAJIAN. Berdasarkan hasil identifikasi maka diperoleh 14 KRP memerlukan kajian 6 muatan KLHS yaitu:

- a. Pembangunan Kawasan PL Kecamatan di Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu;
- b. Pembangunan kawasan PL di Kelurahan Pulau Mecan, Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Pemping, Kel. Pemping; Pulau Terong, Kel. Pulau Terong; Pulau Pecong, Kel. Pecong:

- c. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa depo minyak dan gas (migas) di Kelurahan Pemping;
- d. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen di Kecamatan Belakang Padang;
- e. Pengembangan hunian vertikal;
- f. Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-1);
- g. Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-2);
- h. Pembangunan Campuran Intensitas Menengah/Sedang (Perumahan, kegiatan komersial, perkantoran, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial);
- i. Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP;
- j. Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP;
- k. Pembangunan Kawasan Perkantoran;
- l. Pembangunan Kawasan Pergudangan
- m. Pembangunan Kawasan Transportasi;
- n. Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

KAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM: KRP yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya, selanjutnya analisis terhadap kajian 6 muatan KLHS berbasis spasial antara lain: kapasitas daya dukung daya tampung lingkungan hidup; dampak dan risiko lingkungan hidup; kinerja layanan/jasa ekosistem; efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

RUMUSAN ALTERNATIF DAN REKOMENDASI PENYEMPURNAAN KRP: Alternatif dan rekomendasi sebagai masukan untuk RDTR WP Belakang Padang dengan melakukan evaluasi berdasarkan informasi dan analisis pada bab-bab sebelumnya diperoleh melalui lima tahapan, yaitu: Drivers (D), Pressure (P), State (S), Impact (I), Response (R). Drivers (D) berisi informasi mengenai Kebijakan, Rencana, dan Program yang berpengaruh terhadap lingkungan

hidup. Pressure (P) terdiri dari beberapa informasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas. State (S) berisi informasi mengenai lokasi KRP yang berpengaruh terhadap lingkungan. Impact (I) berisi informasi berupa dampak, ancaman, maupun dukungan dari enam muatan KLHS yang terdiri dari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko lingkungan hidup, kinerja jasa lingkungan, efisiensi sumberdaya alam, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Response (R) merupakan informasi yang terdiri dari alternatif dan rekomendasi. Perumusan alternatif terdiri dari pertimbangan kebutuhan pembangunan, pertimbangan perbaikan lokasi, dan pertimbangan perbaikan metode, proses, dan teknologi. Rekomendasi berisi tentang perbaikan rumusan kebijakan, muatan rencana, maupun materi program. Alternatif dan Rekomendasi perbaikan KRP pada RDTR WP Belakang Padang pada umumnya meliputi:

- a. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
- b. Pembangunan infrastruktur bersistem vertikal
- c. Penerapan sistem persampahan terpadu/TPS3R
- d. Membangun instalasi pengolahan limbah, dan memastikan limbah tidak dibuang ke laut lepas
- e. Membangun bangunan penahan gelombang atau bencana pesisir lainnya disekitar pengembangan migas
- f. Memastikan terbangunnya jaringan perpipaan air bersih
- g. Menyediakan saluran drainase yang baik
- h. Melakukan pembangunan yang terintegrasi antar proyek pembangunan
- i. Menggunakan teknologi pembangunan hijau di kawasan perkantoran
- j. Mengembangkan IPAL komunal di kawasan perdagangan dan industri
- k. Penyediaan stuktur ruang bangunan penampung air hujan
- l. Penambahan indikasi program terkait Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pulau Batam diusulkan/dipromosikan sebagai Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun (KSN BBK) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perbatasan. Kota Batam di arahkan sebagai fungsi utama pusat kegiatan kawasan perdagangan, kawasan industri, jasa, pariwisata nasional, dan pusat pelayanan sosial dan ekonomi. Penataan ruang dan wilayah Pulau Batam adalah penjabaran dari tujuan ruang dan Visi Misi Kota Batam yang diwujudkan pada draf RPJMD Kota Batam 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”. Kebijakan Tata Ruang Kota Batam 2021-2041 mengusulkan Kota Batam sebagai rencana sistem pusat kegiatan Kota Batam, terdiri dari pusat kegiatan kota, sub pusat kota, dan pusat lingkungan.

Dinamika perkembangan Kota Batam sebagai KSN BBK dan KSN Perbatasan memunculkan kawasan pusat pertumbuhan. Dalam munculnya kawasan pusat perkembangan dapat mengintergrasikan banyak permasalahan lingkungan, seperti bagaimana kualitas lingkungan di Pulau Batam sebagai kawasan pusat perkembangan, bagaimana ke depan potensi investasi dan layanan infrastruktur demi keberlangsungan kemajuan di Pulau Batam, bagaimana kondisi penduduk dan kepadatan perkotaan di Pulau Batam, dan bagaimana keberlangsungan lingkungan hidup di Pulau Batam guna menunjang hajat hidup masyarakat di Pulau Batam dan sekitarnya. Sehingga permasalahan tersebut dapat memenuhi kebutuhan produk acauan, seperti pengaturan struktur kota, pengembangan sistem jaringan, peningkatan layanan sarana dan prasarana, arahan ruang investasi (zona pemanfaatan), pengaturan kegiatan, pengaturan kualitas lingkungan, pengendalian ruang, dan teknik pengaturan zonasi yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) WP Belakang Padang.

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan hadirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor

26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, tertata dan maju, yang dinyatakan oleh undang-undang dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Secara khusus tentang penataan ruang, proses penyusunan tata ruang salah satunya melalui tahapan pengolahan data dan analisis data dengan menggunakan teknik analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditentukan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, dalam membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana detail tata ruang maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang berguna untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Yang dimaksud dengan kebijakan, rencana, dan program secara umum adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan (*Policy*): arah yang hendak ditempuh (*road-map*) berdasarkan tujuan yang digariskan, penetapan prioritas, garis besar aturan dan mekanisme untuk mengimplementasikan tujuan.
2. Rencana (*Plan*): desain, prioritas, opsi, sarana dan langkah-langkah yang akan ditempuh berdasarkan arah kebijakan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian sumber daya.
3. Program (*Programme*): serangkaian komitmen, pengorganisasian aktivitas atau sarana yang akan diimplementasikan pada jangka waktu tertentu dengan berlandaskan pada kebijakan dan rencana yang telah digariskan.

Tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*justice*). Penyusunan KLHS menjadi bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dalam penyusunan KLHS RDTR WP Belakang Padang. KLHS dapat dijadikan dasar

dalam menentukan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Belakang Padang bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, dapat dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Belakang Padang, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi di atas.

Demi terwujudnya visi pembangunan di Pulau Batam sebagaimana telah disebutkan dimua, maka perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 15 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) kabupaten/kota; serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

1.2. Maksud , Tujuan, dan Sasaran

1.2.1. Maksud

Maksud dari kajian ini yaitu Memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2022-2042.

1.2.2. Tujuan

Untuk melakukan pengkajian RDTR Wilayah Perencanaan Belakang Padang terhadap:

1. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
2. Analisis perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
3. Analisis kinerja layanan atau jasa ekosistem
4. Analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. Analisis tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

1.2.3. Sasaran

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang Kota Batam yang telah terintegrasi dengan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sudah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum dari pelaksanaan penyusunan KLHS RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Belakang Padang Kota Batam sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
6. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
8. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
9. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
11. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun

12. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
13. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
14. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang
17. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
18. Peraturan Daerah Kota Batam No. 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
19. Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
20. Peraturan Daerah Kota Batam No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Lingkup Wilayah

Lingkup penyusunan KLHS ini adalah sesuai dengan batas delineasi Kawasan Wilayah Perencanaan Belakang Padang yang mencakup enam kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Terong seluas 5,79 Ha, Kelurahan Pecong seluas 1,38 Ha, Kelurahan Kasu seluas 50,64 Ha, Kelurahan Pemping seluas 4,25 Ha, Kelurahan Tanjung Sari seluas 2,04 Ha, dan Kelurahan Sekanak Raya seluas 5,02 Ha. Luas Kecamatan Belakang Padang secara keseluruhan yaitu 69,12 Ha (BPS, 2020). Adapun batas wilayah Kecamatan Belakang Padang yaitu:

Sebelah Utara : Selat Malaka

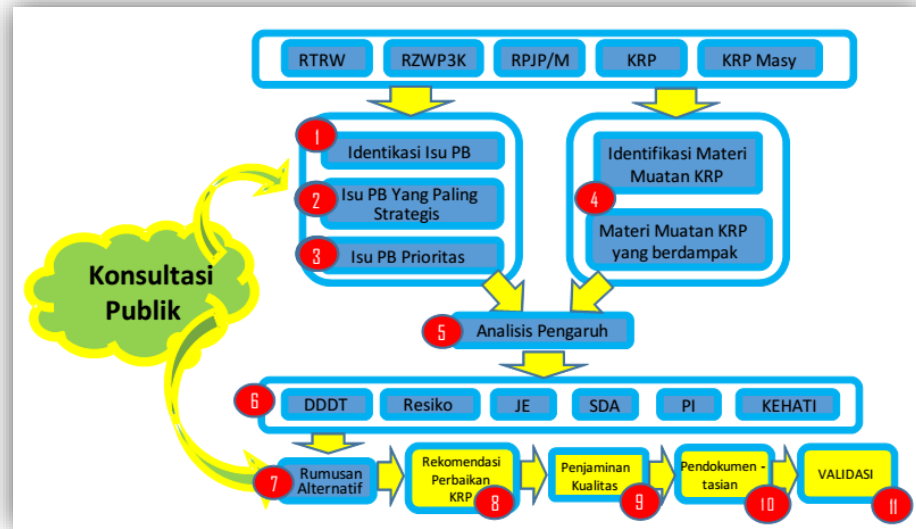
Sebelah Timur : Kecamatan Sekupang

Sebelah Selatan : Kabupaten Karimun
Sebelah Barat : Selat Malaka

1.4.2. Lingkup Substansi

Ruang lingkup penyusunan KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Adapun lingkup substansi dan tahap penyelenggaraan berdasarkan kedua peraturan tersebut yaitu:

1. Tahap persiapan terdiri atas pembentukan SK Pokja KLHS, identifikasi para pemangku kepentingan, dan penyusunan kerangka acuan kerja. Tahap persiapan meliputi:
 - a. Pengumpulan dokumen KLHS, RTRW, RDTR Pulau Batam yang sedang dalam proses penyusunan dan telah memiliki deliniasi wilayah yang tetap atau dokumen KLHS Pulau Batam yang akan dibuat;
 - b. Penyusunan format data dan informasi yang akan dikumpulkan, berupa daftar informasi dasar;
 - c. Penyiapan peta dasar guna lahan dengan skala sesuai dengan KLHS Pulau Batam; dan
 - d. Penyusunan jadwal pelaksanaan KLHS.



Gambar I- 1 Mekanisme Pelaksanaan KLHS RDTR WP Sagulung

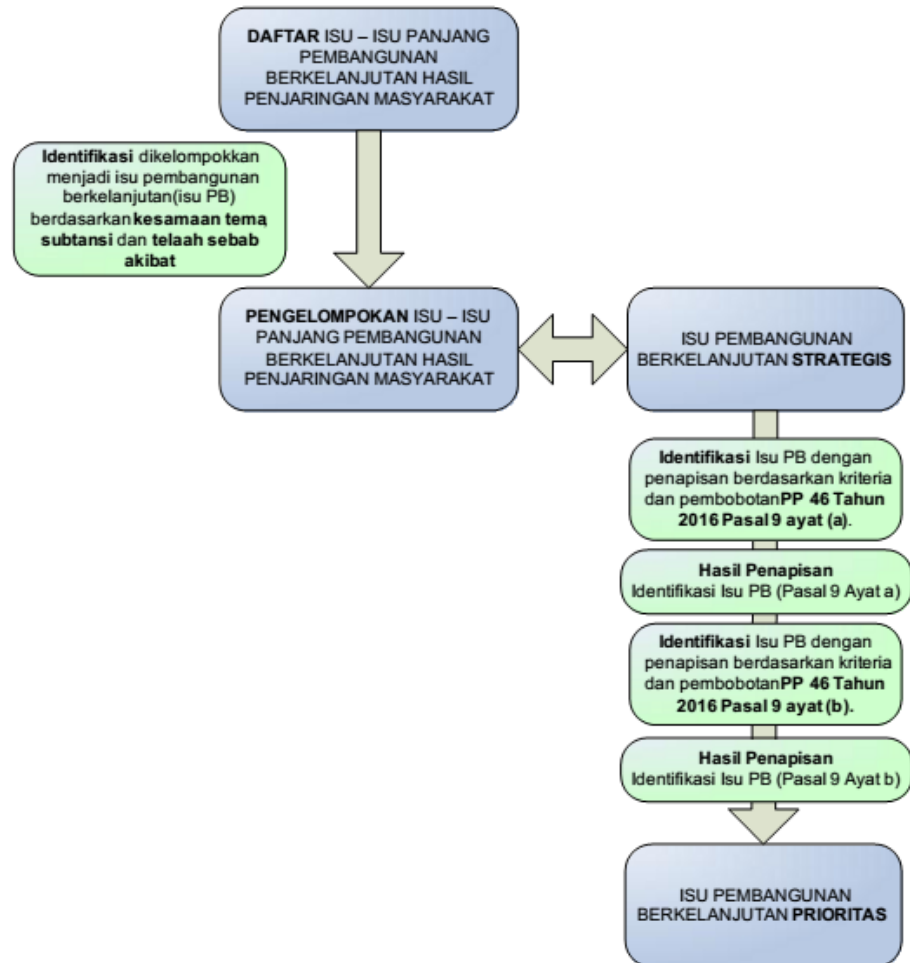
2. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Tujuan identifikasi pembangunan berkelanjutan yaitu:
 - a. Menentukan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup serta bentuk keterkaitan antar ketiga aspek tersebut;
 - b. Menentukan isu yang paling strategis, prioritas atau menjadi akar masalah dari semua isu yang terjadi; dan
 - c. Membantu penentuan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan.

Identifikasi pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui telaah literatur, curah pendapat kelompok kerja, dan konsultasi publik.
3. Pemusatan isu pembangunan berkelanjutan dan ditentukan dengan melihat kesamaan substansi dan/atau menelaah sebab-akibat antara lain:
 - a. Lintas wilayah
 - b. Lintas pemangku kepentingan
 - c. Lintas waktu

Pemusatan isu juga dilakukan dengan melakukan konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman isu pembangunan berkelanjutan serta melakukan konfirmasi dari data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dengan memperhatikan unsur-unsur:
 - a. Karakteristik wilayah
 - b. Tingkat pentingnya potensi dampak
 - c. Keterkaitan antara isu pembangunan berkelanjutan
 - d. Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
 - e. Muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - f. Hasil KLHS dari kebijakan, rencana, dan/atau program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa, dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung
5. Isu pembangunan berkelanjutan prioritas dengan memperhatikan kriteria antara lain:
 - a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
 - b. Perkiraan dan dampak risiko lingkungan hidup
 - c. Kinerja layanan atau jasa ekosistem
 - d. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam
 - e. Status mutu dan ketersediaan sumberdaya alam
 - f. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
 - g. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
 - h. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat
 - i. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat
 - j. Ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat

Memutuskan isu yang strategis dan prioritas, antara lain dapat dengan menyusun daftar pendek yang telah memperhatikan hasil konsultasi kepada masyarakat dan telah dikonfirmasi dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar I- 2 Skema Penapisan Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan Menjadi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

6. Identifikasi materi muatan KRP yang berdampak terhadap lingkungan hidup antara lain. Identifikasi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dilakukan dengan menelaah dasar-dasar penyusunannya (visi, misi, tujuan, sasaran, latar belakang), konsepnya (konsep makro, desain besar, peta jalan), dan/atau muatan arahnya (strategi, skenario, desain, rencana aksi, kriteria, struktur kegiatan, teknis pelaksanaan) sesuai dengan tingkat kemajuan penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program pada saat mulai dilakukan KLHS. Muatan-muatan yang ada

disusun dalam komponen-komponen materi kebijakan, rencana, dan/atau program yang kemudian dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan berikut :

- a. Perubahan iklim
- b. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati
- c. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan
- d. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam
- e. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan
- f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat
- g. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

Selanjutnya, dilakukan sintesa terhadap hasil identifikasi isu strategis, muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan, muatan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain yang terkait dan relevan, agar dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh tentang perkiraan cakupan wilayah yang terkena dampak dan kelompok masyarakat yang terkena dampak.

7. Identifikasi KRP yang memerlukan kajian lingkungan hidup strategis dengan penapisan menggunakan isu prioritas.
8. Kajian enam muatan KLHS yang terdiri atas:
 - a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Kajian ini mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/ rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Bisa diukur dalam bermacam variabel yang mencerminkan jasa dan produk dari ekosistem, misalnya daya dukung tanah/kemampuan lahan, air, habitat spesies, dan lain sebagainya. Beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain adalah mengukur kinerja jasa

lingkungan, mengukur populasi optimal yang dapat didukung, maupun mengukur tingkat kerentanan, kerawanan dan kerusakan. Teknik-teknik perhitungan dan penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat mengikuti ketentuan yang ada atau metodologi yang telah diakui secara ilmiah. Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media (air, tanah, udara) ketika menerima gangguan dari luar. Indikator yang digunakan dapat berupa kombinasi antara beban pencemaran dengan kemampuan media mempertahankan fungsinya sejalan dengan masuknya pencemaran tersebut.

- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko. Teknik analisis mengikuti ketentuan yang telah tersedia (misalnya Pedoman Dampak Penting) dan metodologi yang diakui secara ilmiah (misalnya *metodologi Environmental Risk Assessment*).
- c. Kinerja layanan atau jasa ekosistem. Kajian ini terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama didalamnya adalah yaitu:
 - Layanan/fungsi penyedia (*provisioning services*): Ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetika, air dll.
 - Layanan/fungsi pengatur (*regulating services*) : Ekosistem memberikan manfaat melalui pengaturan proses alam, seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengatur iklim dll.
 - Layanan/fungsi budaya (*cultural services*): Ekosistem memberikan manfaat non material yang memperkaya kehidupan manusia, seperti misalnya pengkayaan perasaan dan nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.

- Layanan/fungsi pendukung kehidupan (*supporting services*): Ekosistem menyediakan dan/ atau mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll. Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsian.
- d. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam (SDA). Kajian ini mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya. Dilakukan dengan cara:
- Mengukur kesesuaian antar tingkat kebutuhan dan ketersediaannya;
 - Mengukur cadangan yang tersedia, tingkat pemanfaatannya yang tidak menggerus cadangan, serta perkiraan proyeksi penyediaan untuk kebutuhan di masa mendatang; dan
 - Mengukur dengan nilai dan distribusi manfaat dari sumber daya alam tersebut secara ekonomi
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Analisis dilakukan dengan cara:
- Mengkaji kerentanan dan risiko perubahan iklim sesuai ketentuan yang berlaku
 - Menyusun pilihan adaptasi perubahan iklim
 - Menentukan prioritas pilihan adaptasi perubahan iklim
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Analisis dilakukan dengan cara:
- Mengkaji pemanfaatan dan pengawetan spesies/jenis tumbuhan dan satwa, yang meliputi:
 - Penetapan dan penggolongan yang dilindungi atau tidak dilindungi
 - Pengelolaan tumbuhan dan satwa serta habitatnya
 - Pemeliharaan dan pengembangbiakan

- Pendayagunaan jenis atau bagian-bagian dari tumbuhan dan satwa liarnya
 - Tingkat keragaman hayati dan keseimbangannya
 - Mengkaji ekosistem, yang meliputi:
 - Interaksi jenis tumbuhan dan satwa
 - Potensi jasa yang diberikan dalam konteks daya dukung dan daya tampung
 - Mengkaji genetik, yang meliputi:
 - Keberlanjutan sumber daya genetik
 - Keberlanjutan populasi jenis tumbuhan dan satwa
9. Analisis pengaruh KRP terhadap enam muatan KLHS. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program dalam KLHS adalah:
- a. Sesuai dengan konteks hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas Perbedaan isu pada setiap KLHS akan mempengaruhi prioritas dan bobot masing-masing kajian.
 - b. Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan untuk rencana pengembangan wilayah pesisir akan sangat ditentukan oleh kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta dampak dan risiko lingkungan hidup. Kajian-kajian lain yang diwajibkan dilaksanakan mendukung kedua kajian utama tersebut.
 - c. Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan untuk RDTR yang menitikberatkan pada pemanfaatan hutan dan konversi hutan akan sangat ditentukan pada kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, dan kinerja dan layanan ekosistem. Kajian-kajian lain yang diwajibkan dilaksanakan mendukung kajian utama tersebut.
 - d. Sesuai dengan tingkat kedalaman/kedetilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
 - e. Apabila terjadi kekurangan data dan keterbatasan analisis akibat metodologi yang terlalu rumit, dapat menggunakan rujukan kajian resmi yang sudah dipublikasikan

- f. Apabila terjadi keterbatasan analisis dan rujukan kajian resmi belum ada, maka harus dicatatkan dalam proses bahwa kajian yang belum sempurna ini harus dijadikan pertimbangan dan direkomendasikan untuk dilaksanakan sebagai tindak lanjut. Perumusan alternatif dan rekomendasi penyempurnaan KRP. Tujuan perumusan alternatif Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk mengembangkan berbagai alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Setelah dilakukan kajian maka dihasilkan beberapa alternatif muatan suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk dapat mengatasi isu strategis pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah. Selain itu, alternatif juga disusun setelah disepakati bahwa Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dikaji berpotensi memberikan dampak negative pada pembangunan berkelanjutan, maka dilakukan pengembangan satu atau beberapa alternatif baru untuk menyempurnakan rancangan atau merubah Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang ada.

Berbagai kemungkinan pengembangan alternatif (opsi alternatif) dapat dilakukan melalui metode diskusi kelompok dan atau memanfaatkan pandangan para ahli dengan berdasarkan hasil kajian telaahan pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Dalam pengembangan alternatif perlu mempertimbangkan:

- Mandat/kepentingan/kebijakan nasional yang harus diamankan;
- Situasi sosial-politik yang berpotensi;
- Kapasitas kelembagaan pemerintah;
- Kapasitas dan kesadaran masyarakat;
- Kesadaran, ketaatan dan keterlibatan dunia;
- Kondisi pasar dan potensi investasi.

Dari beberapa opsi alternatif dapat dipilih alternatif perbaikan dengan manfaat yang paling baik. Pemilihan opsi bisa dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko. Metode yang dapat

digunakan bisa diantaranya metode analisis Kekuatan Kelemahan Kesempatan dan Ancaman (SWOT), metode analisis manfaat-risiko (Risk - Opportunity), analisis berhirarkhi (Analytical Hierarchy Process/AHP), analisis biaya manfaat, atau berbagai metode lain yang terkait pengambilan keputusan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan perumusan alternatif adalah pada metode diskusi kelompok yang digunakan, keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan, dan tenaga ahli/narasumber yang sesuai dengan muatan. Kiat perumusan alternatif adalah:

- Memahami dan dapat memutuskan apakah konsep kebijakan, rencana, dan/atau program secara sistematis akan menurunkan atau menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terlampaui
- Memahami alasan dan konteks kebijakan, rencana, dan/atau program yang menjadi subyek kajian;
- Membuat daftar pilihan-pilihan yang diurut berdasarkan manfaat dan kemudahan pelaksanaan;
- Berfikir kritis, positif, dan tidak terpaku pada tata cara/metode/pendekatan yang selama ini berjalan;
- Mengembangkan komunikasi dan dialog yang efektif dengan penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program, pemangku kepentingan terkait dan pengambil keputusan;
- Mencoba mengambil pelajaran dari pengalaman di wilayah lain; dan
- Memanfaatkan kreatifitas dari pemangku kepentingan.

Tujuan rekomendasi adalah menyepakati perbaikan muatan kebijakan, rencana, dan/atau program berdasarkan hasil perumusan alternatif, serta memformulasikan tindak lanjut pendukung sebagai konsekuensi dilaksanakannya kebijakan, rencana, dan/atau program. Muatan rekomendasi dapat berupa:

- Pernyataan kesepakatan atas perbaikan muatan kebijakan, rencana, dan/atau program, yaitu diantaranya:

- Perbaiki rumusan kebijakan;
 - Perbaiki muatan rencana;
 - Perbaiki materi program.
- Pernyataan butir-butir tindak lanjut yang harus dipertimbangkan dan/atau dilaksanakan pengambil keputusan sebagai konsekuensi dilaksanakannya KLHS bagi kebijakan, rencana, dan/atau program, yaitu diantaranya:
 - Rekomendasi studi lebih lanjut bagi aspek-aspek tertentu untuk mendukung operasionalisasi implementasi kebijakan, rencana, dan/atau program lebih lanjut, seperti perlunya AMDAL atau pengkajian lebih lanjut;
 - Rekomendasi penggunaan muatan KLHS untuk kebijakan, rencana, dan/atau program lainnya yang berkaitan;
 - Rekomendasi penggunaan muatan KLHS untuk penyusunan KLHS lainnya yang berkaitan;
 - Rekomendasi aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam AMDAL atau dokumen lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun/dilaksanakan sebagai tindak lanjut implementasi kebijakan, rencana, dan/atau program;
 - Rekomendasi persyaratan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun dan/atau dilaksanakan;
 - Rekomendasi modifikasi atau penghentian usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - Rekomendasi tindakan-tindakan mitigasi dampak yang dianggap perlu;
 - Rekomendasi-rekomendasi lain yang dianggap perlu untuk menjamin keberlanjutan dan mendorong upaya perbaikan terus menerus dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, dan/atau program.

10. Pengintegrasian rekomendasi ke dalam muatan RDTR

Integrasi substansi muatan KLHS ke dalam muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program adalah hasil langsung dari integrasi proses penyusunannya. Bentuk dari integrasi muatan KLHS ke dalam muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program adalah dokumentasi tertulis masukan-masukan KLHS dalam butir-butir substansi Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang dijelaskan lebih lanjut. Bukti dari integrasi muatan KLHS ke dalam muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program adalah dokumentasi tertulis masukan-masukan KLHS dalam butir-butir substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang diantaranya berupa:

- a. Penulisan kembali rekomendasi substansi teknis KLHS ke dalam materi teknis
- b. Kebijakan, Rencana dan/ atau Program;
- c. Penulisan kembali rekomendasi KLHS yang bersifat pengaturan dalam materi
- d. pengaturan pada Kebijakan, Rencana dan/atau Program dan/atau pasal pengaturan dalam peraturan yang memayungi keabsahan Kebijakan, Rencana dan/atau Program tersebut
- e. Melakukan interpretasi penulisan muatan teknis arahan KLHS ke dalam bahasa hukum yang sesuai dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dikuatkan sebagai peraturan; dan/atau
- f. Menuliskan muatan ketentuan baru dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dianggap dapat menampung rekomendasi KLHS sesuai dengan lingkup Kebijakan, Rencana, dan/atau Program itu

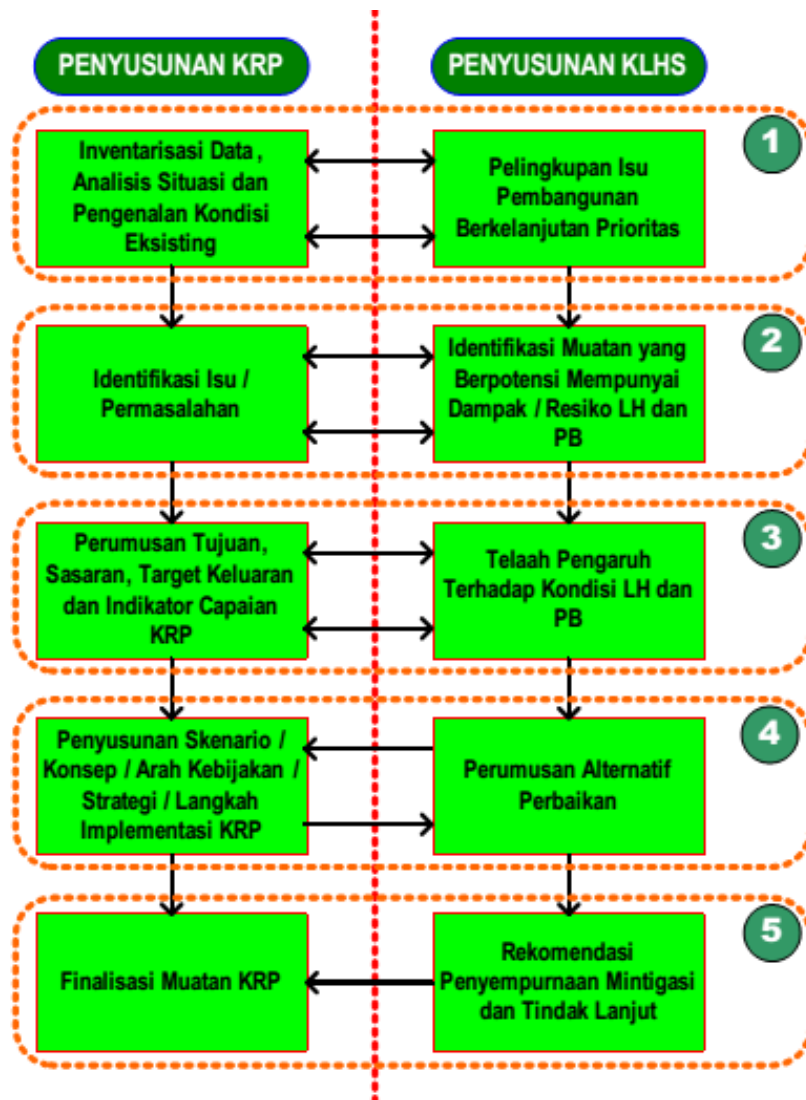
11. Penjaminan kualitas dokumen KLHS

Substansi dalam penyusunan KLHS RDTR WP Belakang Padang melakukan pendekatan rencana detail tata ruang namun belum dijadikan sebagai KLHS RDTR yang berfungsi sebagai syarat pengecualian AMDAL untuk kawasan WP Belakang Padang sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha

dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang.

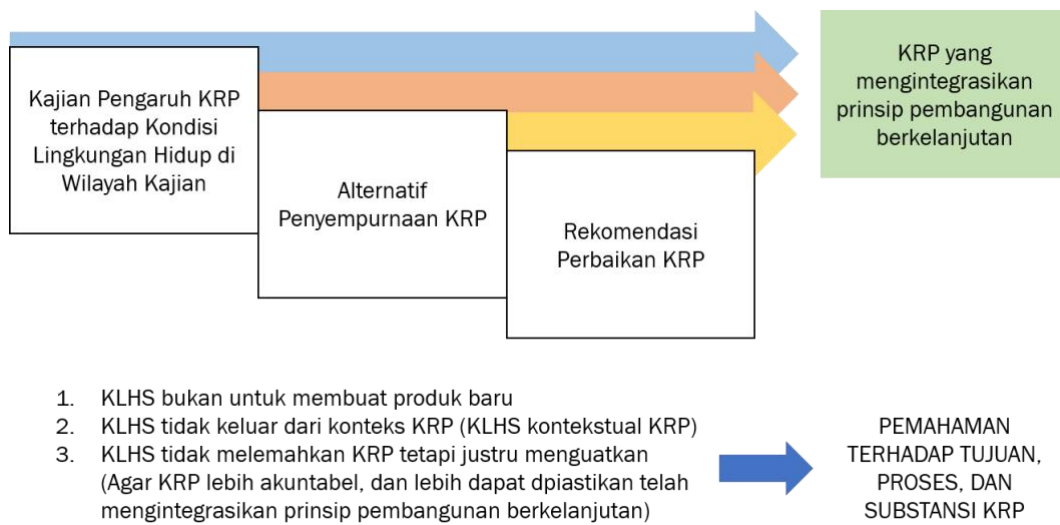
1.5. Prinsip Dasar Pelaksanaan KLHS

Pelaksanaan KLHS WP Belakang Padang dalam penyusunan perlu merujuk pada prinsip dasar yang ada di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut:



Gambar I- 3 Tahap Pengintegrasian KRP dalam Penyusunan KLHS

1. KLHS dilakukan untuk 1 (satu) dokumen RDTR WP Belakang Padang;
2. Pelaksanaan KLHS dilakukan setelah delineasinya ditetapkan dan setidaknya telah memiliki arahan kebijakan penataan ruang yang akan dituangkan ke dalam Rencana Detil Tata Ruang Pulau Batam atau setidaknya telah memiliki tema penaraan WP khusus bagi Rencana Detail Tata Ruang;
3. Lingkup wilayah yang menjadi objek KLHS paling sedikit sama dengan lingkup perencanaan;
4. Pelaku pelaksanaan KLHS Pulau Batam dalam penyusunan diutamakan dengan ahli lingkungan sebagai tim penyusun KLHS;
5. Analisis yang dilakukan dalam KLHS Pulau Batam memiliki masa perkiraan kajian yang sama dengan analisis dalam 20 (dua puluh) tahun;
6. Analisis KLHS lebih difokuskan pada isu-isu strategis lingkungan hidup dan fokus pada agenda keberlanjutan yang bergerak dari sumber persoalan dampak lingkungan;
7. Analisis KLHS yang dilaksanakan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak Rencana Detil Tata Ruang Pulau Batam terhadap kondisi fisik lingkungan hidup dan implikasi sosial;
8. Data, rumusan isu strategis, analisis, serta rumusan alternatif rekomendasi harus konsisten;
9. Pelaksanaan KLHS bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penentuan isu strategis dan dalam pengambilan keputusan rekomendasi;



Gambar I- 4 Implementasi KLHS Terhadap Penyusunan RDTR WP Belakang Padang

Sumber: Rancangan Tim Penyusun KLHS, 2019

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Wilayah Administrasi dan Geografis

Kecamatan Belakang Padang yang secara geografis terletak antara 1° 831,38"LU dan 103° 87464 BT termasuk salah satu dari dua belas Kecamatan di Kota Batam, yang terbentuk bersamaan dengan Pemekaran Kecamatan di Kota Batam pada tahun 2005. Kecamatan Belakang Padang tersusun atas gabungan sejumlah pulau-pulau, yang sebagian diantaranya merupakan deretan pulau terluar dan pulau perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Singapura, dengan rincian batas Kecamatan Belakang Padang lainnya adalah sebagai berikut:

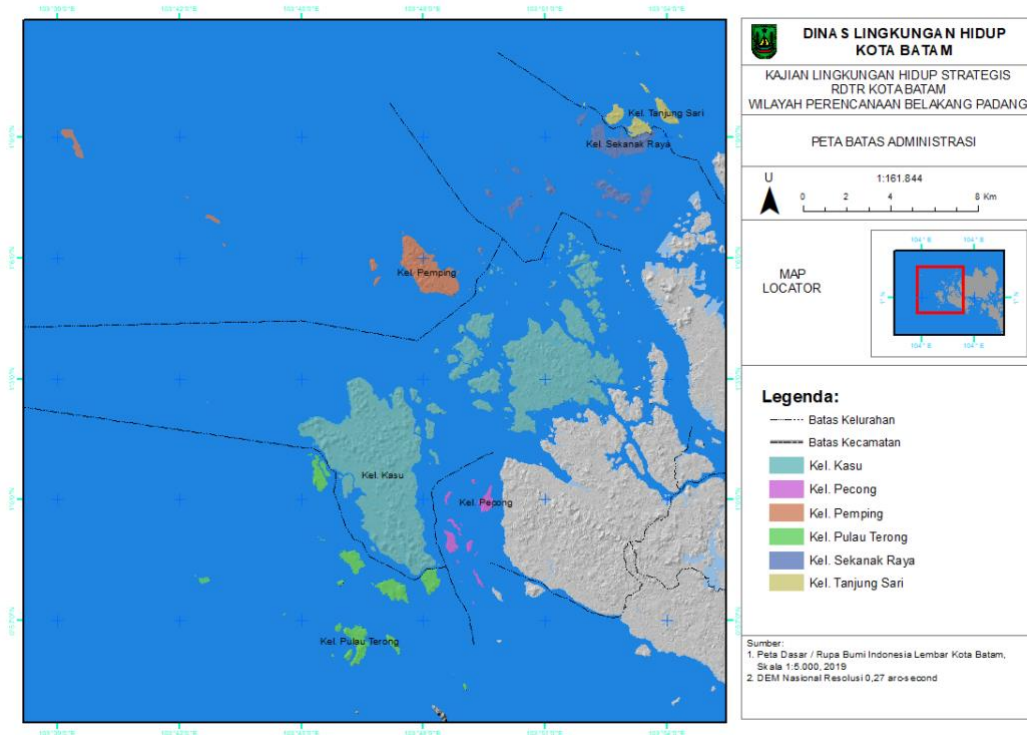
- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Kabupaten Karimun
- Sebelah Barat : Selat Malaka
- Sebelah Timur : Kecamatan Sekupang.

Kecamatan Belakang Padang terdiri dari enam kelurahan, yaitu (1) Kelurahan Pulau Terong; (2) Kelurahan Pecong; (3) Kelurahan Kasu; (4) Kelurahan Pemping; (5) Kelurahan Tanjung Sari; dan (6) Kelurahan Sekanak Raya. Seluas 73,26% wilayah Kecamatan Belakang Padang didominasi oleh Kelurahan Kasu yaitu dengan luas 50,64 km², dengan rincian luasan setiap kelurahan lainnya pada Tabel II-1 dan Peta Kecamatan Belakang Padang disajikan pada Gambar II-1 dibawah ini.

Tabel II-1 Luas Kecamatan Belakang Padang

No	Kelurahan	Ibu Kota Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase Luas (%)
1	Kasu	Kasu	50,64	73,26
2	Pulau Terong	Pulau Terong	5,79	8,37
3	Sekanak Raya	Sekanak Raya	5,02	7,29
4	Pemping	Pemping	4,25	6,14
5	Tanjung Sari	Tanjung Sari	2,04	2,95
6	Pecong	Pecong	1,38	1,99
	Belakang Padang	Sekanak Raya	69,12	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020



Gambar II-1 Peta Administrasi Kecamatan Belakang Padang

Kecamatan Belakang Padang tersusun dari 130 pulau yang terbagi pada setiap kelurahannya dan sebanyak lebih dari 32% dari pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni. Pulau terbanyak berada di Kelurahan Kasu yang juga memiliki luasan paling tinggi, yaitu sejumlah 40 pulau. Diikuti dengan Kelurahan Sekanak Raya dan Kelurahan Pulau Terong sejumlah 33 pulau dan 23 pulau secara berurutan. Urutan jumlah pulau pada setiap kelurahan di Kecamatan Belakang Padang disajikan dalam Tabel II-2.

Tabel II-2 Jumlah Pulau di Kecamatan Belakang Padang

No	Kelurahan	Jumlah Pulau	Berpenghuni	Tidak Berpenghuni	Jarak ke Ibukota Kecamatan (km)
1	Kasu	40	12	28	10
3	Sekanak Raya	33	15	18	2
2	Pulau Terong	23	6	17	23
6	Pecong	17	2	15	17

No	Kelurahan	Jumlah Pulau	Berpenghuni	Tidak Berpenghuni	Jarak ke Ibukota Kecamatan (km)
4	Pemping	12	3	9	10
5	Tanjung Sari	5	4	1	2
	Belakang Padang	130	42	88	-

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

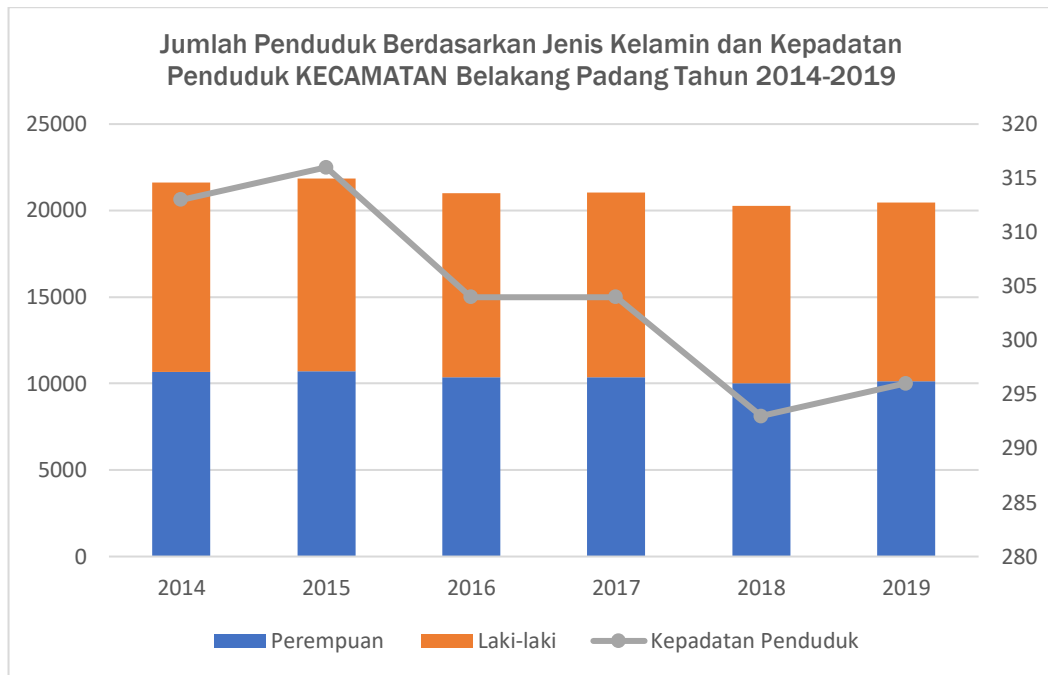
2.2 Kependudukan

Komponen utama yang menunjukkan dinamika kependudukan suatu wilayah adalah fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kondisi fisik wilayah di Kecamatan Belakang Padang yang didominasi pulau-pulau menyebabkan komposisi penduduk tersebar pada 68% jumlah pulau yang berpenghuni pada enam kelurahan. Komponen kependudukan sangat berkaitan dengan pola dan strategi pengembangan ruang di Kecamatan Belakang Padang. Pada tahun 2020, *Sex Ratio* Kecamatan Belakang Padang adalah sebesar 102, yang artinya pada setiap 100 populasi perempuan terdapat sebanyak 102 populasi laki-laki. Angka ini serupa dengan angka *Sex Ratio* Nasional yang juga menunjukkan angka 102 pada tahun yang sama.

Pertumbuhan penduduk Kecamatan Belakang Padang mengalami tren yang menurun dari tahun 2014 hingga 2019. Hal ini sejalan dengan penurunan Kepadatan Penduduk pada periode lima tahun tersebut. Penurunan kepadatan penduduk terbesar terjadi antara tahun 2018 menuju 2019, yaitu dari 304 menjadi 293. Luasan wilayah daratan Kecamatan Belakang Padang yaitu 69,12 Km² memiliki kepadatan penduduk sebesar 296 pada tahun 2019.

Berbagai hal yang dapat mempengaruhi fenomena ini termasuk Pandemi COVID-19 di Kecamatan Belakang Padang, yang dapat menjadi salah satu pendorong terjadinya penurunan jumlah penduduk, baik disebabkan karena kematian maupun migrasi karena keterbatasan peluang pekerjaan. Migrasi keluar dari Kecamatan Belakang Padang dapat terjadi secara lokal maupun migrasi internasional ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Pada tahun 2019, telah tercatat sebanyak 325 penduduk yang

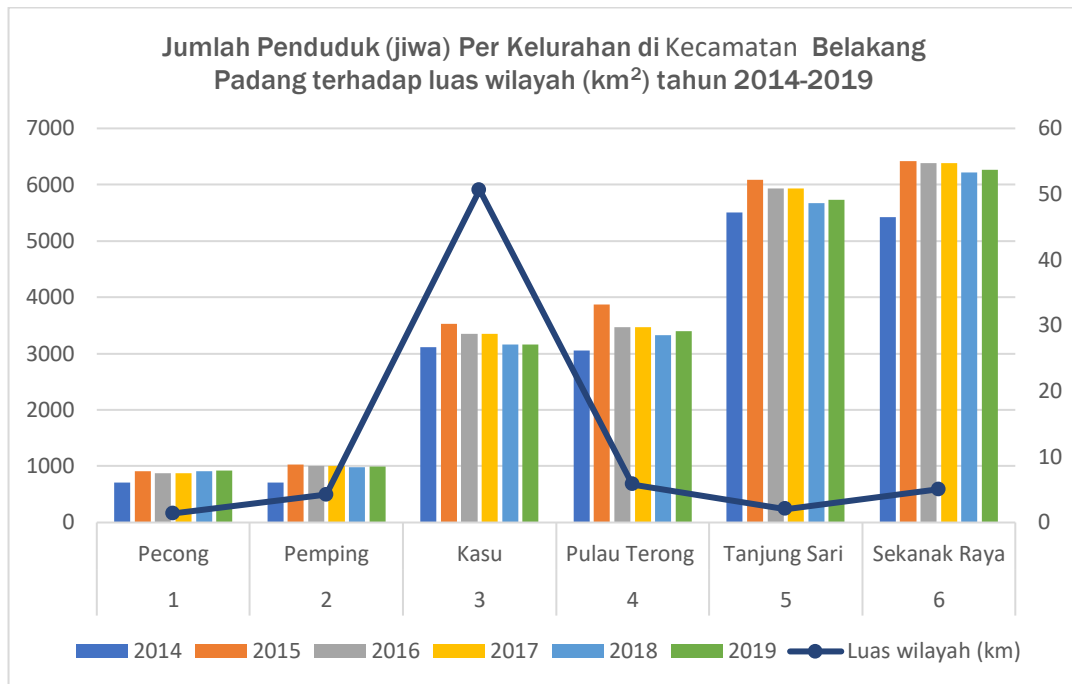
melakukan migrasi, diantaranya migrasi dalam satu kelurahan, antar kelurahan, antar Kecamatan, antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. Pola penurunan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kecamatan Belakang Padang dapat dilihat pada Gambar II-2.



Gambar II-2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Belakang Padang tahun 2014-2019

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014-2020)

Jumlah penduduk terbanyak tidak sejalan dengan luasan wilayah terluas di Kecamatan Belakang Padang. Kelurahan Kasu yang merupakan kelurahan terluas di Kecamatan Belakang Padang menempati posisi jumlah penduduk terbanyak nomor 4 setelah Kelurahan Sekanak Raya (6.264 jiwa), Kelurahan Tanjung Sari (5.727 jiwa), dan Kelurahan Terong (3.393 jiwa) pada tahun 2019. Sementara Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Sekanak Raya memiliki penduduk terdapat berturut-turut pada periode tahun 2014 hingga 2019. Secara lebih lanjut, Gambar II-3 menunjukkan perbandingan jumlah penduduk setiap kelurahan di Kecamatan Belakang Padang terhadap luasan wilayah setiap kelurahannya dalam satuan kilometer persegi (km²).



Gambar II-3 Jumlah Penduduk (jiwa) Per Kelurahan di Kecamatan Belakang Padang terhadap luas wilayah (km²) tahun 2014-2019
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014-2020)

2.3 Kondisi Sosial Budaya

Ketersediaan akses terhadap infrastruktur di wilayah menjadi penting dalam mendukung aktifitas sosial budaya di Kecamatan Belakang Padang. Termasuk didalam kategori akses tersebut adalah dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Profil akses terhadap ke tiga hal tersebut dapat menjadi indikator dalam mencerminkan kondisi sosial budaya suatu wilayah.

2.3.1 Pendidikan

Sebagai upaya peningkatan potensi sumber daya manusia, Pemerintah Daerah Kecamatan Belakang Padang bersama dengan Kementerian/Lembaga melengkapi beberapa sarana prasarana pendukung aktivitas pendidikan di setiap kelurahannya, dimulai dari kelengkapan bangunan sekolah hingga pada sumber daya pengajarnya di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai tingkat Sekolah Menengah Atas. Kelurahan Pulau Terong, Kelurahan Tanjung Sari, dan Kelurahan Sekanak Raya merupakan tiga kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan terlengkap pada setiap jenjang pendidikan dasar di Kecamatan

Belakng Padang. Data komposisi murid, guru dan fasilitas setiap kelurahannya secara lengkap disajikan pada Tabel II-3 dibawah ini. Sementara Gambar II-4 menunjukkan salah satu fasilitas pendidikan tingkat menengah atas, SMA Negeri 2 Batam di Kelurahan Sekanak Raya.

Tabel II-3 Jumlah Murid, Guru dan Fasilitas Pendidikan Per Kelurahan di
Kecamatan Belakng Padang Tahun 2019

No	Kelurahan	TK			SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA		
		M	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F
1	Pecong	28	5	1	110	7	1	0	6	1	84	8	1
2	Pemping	0	0	0	74	10	1	34	9	1	0	0	0
3	Kasu	0	4	1	423	33	2	193	9	1	124	13	1
4	Pulau Terong	72	9	3	348	38	5	179	13	2	141	10	1
5	Tanjung Sari	148	15	3	643	46	3	309	22	2	44	10	1
6	Sekanak Raya	24	4	1	518	46	5	337	17	1	400	25	1

Keterangan: M= Jumlah Murid; G= Jumlah Guru; F= Jumlah Fasilitas

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020



Gambar II-4 SMAN 2 Batam di Kelurahan Sekanak Raya

(Sumber: Survei Tim Penyusun KLHS Kecamatan Belakng Padang, 2021)

2.3.2 Kesehatan

Kelengkapan fasilitas pendukung kesehatan masyarakat di Kecamatan Belakang Padang didominasi oleh Bidan sejumlah 21 orang, Perawat 15 orang, Dokter 6 orang, dan Farmasis 1 orang. Kelurahan Tanjung Sari memiliki fasilitas kesehatan terlengkap diantara enam kelurahan di Kecamatan Belakang Padang. Ketidakmerataan jumlah tenaga medis pada setiap kelurahan di Kecamatan Belakang Padang menjadi salah satu tantangan dalam melakukan upaya peningkatan potensi sumberdaya manusianya. Mengingat bahwa aspek kesehatan dan akses terhadapnya menjadi faktor kunci dari potensi sumberdaya manusia lokal. Gambar II-5 menunjukkan salah satu fasilitas kesehatan di Kecamatan Belakang Padang, yaitu Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Belakang Padang.



Gambar II-5 UPT. Puskesmas Belakang Padang
(Sumber: Survei Tim Penyusun KLHS Kecamatan Belakang Padang, 2021)

Kecamatan Belakang Padang memiliki keterbatasan akses dan jumlah fasilitas kesehatan, yaitu hanya memiliki satu puskesmas yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Sari, 32 Posyandu yang tersebar di semua kelurahan dan 6 Polindes pada Kelurahan Sekanak Raya, Kelurahan Pemping, Kelurahan Pulau Terong, dan Kelurahan Kasu, yang dominan diantara fasilitas kesehatan tersebut baru dibangun pada tahun 2018 lalu. Tabel II-4 menunjukkan sebaran dan jumlah tenaga medis pada setiap kelurahan di Kecamatan Belakang Padang pada tahun 2019.

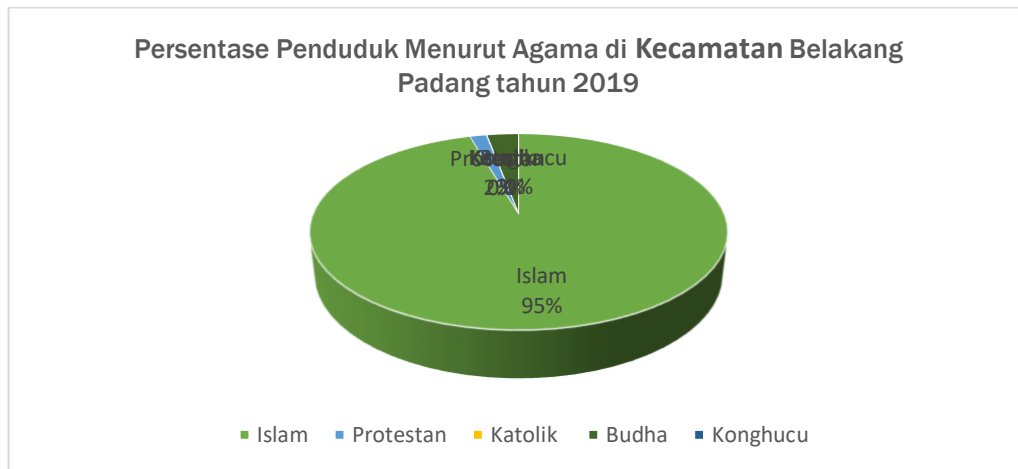
Tabel II-4 Jumlah Tenaga Medis per kelurahan di Kecamatan Belakang Padang 2019

No	Kelurahan	Jumlah Tenaga Medis			
		Dokter	Perawat	Bidan	Farmasis
1	Pecong	0	1	0	0
2	Pemping	0	0	2	0
3	Kasu	0	0	3	0
4	Pulau Terong	0	0	3	0
5	Tanjung Sari	6	14	11	1
6	Sekanak Raya	0	0	2	0
	Jumlah	6	15	21	1

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

2.3.3 Keagamaan

Dominasi penduduk Kecamatan Belakang Padang menganut agama Islam yaitu sebesar 95,48%. Sementara diantara lainnya adalah penganut agama Protestan (1,54%), Katolik (0,05%), Budha (2,91%) dan Konghucu (0,02%). Gambar II-6 dan Tabel II-4 menunjukkan pembagian kelurahan di Kecamatan Belakang Padang untuk setiap penganut agama pada tahun 2019.



Gambar II-6 Persentase Penduduk Menurut Agama yang dianut di Kecamatan Belakang Padang tahun 2019
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020)

Tabel II-4 Persentase Penduduk Menurut Agama yang dianut per kelurahan di Kecamatan Belakang Padang tahun 2019

No	Kelurahan	Agama (dalam persen)				
		Islam	Protestan	Katolik	Budha	Konghucu
1	Pecong	99,46	0,11	0	0,43	0
2	Pemping	100	0	0	0	0
3	Kasu	94,56	4,93	0	0,38	0,13
4	Pulau Terong	99,68	0	0	0,32	0
5	Tanjung Sari	87,81	2,41	0,17	9,6	0
6	Sekanak Raya	99,38	0,32	0	0,3	0
	Jumlah	95,48	1,54	0,05	2,91	0,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

2.4 Kondisi Ekonomi

Memiliki karakteristik geografis kepulauan, membuat Kecamatan Belakang Padang memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan aktivitas perekonomian masyarakatnya dan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari aktivitas ekonomi. Kecamatan Belakang Padang memiliki keterbatasan

dalam pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana ekonomi pada enam kelurahannya. Terlihat kelompok pertokoan, pasar dengan bangunan permanen hanya terdapat pada Kelurahan Pulau Terong yaitu sejumlah total 5 unit. Sementara lima kelurahan lainnya didukung oleh keberadaan toko/warung kelontong sebagai penggerak sektor perekonomiannya, dengan total sejumlah 160 unit, yang 100 diantaranya juga berlokasi di Kelurahan Pulau Terong.

Kecamatan Belakang Padang merupakan kawasan pertambangan minyak dan menjadi lokasi stasiun gas bumi. Gambar II-7 menunjukkan lokasi pertambangan dan stasiun gas bumi PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) di pesisir Kecamatan Belakang Padang. PLTG ini berfungsi untuk melistriki warga Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang sejak tahun 2015 lalu dan terus beroperasi tanpa henti hingga saat ini.



Gambar II-7 PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) Kecamatan Belakang Padang
(Sumber: Survei Tim Penyusun KLHS KECAMATAN Belakang Padang, 2021)

Selain keterbatasan fasilitas atau pusat pengembangan ekonomi, Kecamatan Belakang Padang juga mengalami keterbatasan pada sarana lembaga keuangan seperti bank dan berbagai jenis koperasi, yaitu hanya terdapat satu Bank Umum Pemerintah di Kelurahan Pulau Terong dan satu Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) di Kelurahan Pecong. Sisi lain yang mendukung perekonomian lokal di Kecamatan Belakang Padang

adalah aktivitas Sub sektor Hortikultura pada beberapa tanaman hias, sub sektor perkebunan pada komoditas kelapa dan karet, dan sub sektor perikanan tangkap. Tabel II-5 mengidentifikasi jenis komoditas pertanian/perkebunan dan perikanan/peternakan di Kecamatan Belakang Padang pada tahun 2019. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Belakang Padang menjadikan sektor pertanian/perkebunan dan perikanan/peternakan sebagai bagian dari kegiatan perekonomiannya.

Tabel II-5 Jenis Komoditas Pertanian/Perkebunan & Perikanan/Peternakan
Kecamatan Belakang Padang Tahun 2019

Jenis Tanaman Sayuran	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Bawang Merah	1	10
Cabai	51	7.120
Petsai	45	2.760
Total (ha)	97	9.890
Jenis Tanaman Biofarmaka	Luas Panen (m2)	Produksi (kg)
Jahe	650	1.250
Laos	1.600	2.750
Kencur	300	650
Kunyit	800	2.200
Total (m2)	3.350	6.850
Jenis Tanaman Buah-buahan	Jumlah Pohon	Produksi (kg)
Mangga	2.000	1.180
Durian	49	45
Jeruk	2.000	670
Pisang	1.430	361
Pepaya	1.563	556
Total (pohon)	7.042	2.812
Jenis Tanaman Perkebunan	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Kelapa	623	118
Karet	110	94
Total (ha)	733	212
Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	

Sapi Potong	76
Ayam Kampung	1.972.217
Ayam Petelur	2.026
Ayam Pedaging	18.723.237
Total (Ekor)	1974319
Jenis Perikanan	Nilai Produksi
Perikanan Tangkap	250.421.531
Perikanan Budidaya	8.519.851
Total (Rp)	258.941.382

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

2.5 Kondisi Perumahan dan Pemukiman

Karakteristik kepulauan di Kecamatan Belakang Padang menyebabkan Kecamatan ini memiliki pola permukiman di wilayah pesisir yang cenderung berada di pesisir dan berasosiasi dengan pelabuhan lokal. Seperti contoh ditunjukkan pada Gambar II-8 a di Pulau Pemping dan b di Pulau Kasu. Jika diamati dari citra satelit, karakteristik seperti ini didominasi terjadi pada hampir seluruh pulau berpenghuni di Kecamatan Belakang Padang. Hal ini sangat umum terjadi pada wilayah dengan karakteristik pulau-pulau kecil dengan jarak yang saling berdekatan satu dan lainnya. Faktor akses transportasi, ketersediaan sumber air minum, jangkauan listrik, dan ketersediaan sumberdaya alam marin menjadi pendorong terciptanya pola perumahan dan permukiman ini.



a. Pulau Pemping bagian selatan b. Pulau Kasu bagian selatan

Gambar II-8 Sebaran permukiman di Pulau Pemping dan Pulau Kasu

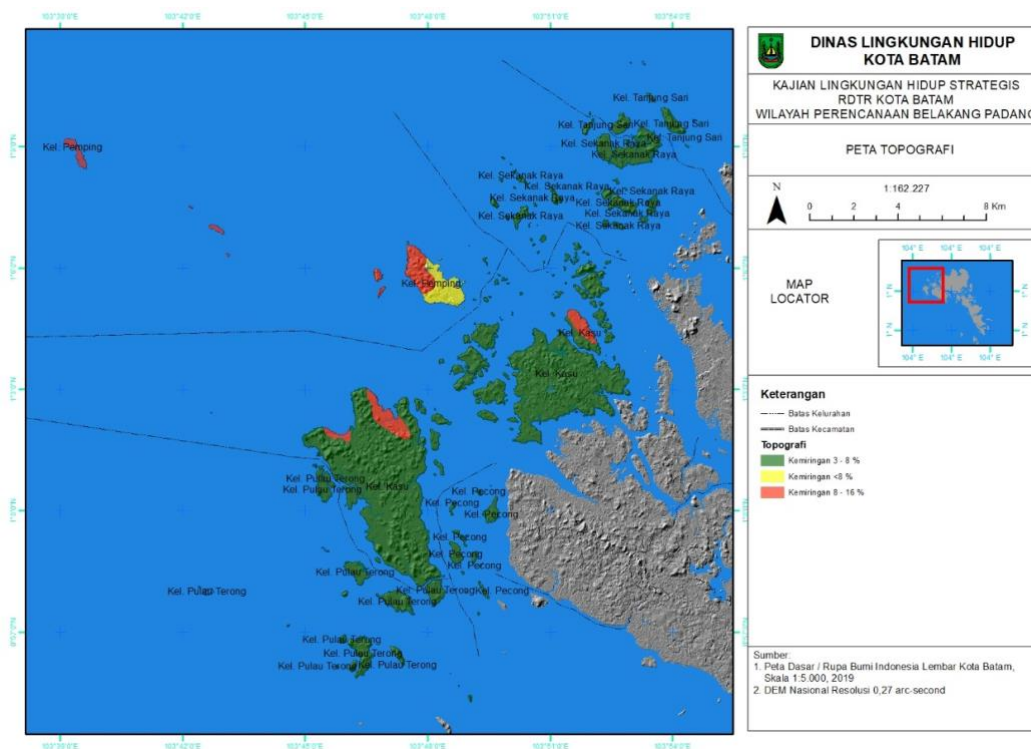
(Sumber: Citra Satelit Google, 2021)

Fasilitas pendukung perumahan dan permukiman sangat menentukan kualitas perumahan dan permukiman tersebut. Ketersediaan air bersih dan sistem sanitasi yang baik patut untuk dijadikan penentu kualitas perumahan dan permukiman, terlebih pada pulau-pulau di Kecamatan Belakang Padang yang saat ini sangat bergantung pada suplai air bersih dari air isi ulang. Sementara menurut BPS 2020, sistem sanitasi masyarakat kepulauan yang cenderung rendah, yaitu terdiri dari enam jamban pembuangan air besar pada seluruh Kecamatan Belakang Padang. Jangkauan listrik pada permukiman bersumber pada genset dan aliran dari PLTG PT TGI pada beberapa lokasi saja, misalnya sebagian masyarakat di Pulau Pemping telah merasakannya, sementara sekitar 55 KK lainnya belum bisa dialiri listrik PLTG karena berada di pulau yang terpisah dari Pulau Pemping, pulau utama di Kelurahan Pemping.

Selain itu, keberadaan menara dan operator layanan komunikasi telepon seluler juga mempengaruhi kecenderungan penduduk dalam memilih lokasi permukimannya. Terlihat bahwa sudah tersebar nya dukungan jaringan komunikasi berupa menara BTS yang menjangkau kelurahan pada seluruh kelurahan di Kecamatan Belakang Padang. Terlebih Pandemi Covid-19 menuntut siswa untuk dapat belajar dari rumah, sehingga keberadaan jaringan komunikasi dan internet merupakan kebutuhan mendasar saat ini.

2.6 Topografi/Kemiringan Lereng

Kecamatan Belakng Padang didominasi dengan kemiringan lereng 3-8% dengan kecenderungan bentuk relief agak landai dengan kelas lereng B. Kemiringan lereng menunjukkan besarnya sudut lereng, hal ini dapat berpengaruh pada besarnya aliran permukaan, semakin curam lerengnya maka semakin besar energi angkut airnya. Namun, hal ini tidak begitu besar dialami oleh Kecamatan Belakng Padang. Kelurahan Pulau Pemping memiliki kelas lereng lebih besar dari 8%, yang artinya landai menuju agak curam. Gambar II-9 menunjukkan variasi relief Kecamatan Belakng Padang. Wilayah daratan Kecamatan Belakng Padang didominasi bukit-bukit landai ditengah pulau dengan kisaran elevasi antara 50 sampai 76 mdpl.



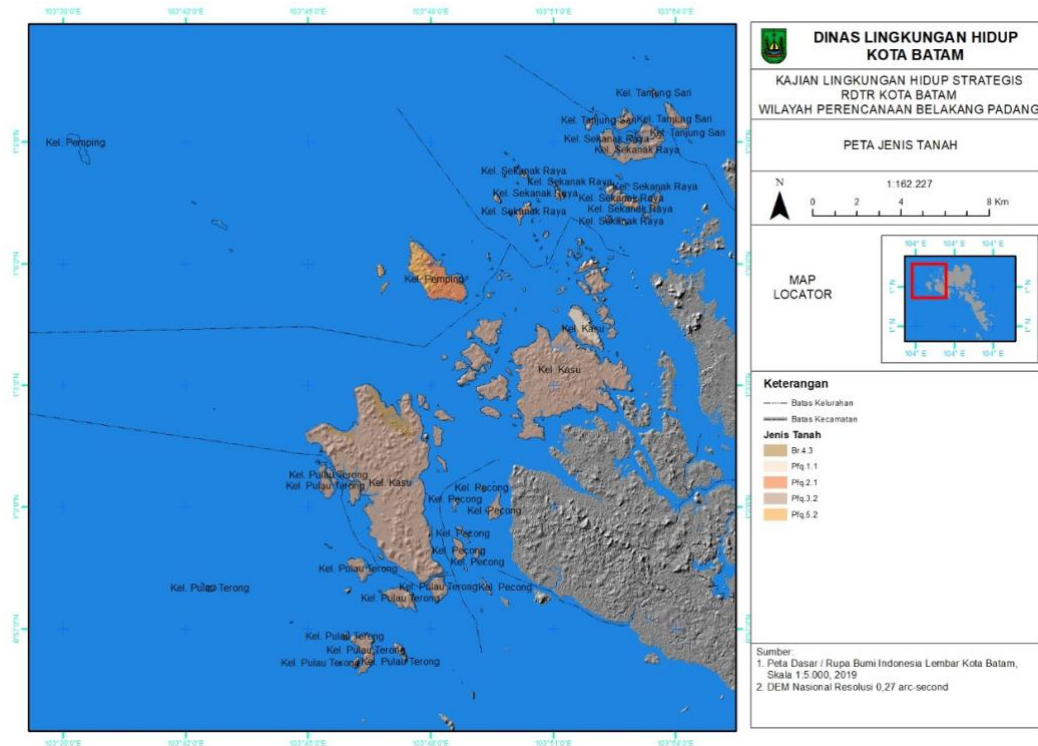
Gambar II-9 Peta Topografi Kecamatan Belakng Padang

(Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2015)

2.7 Jenis Tanah

Kecamatan Belakng Padang didominasi dengan tanah berjenis Pfq.3.2 pada hampir seluruh pulau, dan sebagian jenis lainnya di Pulau Pemping dengan jenis tanah Pfq.5.2 di bagian utara pulau dan Pfq 2.1 di bagian selatan pulau.

Tanah jenis P ini termasuk pada grup Tanah Dataran (P), hal ini sejalan dengan kelas kemiringan lereng di Kecamatan Belakang Padang. Dataran dengan endapan halus dan kasar (Pfq) didominasi oleh Hapludox dan Kandiuudults. Gambar II-10 menunjukkan sebaran jenis tanah di Kecamatan Belakang Padang.

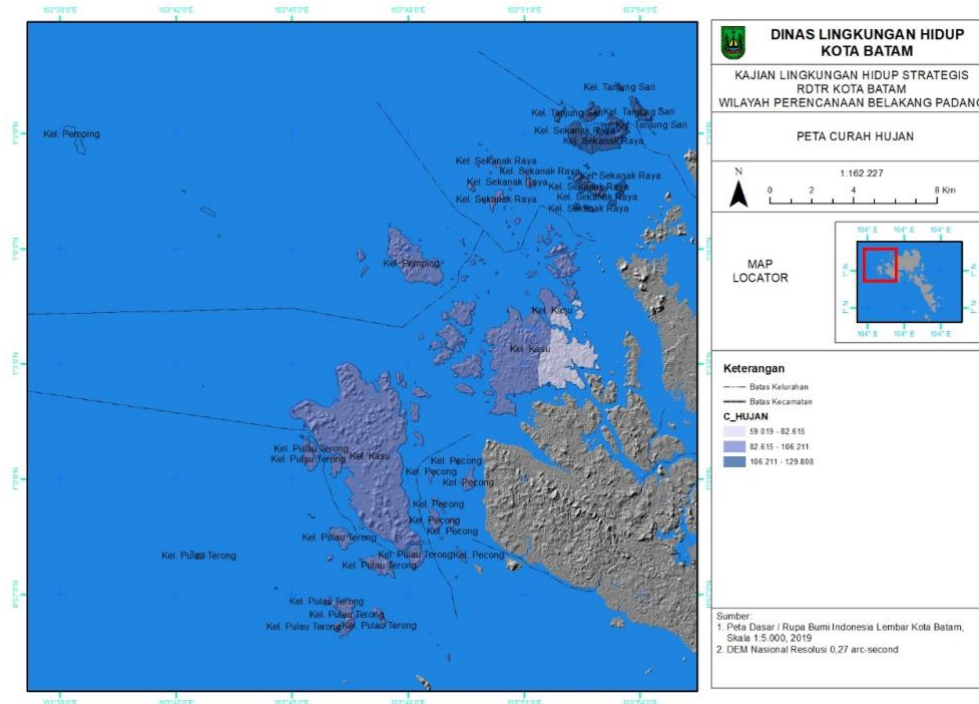


Gambar II-10 Peta Jenis Tanah Kecamatan Belakang Padang
(Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2015)

2.8 Klimotologi

Kondisi curah hujan di Kecamatan Belakang Padang berada pada rentang 59.019-129.808 mm²/tahun. Dominasi kelurahan di Kecamatan Belakang Padang memiliki curah hujan diatas 82.615 mm²/tahun, hanya Kelurahan Kasu bagian timur yang memiliki perbedaan curah hujan tahunan yaitu pada rentang 59.019 mm²/tahun - 82.615 mm²/tahun. Berikilm tropis dengan suhu minimul 23° C dan suhu maksimum sekitar 35 ° C, serta suhu rata-rata sekitar 28,5 ° C. Keterbatasan sumberdaya air menyebabkan masih terjadinya kekeringan pada musim kemarau di KECAMATAN Belakang Padang, karena

penduduknya cukup bergantung pada air hujan. Gambar II-11 menunjukkan sebaran curah hujan di Kecamatan Belakang Padang.

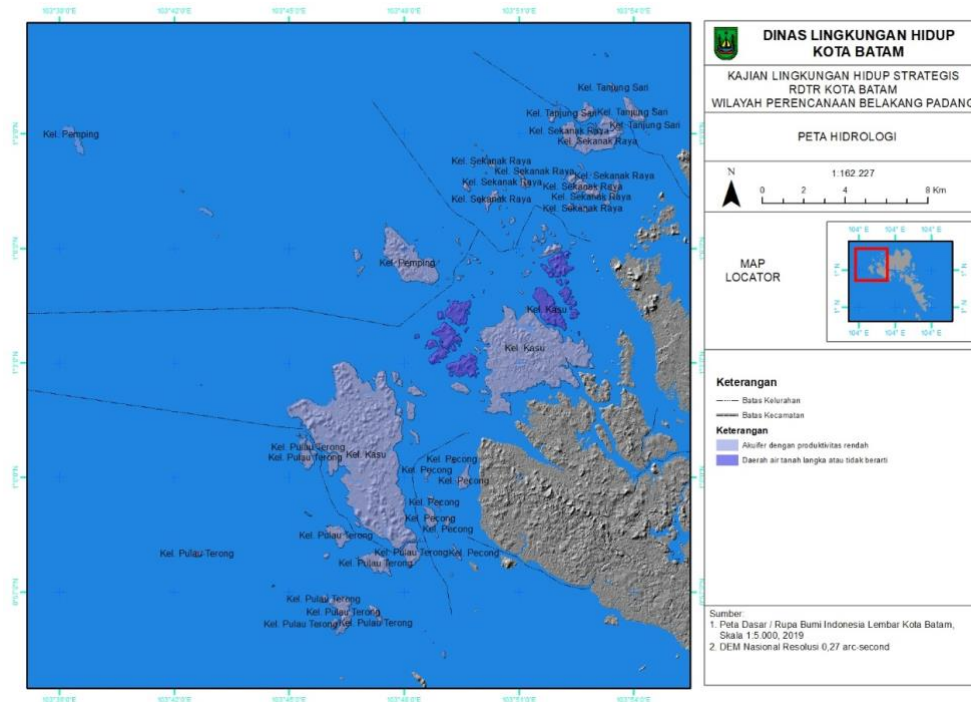


Gambar II-11 Peta Curah Hujan Kecamatan Belakang Padang

2.9 Hidrologi

Gambar II.12 dibawah ini menunjukkan keterbatasan akuifer di Kecamatan Belakang Padang. Hal ini berpengaruh pada kemampuan daerah dalam menangkap dan menyimpan air hujan sebagai sebuah cadangan sumberdaya air. Kecamatan Belakang Padang didominasi oleh jenis akuifer dengan produktivitas rendah, terlebih pada Kelurahan Kasu merupakan daerah air tanah langka atau tidak berarti. Kondisi ini menyebabkan penduduk di Kecamatan Belakang Padang sangat bergantung pada air hujan sebagai intake waduk, dan air kemasan sebagai sumber air bersih.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Belakang Padang
2022-2042



Gambar II-12 Peta Hidrologi Kecamatan Belakang Padang

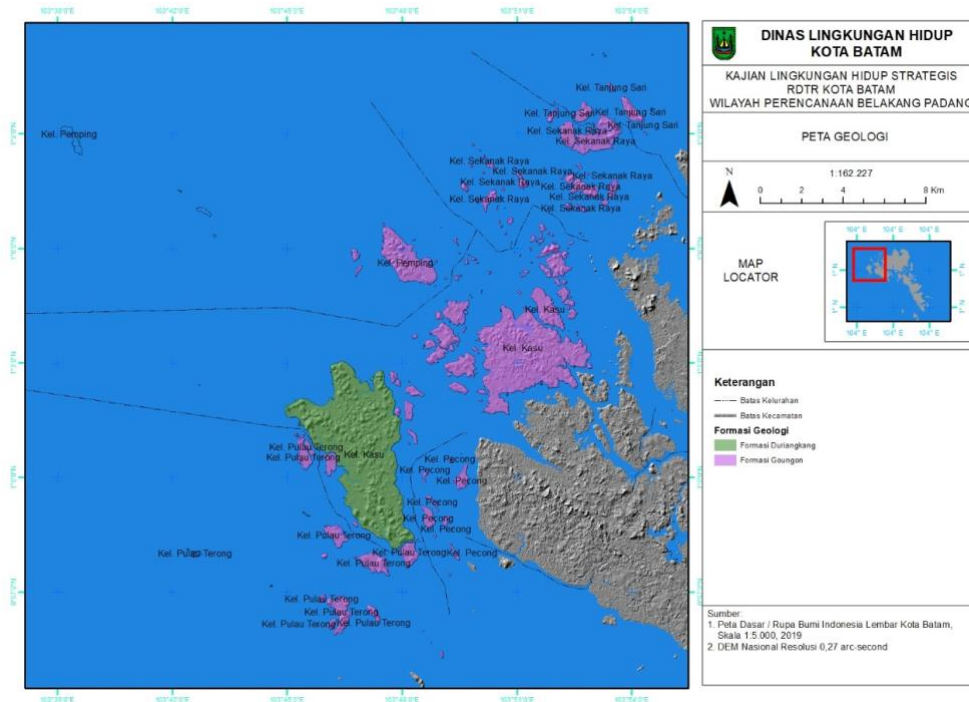
2.10 Geologi

Gambar II.13 menunjukkan sebaran formasi geologi di Kecamatan Belakang Padang, yaitu terdiri dari Formasi Duriangkang di pulau utama Kelurahan Kasu dan lainnya dipenuhi oleh Formasi Goungon.

A. Formasi Duriangkang (TRsd) tersusun atas perselingan serpih dan batupasir kuarsa (3:1). Serpih berwarna kelabu-kehitaman dengan struktur pensil, rapuh dan mengandung sedikit karbonat. Sementara batupasir berwarna kelabu terang, mikaan, sortasi buruk dan terkonsolidasi baik. Berdasarkan kandungan fosil penunjuk *Pterophyllum bintanense* sp. dan *Pterophyllum bintanense* cf. *contiguum* Schank, maka umur dari formasi ini disimpulkan Trias Akhir dan terendapkan pada lingkungan danau sampai laut dangkal dengan tebal sekitar 600 meter.

B. Formasi Goungon

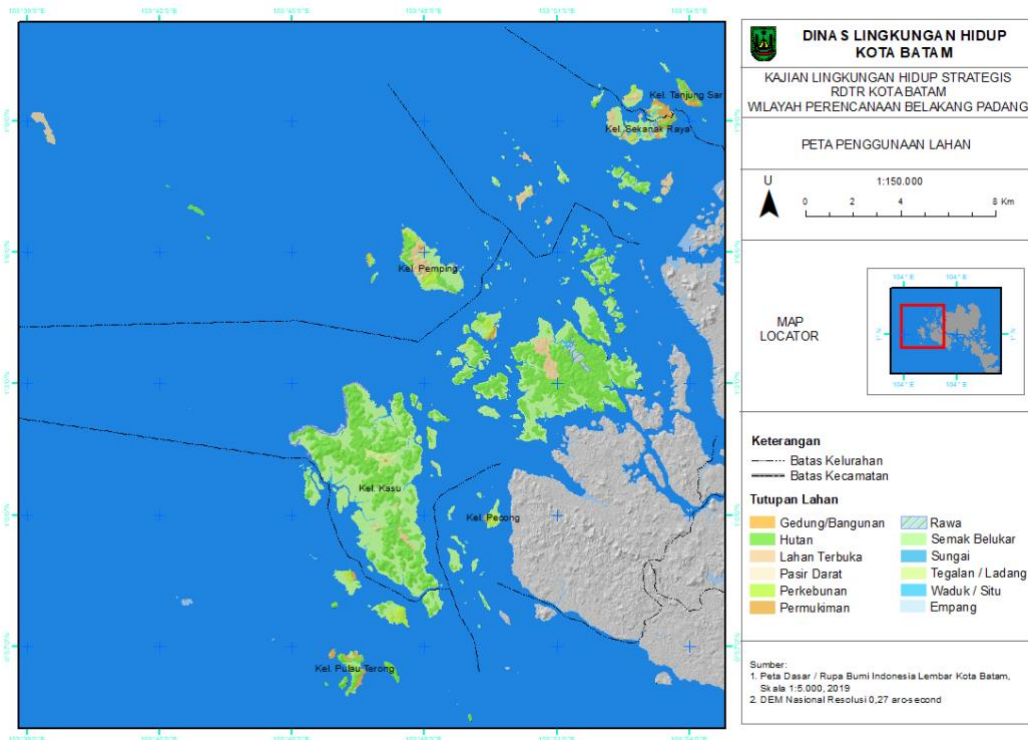
Formasi Goungon merupakan lempung hitam, lempung pink coklat, berpasir, pasir mika, pasir putih dan pasir kecoklatan. Jenis batuan ini baik untuk dikembangkan menjadi daerah terbangun, sedangkan untuk kegiatan pertanian hanya untuk pertanian lahan kering.



Gambar II-13 Peta Formasi Geologi Kecamatan Belakang Padang
(Sumber: Kementerian ESDM/Badan Geologi, 2010)

2.11 Penggunaan Lahan

Kecamatan Belakang Padang terdiri dari penggunaan lahan berupa gedung/bangunan, hutan, lahan terbuka, pasir darat, perkebunan, permukiman, rawa, semak belukar, tegalan, waduk dan empang. Namun, didominasi oleh penggunaan lahan berupa Hutan dan Perkebunan pada enam kelurahannya. Selain itu, terdapat lahan permukiman yang cukup mendominasi Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Sekanak Raya. Gambar II-14 menunjukkan sebaran tutupan lahan di Kecamatan Belakang Padang pada setiap kelurahannya.



Gambar 2.14 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Belakng Padang
(Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2017)

2.12 Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem sebagai salah satu pendekatan yang mendukung dalam kajian KLHS dikelompokkan menurut Millenium Ecosystem Assessment (2005) menjadi empat kategori, yaitu jasa penyedia, jasa pengaturan, jasa budaya, dan jasa pendukung. Alam/ekosistem sebagai penyedia jasa pendukung kehidupan manusia dapat dianalisis berdasarkan potensi dan keterbatasan wilayah dalam menyediakan jasa tersebut bagi manusia.

2.12.1 Jasa Ekosistem Penyedia

Jasa Penyedia terdiri atas (1) Penyedia Pangan, (2) Penyedia Air Bersih, Penyedia Serat/fiber, (3) Penyedia Bahan Bakar, Kayu dan Fosil, & (4) Penyedia Sumberdaya Genetik. Kecamatan Belakng Padang memiliki keterbatasan dalam menyediakan bahan bakar, kayu dan fosil, serta Penyedia Sumberdaya Genetik, yaitu pada Kelurahan Kasu, Kelurahan Pemping, Kelurahan Sekanak

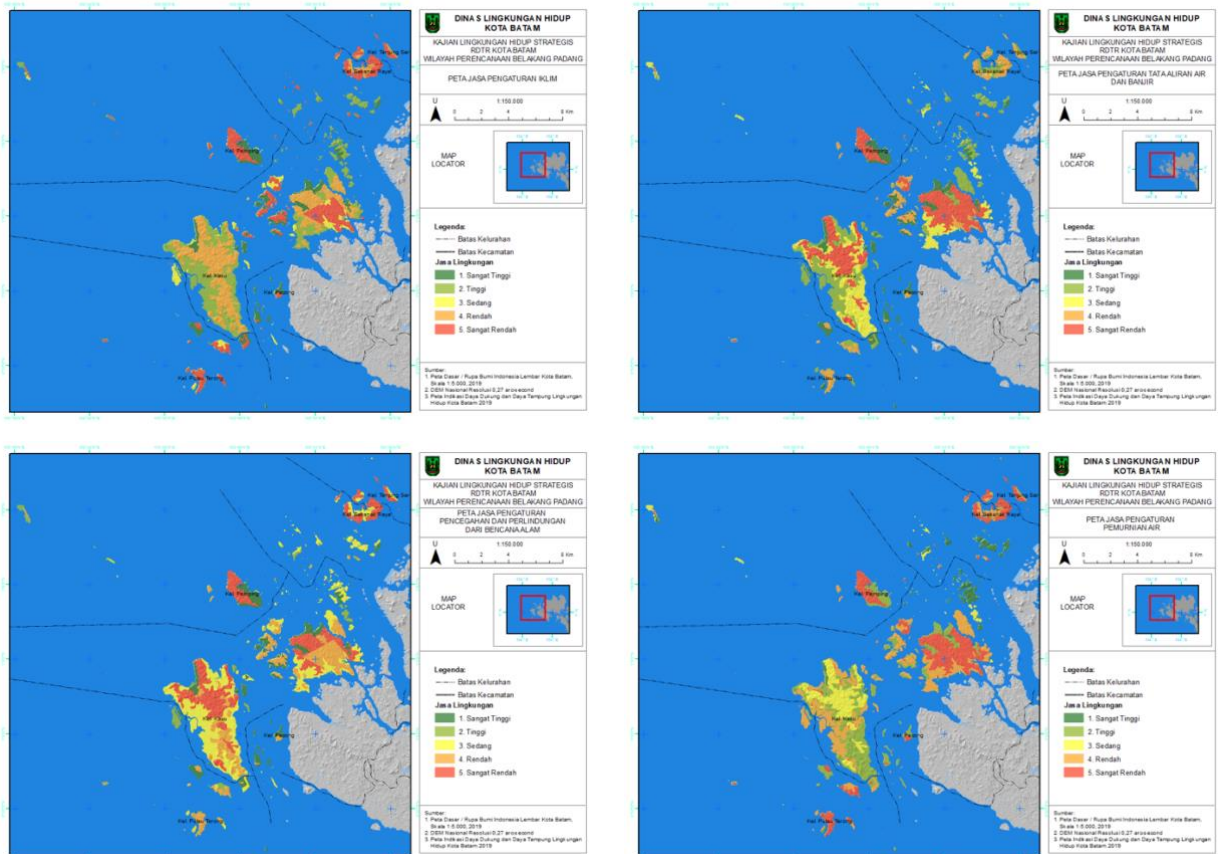
Raya, dan Kelurahan Tanjung Sari. Sementara Pulau Kasu, Kelurahan Kasu, memiliki potensi penyedia air bersih yang tinggi (88%) dikarenakan tutupan lahan yang baik di lokasi tersebut, serta pemanfaatan saat ini yang masih bisa ditingkatkan. Gambar II-15 menunjukkan lima peta Jasa Penyedia di Kecamatan Belakang Padang.



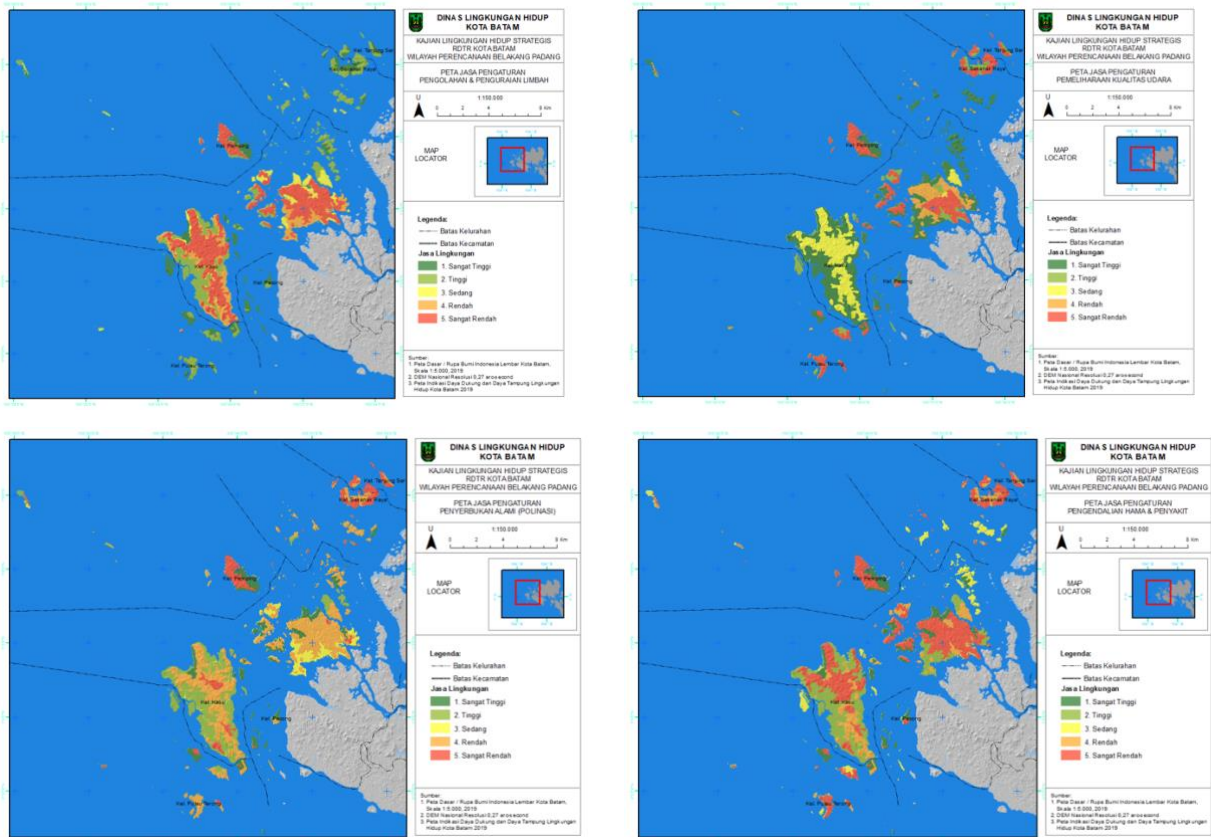
Gambar 2.15 Kelompok Jasa Penyedia di Kecamatan Belakang Padang

2.12.2 Jasa Pengaturan

Jasa Pengaturan terdiri atas delapan bagian, yaitu (1) Jasa Pengaturan Iklim, (2) Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir, (3) Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam, (4) Jasa Pengaturan Pemurnian Air, (5) Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah, (6) Jasa Pengaturan Kualitas Udara, (7) Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami (Polinasi), dan (8) Jasa Pengaturan Hama dan Penyakit. Diantara delapan jenis jasa pengaturan ini, Kelurahan Kasu memiliki Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara yang memiliki nilai klasifikasi sangat tinggi yaitu 79,5%, Jasa Pengaturan Pemurnian Air sebesar 60,6%, dan Jasa Pengaturan Iklim sebesar 52,5%.



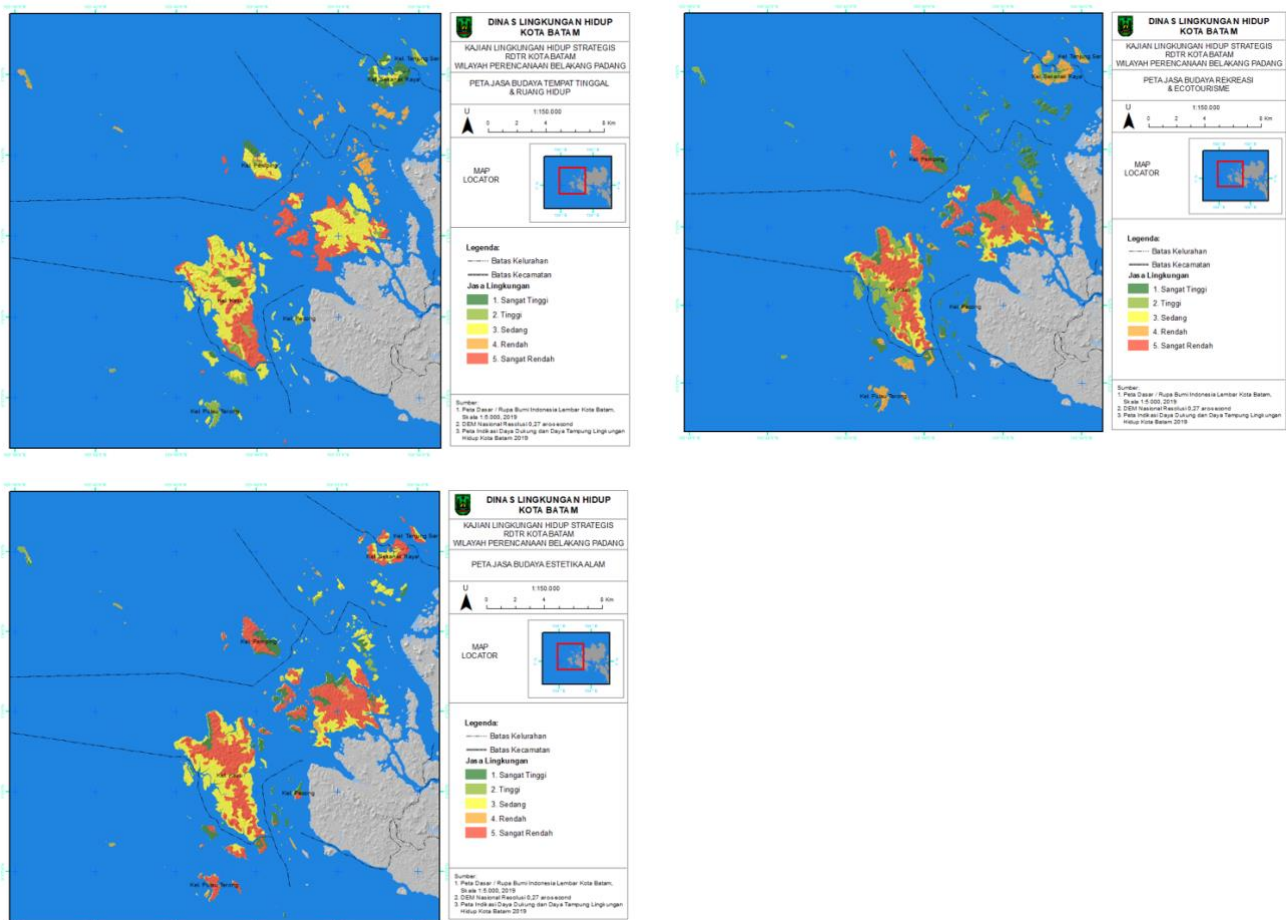
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Belakng Padang
2022-2042



Gambar II-16 Peta Jasa Ekosistem Kelompok Jasa Pengaturan

2.12.3 Jasa Budaya

Jasa Budaya terdiri atas (1) Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup, (2) Jasa Budaya Rekreasi dan Ecotourism, dan (3) Jasa Budaya Estetika Alam. Kecamatan Belakng Padang, khususnya pada lokasi perumahan dan permukiman saat ini di Pulau Kasu berada pada kategori kelas dukungan jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup yang rendah. Sementara nilai sangat tinggi sebagai pendukung tempat tinggal dan ruang hidup berada pada Kelurahan Tanjung Sari, yaitu sebesar 32,1%. Jasa Budaya Rekreasi dan Ecotourism sangat tinggi berada pada Kelurahan Kasu, yaitu sebesar 52,7%.



Gambar 2.17 Peta Jasa Ekosistem Kelompok Jasa Budaya

2.12.4 Jasa Pendukung

Jasa ekosistem Pendukung terdiri dari (1) Jasa Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan, (2) Jasa Pendukung Siklus Hara, (3) Jasa Pendukung Produksi Primer, dan (4) Jasa Pendukung Biodiversitas. Karakteristik pulau-pulau di Kecamatan Belakang Padang menyebabkannya memiliki jasa pendukung yang pembentukan tanah dan pemeliharaan kesuburan, serta jasa pendukung siklus hara yang rendah. Namun, Kelurahan Kasu memiliki sebagian wilayahnya sebagai pendukung siklus hara yang sangat tinggi, yaitu sebesar 51,7%. Selain itu, Kelurahan Kasu memiliki potensi pendukung Produksi Primer dan Biodiversitas yang sangat tinggi, yaitu sebesar 65% dan 51,9% secara berurutan.



Gambar 2.18 Peta Jasa Ekosistem Kelompok Jasa Pendukung

2.13 Tinjauan Materi RTRW Kota Batam

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam (RTRW) Tahun 2021-2041 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021. Lingkup wilayah administrasi RTRW ini mencakup seluruh Kecamatan di Kota Batam, termasuk Kecamatan Belakng Padang. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Batam adalah untuk mewujudkan ruang Kota Batam menuju bandar dunia madani berbasis sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, maritim, logistik dan industri yang bertaraf internasional.

Terdapat beberapa strategi penataan ruang kota yang meliputi:

- a. Strategi untuk pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu dan berhirarki;

- b. Strategi untuk pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah Kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas Kota;
- c. Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung;
- d. Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan budidaya;
- e. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana Struktur Ruang Kecamatan Belakang Padang pada RTRW 2021-2041 yaitu:

1. Sistem Jaringan Prasarana → Sistem Jaringan Transportasi → Pasal 17 Ayat 2b diperuntukkan sebagai pelabuhan laut pengumpul dan Ayat 3 sebagai terminal khusus.
2. Sistem Jaringan Energi → (a) Jaringan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi seperti pada Pasal 19:
 - Ayat 2a, bahwa terdapat jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan pada *West Natuna Transport System (WNTS)* terhubung ke Pulau Pemping - Jaringan Tanjung Uncang Batam.
 - Ayat 2b, bahwa Kecamatan Belakang Padang termasuk pada daftar lokasi yang terdapat penyaluran gas bumi dari kilang pengolahan menuju konsumen.
 - Ayat 2c, bahwa Kecamatan Belakang Padang terdapat Depo minyak dan gas yang meliputi terminal minyak dan gas.
3. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan:
 - PLTD Belakang Padang di Kecamatan Belakang Padang
 - PLTD Pulau Terong di Kecamatan Belakang Padang
 - PLTD Pulau Pecong di Kecamatan Belakang Padang
 - PLTD Pulau Kasu di Kecamatan Belakang Padang
4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air:

- Pasal 21 Ayat 2a → Waduk Sekanak I, Waduk Sekanak II, Waduk Pulau Pemping, Waduk Pulau Lumba, Waduk Pulau Mecan berada di Kecamatan Belakang Padang.
 - Pasal 21 Ayat 2c → Jaringan air baku untuk air minum berada salah satunya di Kecamatan Belakang Padang.
5. Infrastruktur Perkotaan:
- Pasal 22 ayat 2a → Jaringan perpipaan salah satunya di Waduk Sekanak I, Waduk Sekanak II, Waduk Pulau Pemping, Waduk Pulau Lumba, Waduk Pulau Mecan berada di Kecamatan Belakang Padang.
 - Sistem jaringan persampahan → TPA di Kecamatan Belakang Padang

Rencana Pola Ruang Kecamatan Belakang Padang pada RTRW 2021-2041 yaitu:

1. Kawasan perlindungan setempat pada sekitar waduk di Kecamatan Belakang Padang.
2. Kawasan ekosistem mangrove dengan luas sekitar 404 hektar, salah satunya berada di Kecamatan Belakang Padang.
3. Kawasan Peruntukan Budidaya
 - Kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Belakang Padang.
 - Kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Belakang Padang.
 - Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kecamatan Belakang Padang.
 - Kawasan pertanian di Kecamatan Belakang Padang.
 - Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Belakang Padang.
 - Kawasan pariwisata di Kecamatan Belakang Padang.
 - Kawasan perumahan di Kecamatan Belakang Padang.
 - Kawasan perdagangan di Kecamatan Belakang Padang.
 - Kawasan fasilitas umum dan sosial di Kecamatan Belakang Padang.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENYELENGGARAAN KLHS

3.1 Persiapan Penyelenggaraan KLHS

Pokja KLHS RDTR Belakang Padang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.156/HK/IV/2019 tentang Tim dan Sekretariat Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Batam. Pokja KLHS RDTR Belakang Padang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai Walikota. Terdapat tiga koordinator KLHS RDTR Belakang Padang yaitu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Kepala Bappelitbangda Kota Batam dengan sekretaris 1 yaitu Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Sekretaris 2 yaitu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bapelitbang Kota Batam. Adapun anggota Pokja KLHS ini terdiri atas 32 anggota yang masing-masing mewakili unsur OPD di Kota Batam. Lampiran SK Pokja KLHS dan susunan tim Pokja KLHS dapat dilihat pada lampiran.

3.2 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan atau bentuk proses konsultasi publik lainnya. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017, dinyatakan bahwa identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang representatif dapat diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan, untuk membantu pemilihan pemangku kepentingan yang tidak saja berpengaruh, tetapi juga mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap sasaran pokok dan arah kebijakan, serta peduli terhadap potensi permasalahan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh program pembangunan yang bersangkutan. Tujuan identifikasi pemangku kepentingan adalah:

1. Menentukan secara tepat pihak-pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan KLHS
2. Menjamin diterapkannya asas partisipasi yang diamanatkan undang-undang No.32 Tahun 2009
3. Menjamin hasil perencanaan dan evaluasi program memperoleh legitimasi atau penerimaan oleh publik
4. Agar masyarakat dan pemangku kepentingan mendapatkan akses untuk menyampaikan informasi, saran, pendapat, dan pertimbangan tentang pembangunan berkelanjutan melalui proses penyelenggaraan KLHS RDTR Belakang Padang Tahun 2021-2041

Konsep dasar pelibatan peran pemangku kepentingan dalam KLHS RDTR Belakang Padang, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian dengan lingkup, skala, dan relevansi sasaran pokok dan arah kebijakan RDTR Sungai Beduk
2. Penyesuaian dengan pengaruh dan tingkat pentingnya keterlibatan masyarakat bagi peningkatan kinerja sasaran pokok dan arah kebijakan RDTR Sungai Beduk
3. Pemetaan pemangku kepentingan yang relevan terhadap RDTR Belakang Padang

Identifikasi pemangku kepentingan ini diperlukan tidak saja untuk memperoleh data dan informasi pendukung yang penting/signifikan yang harus merupakan realita, tetapi juga dapat berfungsi sebagai verifikator data, informasi ataupun pengetahuan yang dihasilkan dari proses kajian ini. Oleh karena itu identifikasi pemangku kepentingan ini dilakukan ditahap awal proses awal KLHS. Adapun pemangku kepentingan yang terlibat pada KLHS RDTR Belakang Padang:

1. Pembuat keputusan dan/atau penyusun kebijakan, rencana dan/atau program
2. Lembaga/instansi terkait
3. Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian (perorangan/tokoh/ kelompok). Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian (perorangan/tokoh/ kelompok) biasanya terdiri dari

perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya, asosiasi profesi, forum-forum pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup (DAS, air), LSM. Perorangan/tokoh, kelompok yang mempunyai data dan informasi berkaitan dengan SDA, dan pemerhati lingkungan hidup. Adapun masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian (perorangan/tokoh/ kelompok) dalam KLHS RDTR Belakang Padang yaitu:

A. Universitas Batam

Universitas Batam merupakan salah satu universitas yang terletak di Pulau Batam yang memiliki kerjasama dengan Yayasan Ruang Urban Indonesia dalam membantu pemerintah pada kerangka perencanaan, penataan dan pengelolaan wilayah serta perkotaan. UNIBA sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Provinsi Kepri yang memiliki program studi Magister Perencanaan Wilayah dan RUBI adalah sebuah NGO berbasis kompetensi perencanaan, penataan wilayah dan perkotaan yang fokus dan peduli pada perencanaan, penataan dan pengelolaan wilayah dan perkotaan yang memiliki jaringan network yang luas baik nasional maupun internasional maka diharapkan dengan adanya penjanjian kerjasama ini akan terjalin sinergi dan kolaborasi yang tidak hanya memberikan manfaat bagi UNIBA dan RUBI saja namun juga mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

B. Universitas Riau Kepulauan

Universitas Riau Kepulauan terletak di Kota Batam yang didirikan pada tahun 1994 dengan misi upaya mendirikan, membina dan mengelola perguruan tinggi di Pulau Batam. Terdapat beberapa hibah penelitian dosen yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan baik di Kota Batam maupun di Kepulauan Riau, diantaranya:

- Strategi Pemerintah Kota Batam Dalam Implementasi Program Pemberantasan Buta Aksara Di Daerah Hinterland

- Dinamika Logam Berat Cu, Cd Dan Pb Di Perairan Barat
- Pulau Batam
- Pengembangan Sistem Traffic Light Berdasarkan
- Kepadatan Kendaraan Menggunakan PLC
- Studi Kelayakan Dan Desain Pemanfaatan Sumber Energi
- Terbarukan Di Kampung Tua Tanjung Undap, Batam
- Analisa Kadar Cemar Logam Pada Air Minum Dalam
- Kemasan (AMDK) Yang Di Produksi Di Kota Batam
- Strategi Pemerintah Kota Batam Dalam Implementasi Program Pemberantasan Buta Aksara Di Daerah Hinterland
- Bioekologi Dan Genetik Siput Gonggong (*Strombus Turturella*) Di Perairan Batam Dan Bintan Propinsi Kepulauan Riau
- Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui
- Rekonstruksi Tata Kelola Zakat
- Evaluasi Kualitas Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Yang
- Diproduksi Di Kota Batam
- Studi Keanekaragaman Jenis Dan Distribusi Kantong Semar (*Nepenthes Spp*) Di Pulau Batam Dan Implementasinya Dalam Pembuatan Buku Saku Keanekaragaman Hayati Indonesia
- Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

C. Ikatan Ahli Perencanaan Kepulauan Riau

IAP adalah organisasi profesi perencanaan wilayah dan kota tertua dan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, didirikan pada tahun 1971 (<https://iapindonesia.org/>). IAP berfungsi sebagai wadah pembinaan profesi, komunikasi, penelitian dan pengembangan, konsultasi dan koordinasi antar ahli perencanaan wilayah dan kota, juga antara ahli perencanaan wilayah dan kota dengan ahli lainnya,

lembaga masyarakat, swasta, pemerintah dan dunia internasional. Selain itu, IAP juga merupakan wadah untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. IAP didirikan dengan tujuan:

- Mengembangkan keahlian perencanaan wilayah dan kota
 - Meningkatkan mutu, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan bagi segenap ahli perencanaan wilayah dan kota
 - di Indonesia
 - Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai mitra pemerintah, swasta, dan lembaga internasional
- IAP banyak berperan dalam mengawal perencanaan dan pembangunan wilayah dan kota di Indonesia, salah satunya adalah dengan merilis Indonesia Most Livable City Index (MLCI) pada tahun 2009, 2011, 2014, dan terakhir 2017 yang menghasilkan indeks kelayakan huni kota-kota di Indonesia berdasarkan persepsi warga kota. Selain itu, dalam perjalanannya juga IAP banyak memberikan advokasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik dalam aspek pengembangan kota, pengembangan wilayah, maupun isu-isu internasional dan global terkait perencanaan wilayah dan kota. Beberapa advokasi IAP kepada pemerintah pusat adalah memberikan masukan tertulis terhadap NSPK yang disusun oleh pemerintah pusat, seperti peroman tata ruang tentang TOD, pedoman penyusunan rencana tata ruang, dll.

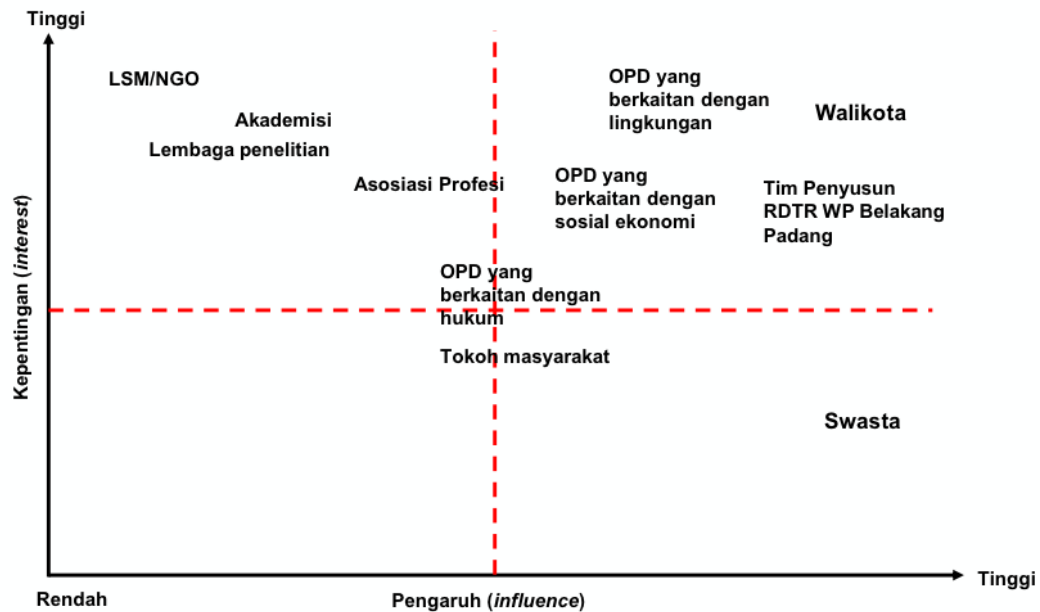
4. Masyarakat yang Terkena Dampak

Masyarakat yang terkena dampak merupakan masyarakat yang berada di wilayah perencanaan yang diwakili oleh camat dan lurah setempat. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota

atas usul sekretariat daerah kabupaten atau kota terhadap Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat. Lurah merupakan pimpinan dari kelurahan. Garis tanggung jawab dari lurah berada tepat di bawah camat. Tugas utama lurah adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun perwakilan dari masyarakat yang terdampak yaitu:

- a. Camat Belakang Padang
- b. Lurah Kasu
- c. Lurah Pulau Terong
- d. Lurah Sekanak Raya
- e. Lurah Pemping
- f. Lurang Tanjung Sari
- g. Lurah Pecong

Dari identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan dokumen ini, dapat dipetakan kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) dari setiap aktor yang disajikan menggunakan metode *interest-influence grid stakeholders*. Dalam metode ini menggunakan dua pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Teoritis, dan (2) Pendekatan Empiris berdasarkan observasi sementara di Kecamatan Belakang Padang. Pemetaan pemangku kepentingan penting dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dan swasta sebagai upaya pengembangan kapasitas (*Capacity Development*). Hasil analisis metode *interest-influence grid stakeholders* disajikan pada Gambar III-1.



Gambar III-1 Analisis interest-influence grid stakeholders dari KLHS RDTR WP Belakang Padang

3.3 Hasil Pelingkupan Isu Pembangunan Berkelanjutan

3.3.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan

Proses identifikasi awal pelingkupan isu pembangunan berkelanjutan strategis dilakukan melalui proses partisipatif yakni dengan penyebaran kuesioner kepada anggota POKJA KLHS RDTR Kecamatan Belakang Padang, tokoh masyarakat, LSM, Pelaku Pembangunan Kelurahan, dan masyarakat dan *Focus Group Discussion* (FGD). Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan FGD, teridentifikasi isu pembangunan berkelanjutan sebanyak 37 isu. Berikut Tabel III-1 menunjukkan hasil lengkap identifikasi awal isu pembangunan berkelanjutan:

Tabel III-1 Daftar Panjang Isu Pembangunan berkelanjutan Kecamatan Belakang Padang

Koding	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Sumber
Isu 1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi (L)	UNIBA
Isu 2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan (L)	UNIBA
Isu 3	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya (S)	UNIBA

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Koding	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Sumber
Isu 4	Tata kelola dalam lokasi penditrubusian budidaya ikan dll (E)	UNIBA
Isu 5	Ketersediaan air bersih masih kurang baik (L)	UNIBA
Isu 6	Pasar tradisional tetap dipertahankan dan penataan Kondisi lingkungan (E)	UNIBA
Isu 7	Wisata Religi tetap dipertahankan dan dikembangkan (S)	UNIBA
Isu 8	Inovasi terhadap ketersediaan Air Baku dari Tadah Hujan (L)	UNIBA
Isu 9	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya (S)	UNIBA
Isu 10	Kriminalitas penjualan Sabu-sabu di Kelurahan Pulau Terong (E)	Tribun.com
Isu 11	Keterbatasan sinyal/jaringan internet di Pulau Lenggang, Kelurahan Sekanak Raya (S)	Merdeka.com
Isu 12	TKI luar negeri ilegal yang mengajukan permohonan pasport di Kantor Imigrasi Belakang Padang (E)	Beritaterkini.com
Isu 13	TPA Sampah di Kecamatan Belakang Padang yang overload (L)	Hasil Survei Tim Penyusun
Isu 14	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat (E)	Antaraneews.com
Isu 15	Buruknya infrastruktur jalan di sepanjang Polsek Belakangpadang – Kampung Baru (S)	Tribunbatam.com
Isu 16	Kriminalitas internasional di Kelurahan Pulau Terung, Belakang Padang (S)	Kumparan.com
Isu 17	Kesulitan dan mahalannya suplai air bersih di Pulau Lenggang (L)	Suara.com
Isu 18	Wisata sejarah di Belakang Padang belum dikembangkan (S)	Hasil Survei Tim Penyusun
Isu 19	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancama kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA, misalnya di Kelurahan Pulau Terung (S)	Hasil Survei Tim Penyusun
Isu 20	Ancaman kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas antropogenik, seperti abrasi, intrusi air laut, sampah darat dan laut (L)	Hasil Survei Tim Penyusun
Isu 21	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga (S)	Hasil Survei Tim Penyusun
Isu 22	Abrasi pantai di beberapa pulau (L)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 23	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja (E)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 24	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau (E)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 25	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan (L)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 26	Keterhubungan antar pulau kecil (kebutuhan jaringan jalan penghubung antar pulau kecil) (S)	Dinas CKTR Kota Batam

Koding	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Sumber
Isu 27	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat (L)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 28	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional (S)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 29	Beberapa ruas jalan di Pulau dalam kondisi buruk, tidak dilengkapi dengan Penerangan Jalan Umum (S)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 30	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah (S)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 31	Kendala sumber air bersih akan mengalami penyusutan ketika musim kemarau memiliki area beresiko permasalahan drainase, belum tersedianya Masterplan Drainase (L)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 32	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah dan persampahan (L)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 33	Membaca situasi lingkungan tentang konflik kepentingan di pesisir (industri, nelayan, industri perairan, habitat bakau) (L)	UNRIKA
Isu 34	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi → dugong, lumba-lumba (L)	UNRIKA
Isu 35	Isu Ekosistem pesisir → jasa pengaturan tata aliran air dan banjir yang rendah, sementara isu konversi mangrove terjadi (L)	UNRIKA
Isu 36	Ketersediaan air bersih (L)	UPT Air Bersih Belakang Padang
Isu 37	Jaringan sanitasi dan IPAL (L)	UPT Air Bersih Belakang Padang

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

3.3.2 Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu isu lingkungan dengan kode L, isu sosial dengan kode S, dan isu ekonomi dengan kode E. Pengelompokan isu juga dilakukan dengan melebur beberapa isu yang memiliki kemiripan isu menjadi tema isu yang lebih umum. Peleburan isu menghasilkan 12 (dua belas) isu lingkungan, 3 (tiga) isu sosial dan 6 (enam) isu ekonomi. Pengelompokan isu dapat dilihat pada tabel III-2.

Tabel III-2 Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan di WP Belakang Padang

Kode	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Informasi	Kata Kunci
Isu Lingkungan			
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi		Penataan permukiman
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	TPA Sampah di Kecamatan Belakang Padang yang overload	infrastruktur wilayah, degradasi lingkungan
		Ancaman kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah laut	
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	Inovasi terhadap ketersediaan Air Baku dari Tadah Hujan	infrastruktur wilayah, ketersediaan air bersih
		Kesulitan dan mahalny suplai air bersih di Pulau Lenggang	
		Kendala sumber air bersih akan mengalami penyusutan ketika musim kemarau memiliki area beresiko permasalahan drainase, belum tersedianya Masterplan Drainase	
		Ancaman kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas antropogenik, seperti abrasi, intrusi air laut, sampah darat dan laut	
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	Buruknya infrastruktur jalan di sepanjang Polsek Belakangpadang - Kampung Baru	infrastruktur wilayah, jalan
		Beberapa ruas jalan di Pulau dalam kondisi buruk, tidak dilengkapi dengan Penerangan Jalan Umum	
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Abrasi pantai di beberapa pulau	Kerawanan Bencana
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan		Kewilayahan, pengelolaan pesisir
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	Membaca situasi lingkungan tentang konflik kepentingan di pesisir (industri, nelayan, industri perairan, habitat bakau)	Kewilayahan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Kode	Isu Pembangunan Bekelanjutan	Informasi	Kata Kunci
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	Keterhubungan antar pulau kecil (kebutuhan jaringan jalan penghubung antar pulau kecil)	infrastruktur wilayah, transportasi
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	Keterbatasan sinyal/jaringan internet di Pulau Lengkang, Kelurahan Sekanak Raya	infrastruktur wilayah, telekomunikasi
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	jasa pengaturan tata aliran air	Degradasi lingkungan
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir		Sumberdaya Alam, degradasi lingkungan, konversi lahan
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)		Sumberdaya Alam
Isu Sosial			
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	Wisata Religi tetap dipertahankan dan dikembangkan	Kearifan lokal
		Wisata sejarah di Belakang Padang belum dikembangkan	
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	penjualan Sabu-sabu di Kelurahan Pulau Terong	Perbatasan laut internasional
		TKI luar negeri ilegal yang mengajukan permohonan pasport di Kantor Imigrasi Belakang Padang	
		Kriminalitas internasional di Kelurahan Pulau Terong, Belakang Padang	
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhn negara tetangga		
Isu Ekonomi			

Kode	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Informasi	Kata Kunci
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditrubusian budidaya ikan	Keterbatasan nelayan dalam pemasaran hasil perikanan	Peluang Usaha
Isu E-2	Pasar tradisional tetap dipertahankan dan penataan Kondisi lingkungan	Ancaman pada kehilangan pasar tradisional dan penataan lingkungan pasar eksisting	
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Minimnya sarana prasarana pendukung perekonomian, seperti bank umum daerah dan koperasi.	
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	Keterbatasan kesempatan kerja di Kecamatan Belakang Padang akan menimbulkan terjadinya peningkatan migrasi keluar	
Isu E-5	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	Perusakan dan eksploitasi SDA oleh pelaku internasional	Exploitasi SDA
Isu E-6	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	Pulau-pulau kecil di Kecamatan Belakang Padang diakuisisi oleh pihak swasta, menyebabkan nelayan terbatas dalam mengeksplor potensi wilayah	

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

Setelah melakukan pengelompokan isu strategis, maka teridentifikasi 21 Isu-isu pembangunan strategis merupakan keseluruhan isu pembangunan berkelanjutan hasil dari proses identifikasi isu, yang selanjutnya dikelompokkan menjadi isu pembangunan berkelanjutan dengan pengelompokan berdasarkan kesamaan tema substansi dan/atau telaah sebab-akibat. Hasil pengelompokan berdasarkan kesamaan tema substansi dan/atau telaah sebab-akibat ada 21 isu utama tersebut berdasarkan hasil kesamaan tema berdasarkan isu-isu panjang yang terdapat pada pembahasan daftar isu-isu panjang pada tabel III.2 sebelumnya. Berikut ini Tabel III-3 menunjukkan daftar Isu Pembangunan berkelanjutan (Isu PB) berdasarkan kesamaan tema, substansi dan/atau telaah sebab akibat.

Tabel III-3 Hasil Pengelompokan Isu PB Kecamatan Belakang Padang

No Isu	Isu Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Pengelompokan
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi pendiribusian budidaya ikan
Isu E-2	Pasar tradisional tetap dipertahankan dan penataan Kondisi lingkungan
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

3.3.3 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Setelah melakukan pengelompokan isu pembangunan berkelanjutan, dilakukan analisis tentang keterkaitan lintas isu pembangunan berkelanjutan, dimana diasumsikan semakin banyak terdapat lintas isu, maka semakin penting Isu pembangunan berkelanjutan tersebut. Analisis keterkaitan tersebut diantaranya meliputi empat aspek yaitu, (1) lintas wilayah, (2) lintas pemangku kepentingan, dan (3) lintas waktu. Kita dapat menetapkan tingkat pentingnya keterkaitan isu tersebut misalnya minimal 1 atau 2 lintas isu. Analisis ini dilakukan dengan skoring, dimana 3 = keterkaitan lintas isu tinggi, 2 = keterkaitan lintas isu sedang, 1 = keterkaitan lintas isu rendah, dan 0 = tidak

ada lintas isu. Isu yang dipilih merupakan isu yang memiliki nilai >5 karena dinilai memenuhi lebih dari setengah kriteria strategis. Adapun penilaian untuk setiap unsur seperti berikut:

a. Lintas Wilayah

Isu yang bersifat lintas wilayah berarti isu tersebut berdampak pada skala wilayah tertentu. Penilaian isu yang bersifat lintas wilayah terdiri atas tiga kategori. Kategori pertama yaitu isu tersebut hanya berpengaruh secara lokal atau dalam buffer wilayah tersebut. Kategori ini memiliki nilai paling rendah yaitu 1 (satu). Kategori kedua yaitu suatu isu yang memiliki pengaruh terhadap seluruh wilayah perencanaan dan sekitarnya. Kategori ini memiliki nilai 2 (dua). Kategori ketiga yaitu suatu isu yang memiliki pengaruh terhadap wilayah yang lebih luas baik di dalam wilayah perencanaan, sekitar wilayah perencanaan, lingkup kota, lingkup provinsi, maupun lingkup nasional. Kategori ini memiliki nilai 3 (tiga). Justifikasi penilaian setiap isu yang bersifat lintas wilayah dapat dilihat pada Tabel III.4.

Tabel III-4 Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Lintas Wilayah

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Wilayah
Kategori Isu Lingkungan			
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi	Tata kelola hunian di pesisir sebaiknya terintegrasi dengan wilayah sekitarnya (Skala WP)	2
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	Penanganan sampah dilakukan dengan skema hilirisasi yang baik (Skala Kota)	3
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	Sumberdaya air bersih agar dapat dikelola dengan baik, akses dan kualitas diupayakan merata diseluruh WP (Skala WP)	3
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	Jalan lingkungan menjadi akses darat utama yang menghubungkan antar desa di dalam WP (Skala WP)	2

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Wilayah
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Harus dilakukan upaya pengurangan risiko bencana yang terintegrasi di WP Belakang Padang, terutama karakteristik WP Belakang Padang yang berupa kepulauan menjadi tantangan regional (Skala WP)	2
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan	Berkaitan dengan kegiatan yang dapat berdampak destruktif bagi kawasan pesisir setempat (Skala WP)	3
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	Pembagian otoritas yang jelas dan tegas agar setiap masyarakat dapat memanfaatkan ruang laut dengan adil (Skala WP)	3
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	Transportasi laut menjadi penting, terlebih dengan karakteristik kepulauan, masuk/keluar WP Belakang Padang (Skala kota)	3
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	Layanan penyedia jaringan telekomunikasi perlu disediakan dengan baik (Skala WP)	2
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	Diperlukan sistem pembuangan air limbah yang terintegrasi agar tidak berdampak pada lingkungan darat dan laut (Skala Kota)	3
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir	Lahan Mangrove mempunyai kecenderungan mudah tertekan akibat pembangunan wilayah pesisir, dan jika rusak akan berdampak buruk bagi lingkungan pesisir (skala WP)	3
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)	Spesies hewan yang ditemukan secara lokal (Skala lokal)	1
Kategori Isu Sosial			
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	Kearifan lokal yang dijadikan faktor penarik wisatawan lokal maupun internasional	3

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Wilayah
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	Berlokasi didaerah perbatasan membutuhkan pengelolaan yang ekstra di WP Belakang Padang, dan berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan skala nasional	3
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga	Berlokasi didaerah perbatasan membutuhkan pengelolaan yang ekstra di WP Belakang Padang, dan berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan skala nasional	3
Kategori Isu Ekonomi			
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditrubusian budidaya ikan	rantai nilai hasil laut dan distribusinya membutuhkan dukungan dari wilayah lain sekitarnya, baik secara lokal maupun internasional	3
Isu E-2	Pasar tradisional tetap dipertahankan dan penataan Kondisi lingkungan	Pusat kegiatan ekonomi yang terbatas di daerah kepulauan menjadi penting untuk dikelola secara lokal (Skala lokal)	1
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Pusat kegiatan ekonomi yang terbatas di daerah kepulauan menjadi penting untuk dikelola secara kompleks karena membutuhkan investor lokal ataupun nasional	3
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	Pengangguran harus dikelola secara menyeluruh dan memanfaatkan potensi lapangan kerja dari kawasan diluar WP Belakang Padang	3

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Wilayah
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	Privatisasi pulau mengganggu aktifitas masyarakat lokal dalam melakukan eksplorasi hasil laut skala lokal	2
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	perairan terbuka dikawasan perbatasan rawan menjadi sasaran kelompok pencurian ikan internasional, membutuhkan dukungan wilayah sekitar WP Belakang Padang untuk tetap memonitoring ini agar tidak menimbulkan kerugian yang besar	3

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

b. Lintas sektor/pemangku kepentingan

Kerja sama lintas sektor melibatkan dinas dan orang-orang di luar sektor tertentu yang merupakan usaha bersama mempengaruhi faktor yang secara langsung atau tidak langsung. Kerjasama dilakukan untuk mendefinisikan masalah, prioritas kebutuhan, pengumpulan, dan interpretasi informasi serta evaluasi. Lintas sektor merupakan hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dari sektor yang berbeda, dibentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil yang tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan atau efisien. Prinsip kerja sama lintas sektor melalui pertalian dengan program di dalam dan di luar sektor untuk mencapai kesadaran yang lebih besar terhadap konsekuensi kesehatan dari keputusan kebijakan dan praktek organisasi sektor-sektor yang berbeda. Penilaian skor untuk lintas sektor/pemangku kepentingan terdiri atas tiga kategori. Kategori pertama yaitu melibatkan 1- 2 sektor yang memiliki pilar yang sama. Skor untuk kategori ini yaitu 1 (satu). Kategori kedua yaitu melibatkan dua sektor atau lebih dari berbeda pilar. Skor untuk kategori ini yaitu 2 (dua). Kategori ketiga yaitu melibatkan lebih dari empat sektor baik dari pilar yang sama maupun pilar berbeda.

Skor untuk kategori ini yaitu 3 (tiga). Adapun penilaian lintas sektor/pemangku kepentingan untuk setiap isu pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel III-5.

Tabel III-5 Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Lintas Sektor

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Sektor
Kategori Isu Lingkungan			
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi	Hunia nelayan melibatkan instansi daerah yaitu Dinas Perkim & Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	2
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	Pengelolaan sampah melibatkan Dinas LH, Dinas Perkim, Dinas CKTR, & Dinkes	3
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam) sebagai instansi penyedia air bersih di Kota Batam, Dinas CKTR, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan untuk mengintegrasikan prasarana air bersih dan permukiman, Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air	3
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	Dinas Perhubungan & Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan	2
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Bencana pesisir ditangani oleh BMKG sebagai penyedia data hidrometeorologi, BP Batam melakukan survei titik banjir, Dinas Pemadam Kebakaran yang menangani kebencanaan dan jalur evakuasi bencana, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang memberikan bantuan cepat tanggap ketika terjadi bencana	3

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Sektor
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan	Kawasan pesisir yang diatur oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, BP Batam sebagai pengelola investasi/ sektor swasta, Dinas Lingkungan Hidup mengelola lingkungan pesisir sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta Dinas Pariwisata dan Dinas Perindag dan ESDM	3
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	Kawasan pesisir yang diatur oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, BP Batam sebagai pengelola investasi/ sektor swasta, Dinas Lingkungan Hidup mengelola lingkungan pesisir sesuai dengan tugas dan fungsinya	3
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	Dinas Perhubungan Kota Batam mengelola akses terhadap fasilitas transportasi,	2
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	Kominfo Kota Batam mengatur jaringan telekomunikasi publik	2
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam) sebagai pengelola badan air yang berpotensi tercemar air limbah, Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengawas lingkungan perairan	2
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir	BPKH Wilayah XII berwenang dalam pengaturan dan pelepasan wilayah hutan, dinas lingkungan hidup berperan dalam mengontrol alih fungsi kawasan bakau di pesisir	2
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)	Dinas Perikanan mengontrol terjadinya eksploitasi SDA hayati dan Dinas Lingkungan Hidup mengontrol kegiatan yang berpotensi mengganggu eksistensi SDA hayati yang dilindungi tersebut	2
Kategori Isu Sosial			

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Sektor
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkewenangan mengelola kawasan yang dianggap bernilai sejarah dan budaya yang tinggi	2
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berwenang mengelola SDA lokal, rehabilitasi, dan pembinaan masyarakat. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral mengelola keluar/masuknya dan aktivitas perdagangan baik lokal maupun ke daerah perbatasan, bekerja sama dengan Polsek Belakang Padang dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhn negara tetangga	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berwenang mengelola SDA lokal, rehabilitasi, dan pembinaan masyarakat, bekerja sama dengan Polresta Balerang	3
Kategori Isu Ekonomi			
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditrubusian budidaya ikan	Dinas Perikanan mengendalikan aktivitas budidaya perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memperhatikan unit usaha nelayan di WP Belakang Padang	2
Isu E-2	Pasar tradisional tetap dipertahankan dan penataan Kondisi lingkungan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Lingkungan Hidup berwenang mengatur kondisi fisik dan kualitas pasar tradisional di WP Belakang Padang	1

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Sektor
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindag, bekerja sama dengan pihak swasta dalam menyediakan akses perbankan pendukung perekonomian masyarakat di WP Belakang Padang	2
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	UPTD Pengawasan Batam Dinas Tenaga Kerja berperan dalam pemantauan kesempatan kerja bagi usia produktif, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berperan dalam menambah modal SDM	3
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkewenangan mengelola kawasan yang dianggap mampu menambah pendapatan daerah namun tetap memperhatikan kaidah lingkungan dan menjunjung tinggi keutuhan NKRI, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berwenang mengatur fungsi ruang di kepulauan WP Belakang Padang	3
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	Dinas Perikanan mengendalikan aktivitas budidaya perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memperhatikan unit usaha nelayan di WP Belakang Padang, bekerja sama dengan Polsek Belakang Padang dan Polresta Balerang	3

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

c. Lintas Waktu

Isu yang bersifat lintas waktu merupakan isu yang dapat terjadi dan diselesaikan dalam rentang waktu tertentu baik dalam skala tahunan maupun periode masa pemerintahan. Penilaian skor untuk lintas waktu terdiri atas tiga kategori. Kategori pertama yaitu isu yang dapat diselesaikan dalam skala tahunan hingga lima tahun pertama perencanaan. Skor untuk kategori ini yaitu 1 (satu). Kategori kedua yaitu isu yang dapat diselesaikan selama rentang waktu perencanaan yaitu 20

tahun. Skor untuk kategori ini yaitu 2 (dua). Kategori ketiga isu yang selalu muncul setiap tahun dan penyelesaiannya dilakukan dari waktu ke waktu. Skor untuk kategori ini yaitu 3 (tiga). Adapun penilaian lintas waktu untuk setiap isu pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel III-6. Tabel III-6 Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Lintas Waktu

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Waktu
Kategori Isu Lingkungan			
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi	Penataan permukiman/hunian membutuhkan perawatan jangka panjang, agar dapat berkelanjutan dan tidak kembali menjadi kawasan yang tidak tertata seperti sebelumnya	3
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	Sampah menjadi tantangan yang berkepanjangan jika tidak dilakukan tindakan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu	3
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	Air bersih sebagai kebutuhan dasar manusia menjadi kebutuhan primer yang tetap selama masih ada penduduk yang menghuni WP Belakang Padang, sehingga membutuhkan pengelolaan jangka panjang	3
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	Penataan Jalan Lingkungan memiliki batasan sesuai dengan masa perencanaan jalan tersebut	2
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Pengelolaan bencana dan penekan risiko kerawanan bencana perlu dilakukan dengan orientasi jangka panjang, terlebih karena frekuensi bencana yang tidak pasti	3
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan	Reklamasi membutuhkan waktu yang panjang dalam eksekusinya dan juga berpotensi memiliki dampak jangka panjang setelah proyek selesai dilakukan	3

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	Laut dan kelimpahan sumberdaya-nya membutuhkan pengelolaan dan kontrol yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk menghindari terjadi eksploitasi SDA	3
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	Peningkatan kualitas jaringan transportasi di daerah dengan karakteristik kepulauan membutuhkan rencana jangka panjang, mempertimbangkan kontur wilayah dan kebutuhan masyarakat sehingga dibutuhkan pengelolaan jangka panjang	2
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	Jaringan telekomunikasi dibangun dengan pertimbangan kontur wilayah dan membutuhkan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu, dan akan membutuhkan pergantian/perawatan unit (ms: BTS) secara berkala	2
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	Semakin berkembangnya WP Belakang Padang, terutama pada sektor industri dan permukiman maka potensi pencemaran air akibat limbah akan semakin besar, sehingga dibutuhkan pengelolaan air limbah yang berkala	2
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir	Isu ini dapat diatasi dengan mempertegas regulasi dan hukuman bagi yang melanggar, yang dilakukan oleh instansi terkait	2
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)	Isu ini dapat diatasi dengan mempertegas regulasi dan hukuman bagi yang melanggar, yang dilakukan oleh instansi terkait	3
Kategori Isu Sosial			
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	Kearifan lokal jika tidak dikelola dari waktu ke waktu akan berpotensi menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya tersebut	3

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	Isu ini dapat diatasi dengan mempertegas regulasi dan hukuman bagi yang melanggar, yang dilakukan oleh instansi terkait	3
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga	Instansi terkait agar dapat melakukan kontrol dan pengelolaan pada sektor-sektor yang terancam kehilangan nilai-nilai nasionalisme di WP Belakang Padang secara berkala	3
Kategori Isu Ekonomi			
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditrubusian budidaya ikan	SDA perikanan berpotensi habis dan punah jika tidak dikelola secara berkala	2
Isu E-2	Pasar tradisional tetap dipertahankan dan penataan Kondisi lingkungan	Pusat kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan membutuhkan pemantauan dari waktu ke waktu oleh instansi terkait	2
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Isu ini dapat diatasi dengan keterbukaan daerah penerima dan kesediaan investor/swasta dalam melakukan kegiatan perekonomian di WP Belakang Padang	2
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	Isu ini butuh pemantauan dan pengelolaan SDM secara berkala	3
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	Isu privatisasi pulau adalah isu yang sifatnya tidak terbuka atau informasi yang tidak dapat diakses oleh banyak orang, sehingga Instansi daerah harus tegas dalam penyelesaiannya	2
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	Isu ini butuh pemantauan dan pengelolaan SDA secara berkala	2

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

Tabel III-7 menunjukkan hasil rekapan pemusatan isu menjadi strategis di WP Belakang Padang.

Kode	Longlist Isu PB	Lintas Wilayah	Lintas Sektor	Lintas Waktu	Total Skor	Kesimpulan (Ya/Tidak)
Kategori Isu Lingkungan						
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi	2	2	3	7	Ya
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	3	3	3	9	Ya
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	3	3	3	9	Ya
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	2	2	2	6	Ya
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	2	3	3	8	Ya
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan	3	3	3	9	Ya
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	3	3	3	9	Ya
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	3	2	2	7	Ya
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	2	2	2	6	Ya
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	3	2	2	7	Ya
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir	3	2	2	7	Ya
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)	1	2	3	6	Ya
Kategori Isu Sosial						

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Kode	Longlist Isu PB	Lintas Wilayah	Lintas Sektor	Lintas Waktu	Total Skor	Kesimpulan (Ya/Tidak)
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	3	2	3	8	Ya
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	3	3	3	9	Ya
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga	3	3	3	9	Ya
Kategori Isu Ekonomi						
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditrubusian budidaya ikan	3	2	2	7	Ya
Isu E-2	Pasar tradisional tetap dipertahankan dan penataan Kondisi lingkungan	1	1	2	4	Tidak
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	3	2	2	7	Ya
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	3	3	3	9	Ya
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	2	3	2	7	Ya
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	3	3	2	8	Ya

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

3.3.4 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis
Hasil pemusatan isu menghasilkan 20 isu strategis di WP Belakang Padang, yang terdiri dari 12 isu lingkungan, 3 isu sosial, dan 5 isu ekonomi.

Tabel III-8 Hasil Pemusatan Isu Pembangunan Berkelanjutan WP Belakang Padang

No Isu	Hasil Pemusatan Isu Pembangunan Berkelanjutan
Isu Lingkungan	
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)
Isu Sosial	
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga
Isu Ekonomi	
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditribusian budidaya ikan
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

Proses selanjutnya dalam penyelenggaraan KLHS RDTR WP Belakang Padang adalah mengacu pada Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang unsur-unsur dalam menentukan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Karakteristik wilayah yang didasarkan pada kondisi ekosistem tertentu atau merujuk pada kondisi dengan kualitas lingkungan tertentu. Selain itu juga ditambahkan dengan merujuk pada wilayah administrasi dan geografis.

Tabel III-9 Penilaian Isu PB berdasarkan Karakteristik Wilayah

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Karakteristik Wilayah
Kategori Isu Lingkungan			
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi	Dari citra satelit Google Earth terlihat pola permukiman nelayan yang tidak tertata rapi, misalnya pada kawasan perairan padat penduduk di Pulau Kasu	3
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	TPA Belakang Padang bersistem open dumping dan cenderung mengalami degradasi fungsi dari tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan lahan pembuangan sampah bagi penduduk WP Belakang Padang	3
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	Kondisi kepulauan di WP Belakang Padang sangat relevan dengan keterbatasan pada isu ini, namun data lebih pasti perlu dikonfirmasi pada instansi setempat	3
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	Isu ini perlu dikonfirmasi ke Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan	1
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Bencana pesisir sangat relevan dengan kondisi geografis WP Belakang Padang yang didominasi oleh kepulauan	3
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan	terdapat beberapa lokasi diperaian utara Batam yang dijadikan kawasan pengembangan perairan melalui kegiatan reklamasi, namun perlu dikonfirmasi lokasi spesifiknya	3

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Karakteristik Wilayah
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	Isu ini berkaitan dengan pengelolaan SDA Perikanan dan Kelautan, serta pengelolaan kawasan pesisir oleh masyarakat. Banyaknya ruang pesisir yang dijadikan kawasan permukiman menjadi salah satu bagian dalam isu ini	3
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	Angkutan yang digunakan untuk penyeberangan orang dan barang menuju pulau-pulau di WP Belakang Padang adalah angkutan kayu dengan mesin atau dengan dayungan manual untuk jarak pendek antar pulau	3
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	Jaringan komunikasi di daerah ini sulit untuk dikembangkan karena karakteristik wilayah yang cukup banyak, sehingga cakupan BTS sulit dilakukan	2
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	Air limbah dari aktivitas kilang minyak dan gas, serta aktivitas manusia, namun perlu dikonfirmasi titik ditemukannya perairan yang tercemar limbah	3
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir	Perencanaan pengembangan hutan mangrove di Pulau Penawar Rindu WP Belakang Padang seluas 110,5 ha yang patut diperhatikan (Melisa, 2014)	3
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)	Perlu konfirmasi lebih lanjut terkait lokasi ditemukannya SD hayati ini di WP Belakang Padang, namun terdapat Pulau Lumba, yang jika ditinjau dr toponiminya berkemungkinan ditemukan lumba-lumba disekitarnya	2
Kategori Isu Sosial			
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	Terdapat nilai kebudayaan dan sejarah yang tinggi di WP Belakang Padang, khususnya di Pulau Tolop	3

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Karakteristik Wilayah
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	Dibutuhkan data lebih lanjut dari Imigrasi setempat tentang isu ini	3
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga	Kawasan perbatasan cenderung rawan terhadap isu ini, namun diperlukan data dan informasi mendalam terkait isu ini	3
Kategori Isu Ekonomi			
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditrubusian budidaya ikan	Terbatasnya Tempat Penjualan Ikan di WP Belakang Padang	2
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Terbatasnya jumlah koperasi dan bank di WP Belakang Padang	2
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	Isu ini berhubungan dengan masih terdapat sejumlah lebih dari 1700 penduduk dengan tingkat pendidikan tidak lulus Sekolah Dasar, hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan akses pekerjaan	2
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	Melihat banyaknya pulau-pulau yang tidak berpenghuni di WP Belakang Padang, tidak menutup kemungkinan isu ini terjadi. Namun perlu konfirmasi lebih lanjut	3

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Karakteristik Wilayah
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	Luasnya kawasan perairan laut WP Belakang Padang membuka kesempatan bagi nelayan ilegal untuk masuk, misalnya fenomena nelayan selam di Pulau Cukus Sarang (Mongobay.co.id)	3

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

- b. Tingkat pentingnya potensi dampak dengan mengidentifikasi dampaknya terhadap besarnya jumlah penduduk, luas penyebaran, intensitas, banyaknya komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dan sifat kumulatif dampak.

Tabel III-10 Penilaian Isu PB berdasarkan Tingkat Potensi Dampak

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Tingkat Potensi Dampak
Kategori Isu Lingkungan			
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi	Isu ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan misalnya pencemaran perairan, penyakit akibat bakteri dan kuman, dan penurunan fungsi dan daya dukung lingkungan pesisir	2
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	Isu ini berpotensi menimbulkan dampak dan degradasi kualitas lingkungan	3
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	Isu ini berpotensi menimbulkan keterbatasan Kuantitas dan kualitas air bersih serta akses untuk mendapatkan kebutuhan dasar penduduk di WP Belakang Padang	3
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	Isu ini berpotensi berdampak pada keterbatasan akses transportasi darat di WP Belakang Padang	1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Tingkat Potensi Dampak
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Isu ini akan memberikan kerusakan dan kerugian lingkungan pesisir dan ekonomi yang cukup besar dalam jangka panjang jika tidak ditangani	3
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan	Isu ini akan memberikan kerusakan dan kerugian lingkungan pesisir dan ekonomi yang cukup besar dalam jangka panjang jika tidak ditangani	3
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	Isu ini berpotensi menimbulkan konflik sosial akibat permasalahan lingkungan atas pengelolaan lahan pesisir dan perairan laut	3
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	Isu ini berpotensi menimbulkan keterbatasan akses masuk dan keluar WP Belakang Padang, dan potensi kecelakaan lalu lintas laut	2
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	Isu ini berpotensi menimbulkan keterbatasan akses informasi dan kemajuan digital bagi generasi muda di WP Belakang Padang, dan membatasi pengembangan era 4.0 dan 5.0	3
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	Isu ini berpotensi memicu timbulnya degradasi lingkungan dan penurunan mutu dan kualitas air akibat pembuangan limbah cair	3
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir	Lahan mangrove dan fungsi ekologisnya terancam akan hilang jika isu ini tidak ditangani	3
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)	Mempertahankan keanekaragaman hayati menjadi penting, dan akan terganggu jika isu ini tidak ditangani	2
Kategori Isu Sosial			
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	Dampak yang ditimbulkan berskala Kota Batam bahkan Nasional, yaitu kehilangan ciri khas budaya daerah	2
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi	Dampak yang ditimbulkan akan memberikan pengaruh pada penurunan kualitas SDM	3

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Tingkat Potensi Dampak
	ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	Indonesia dan permasalahan antara negara tetangga dan Indonesia, berpengaruh pada sektor ekonomi, sosial dan sektor penting lainnya	
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga	Dampak yang ditimbulkan akan memberikan pengaruh pada penurunan kualitas SDM Indonesia dan permasalahan antara negara tetangga dan Indonesia, berpengaruh pada sektor ekonomi, sosial dan sektor penting lainnya	3
Kategori Isu Ekonomi			
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditrubusian budidaya ikan	Isu ini memberikan dampak yang sedang bagi lingkungan	2
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Isu ini tidak memberikan dampak lingkungan yang signifikan	1
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	Isu ini akan berdampak pada tingginya angka pelaku pengrusakan lingkungan, karena kecenderungan sikap yang eksploitatif pada alam bagi para pencari kerja/penduduk tidak bekerja	2
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	Privatisasi pulau akan memberikan kemungkinan hilangnya hak NKRI dalam mengelola lingkungan darat dan laut sekitar pulau yang berkaitan	3
Isu E-6	Nelayan ilegal diperaian belakang padang	Isu ini memberikan dampak yang sedang bagi lingkungan, seperti potensi hilangnya keanekaragaman hayati akibat aktivitas nelayan ilegal	3

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

- c. Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat antar isu pembangunan berkelanjutan lainnya.
- d. Keterkaitan dengan materi muatan KRP

Keterkaitan KRP berarti menilai isu strategis yang dapat dimuat dalam KRP baik dari pola ruang, struktur ruang, peraturan zonasi, maupun indikasi program. Isu strategis yang dapat tertuang dalam empat unsur KRP tersebut memiliki skor 3. Isu strategis yang dapat tertuang dalam indikasi program memiliki skor 2. Isu strategis yang tidak memiliki keterkaitan dengan KRP memiliki skor 1. Keterangan keterkaitan KRP dapat dilihat pada tabel III-11.

Tabel III-11 Penilaian Isu PB berdasarkan Tingkat Keterkaitan KRP

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Tingkat Keterkaitan KRP
Kategori Isu Lingkungan			
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi	Penanganannya dapat dituangkan dalam indikasi program	3
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	Penanganannya dapat dituangkan di dalam struktur ruang pada Rencana Jaringan Persampahan	3
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	Penanganannya dapat dituangkan di dalam struktur ruang pada Sistem Jaringan Sumber Daya Air	3
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	Penanganannya dapat dituangkan di dalam struktur ruang pada Sistem Jaringan Transportasi Jalan Lingkungan	2
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Isu kebencanaan dapat digambarkan dalam struktur ruang SDA, drainase, dan jaringan prasarana lainnya; dapat digambarkan dalam pola ruang tempat evakuasi bencana; dapat diatur dalam peraturan zonasi melalui aturan dasar maupun ketentuan khusus KRB, TEB; dapat dituangkan dalam indikasi program	3

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Tingkat Keterkaitan KRP
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan	Dapat digambarkan dalam pola ruang dan peraturan zonasinya	3
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	Dapat digambarkan dalam pola ruang dan peraturan zonasinya	3
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	Penanganannya dapat dituangkan di dalam struktur ruang pada Sistem Jaringan Transportasi Laut	3
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	Dapat digambarkan didalam struktur ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi	3
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	Dapat digambarkan dalam struktur ruang pengelolaan limbah; dapat digambarkan dalam pola ruang IPAL, dapat dituangkan dalam indikasi program	3
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir	Dapat digambarkan dalam pola ruang dan peraturan zonasinya	3
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)	Dapat digambarkan didalam Rencana Pola Ruang untuk Kawasan Lindung; Zona Lindung; Zona Konservasi; Suaka Margasatwa Laut	3
Kategori Isu Sosial			
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	Dapat digambarkan didalam Pola Ruang Zona Cagar Budaya; Zona Pariwisata	3
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	Dapat digambarkan didalam struktur ruang, peraturan zonasi dan indikasi program	3

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Tingkat Keterkaitan KRP
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga	Dapat digambarkan didalam struktur ruang, peraturan zonasi dan indikasi program	3
Kategori Isu Ekonomi			
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi pendistribusian budidaya ikan	Dapat dituangkan dalam struktur ruang pada sistem pusat pelayanan	3
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Dapat dituangkan dalam struktur ruang pada sistem pusat pelayanan	2
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	Tidak berkaitan dengan KRP	1
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	Dapat dituangkan dalam peraturan zonasi zona pariwisata	1
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	Tidak berkaitan dengan KRP	1

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

e. Keterkaitan RPPLH

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun guna memberikan arahan melestarikan jasa LH dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kota Batam sendiri belum memiliki

dokumen RPPLH sehingga tidak dapat dilakukan pembobotan untuk keterkaitan RPPLH dengan isu strategis.

f. Keterkaitan dengan KLHS di atasnya

Keterkaitan dengan KLHS di atasnya berarti mengintegrasikan isu strategis pembangunan berkelanjutan dengan KLHS RTRW Kota Batam. KLHS RTRW Kota Batam telah disusun pada tahun 2019. Justifikasi untuk muatan ini yaitu bobot 3 jika tercantum dalam isu prioritas pada KLHS RTRW. Bobot 2 jika tercantum dalam isu startegis KLHS RTRW. Bobot 1 jika terdapat dalam longlist isu KLHS RTRW. Bobot 0 jika tidak terdapat dalam isu PB pada KLHS RTRW. Keterangan keterkaitan dengan KLHS di atasnya dapat dilihat pada tabel III-12.

Tabel III-12 Penilaian Isu PB berdasarkan Keterkaitan dengan KRP di atasnya

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Tingkat Keterkaitan KRP (KLHS di atasnya)
Kategori Isu Lingkungan			
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Pemukiman kumuh	3
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Penataan pengelolaan limbah dan sampah	3
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Minimnya upaya konservasi air	3
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Pengembangan infrastruktur jalan, terminal, pelabuhan, dan lapangan udara berskala internasional	3
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: rawan bencana	3
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Reklamasi	3

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	Tidak terdapat didalam KLHS RTRW	1
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: peningkatan aksesibilitas	3
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	Tidak terdapat didalam KLHS RTRW	1
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: pengelolaan air limbah belum optimal	2
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: alih fungsi lahan	3
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)	Tidak terdapat didalam KLHS RTRW	1
Kategori Isu Sosial			
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: alih fungsi lahan	3
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Peningkatan kualitas produk kepariwisataan	3
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhan negara tetangga	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Pulau Terdepan	3
Kategori Isu Ekonomi			
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi pendistribusian budidaya ikan	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Industri maritim	3

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Kemitraan usaha, lembaga ekonomi non bank	3
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Lapangan Kerja dan Pengangguran	3
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	Tidak terdapat didalam KLHS RTRW	1
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	Tidak terdapat didalam KLHS RTRW	1

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

Tabel III-13 Rekapitulasi Penilaian Kriteria Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis WP Belakang Padang

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Unsur Penapisan Isu PB Paling Strategis (Pasal 9(1), PP 46/2016)						Hasil (Ya/Tidak)
		Karakteristik Wilayah	Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Muatan KRP	KRP di atasnya	Total Skor	
Isu L-1	Permukiman nelayan di wilayah pesisir yang tidak tertata	3	2	2	3	3	13	Ya
Isu L-2	Ancaman kerusakan lingkungan dan permasalahan lingkungan akibat minimnya pengelolaan sampah darat dan sampah laut	3	3	3	3	3	15	Ya
Isu L-3	Keterbatasan akses terhadap air bersih dan inovasi pemanenan air hujan	3	3	3	3	3	15	Ya
Isu L-4	Buruknya infrastruktur jalan di beberapa lokasi di Belakang Padang, misalnya di sepanjang Polesek - Kampung Baru	1	1	2	2	3	9	Tidak
Isu L-5	Peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	3	3	3	3	3	15	Ya
Isu L-6	Perlunya pembangunan proyek reklamasi pesisir yang berlandaskan keberlanjutan	3	3	3	3	3	15	Ya

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Unsur Penapisan Isu PB Paling Strategis (Pasal 9(1), PP 46/2016)						Hasil (Ya/Tidak)
		Karakteristik Wilayah	Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Muatan KRP	KRP di atasnya	Total Skor	
Isu L-7	Perlunya pengaturan pemanfaatan ruang pesisir dan laut oleh masyarakat/konflik kepentingan pemanfaatan ruang pesisir dan laut	3	3	3	3	1	13	Ya
Isu L-8	Keterbatasan sarana transportasi antar pulau	3	2	3	3	3	14	Ya
Isu L-9	Keterbatasan akses terhadap jaringan telekomunikasi, misalnya di Pulau Lenggang, Kelurahan Sekanak Raya	2	3	2	3	1	11	Ya
Isu L-10	Permasalahan pengelolaan air limbah (domestik dan komersil)	3	3	3	3	2	14	Ya
Isu L-11	Berkurangnya fungsi lahan bakau karena fenomena konversi lahan bakau di wilayah pesisir	3	3	3	3	3	15	Ya
Isu L-12	Perlunya pengaturan pada keberadaan keanekaragaman hayati yang dilindungi, misalnya dugong dan lumba-lumba.	2	2	3	3	1	11	Ya
Isu S-1	Perlunya mempertahankan kearifan lokal dalam hal pengembangan pariwisata (wisata sejarah dan wisata religi)	3	2	2	3	3	13	Ya

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Unsur Penapisan Isu PB Paling Strategis (Pasal 9(1), PP 46/2016)						Hasil (Ya/Tidak)
		Karakteristik Wilayah	Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Muatan KRP	KRP di atasnya	Total Skor	
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	3	3	3	3	3	15	Ya
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga	3	3	3	3	3	15	Ya
Isu E-1	Perlunya pengaturan dalam distribusi hasil tangkap dan budidaya perikanan di Belakang Padang	2	2	3	3	3	13	Ya
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	2	1	1	2	3	9	Tidak
Isu E-4	Keterbatasan kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja	2	2	2	1	3	10	Ya

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022–2042

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Unsur Penapisan Isu PB Paling Strategis (Pasal 9(1), PP 46/2016)						Hasil (Ya/Tidak)
		Karakteristik Wilayah	Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Muatan KRP	KRP di atasnya	Total Skor	
Isu E-5	Privatisasi pulau-pulau di Belakang Padang untuk kepentingan pariwisata terbatas	3	3	3	1	3	13	Ya
Isu E-6	Aktivitas nelayan ilegal di perairan Belakang Padang	3	3	3	1	3	13	Ya

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

3.3.5 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Hasil penjaringan isu strategis menghasilkan 18 isu paling strategis di WP Belakang Padang, yaitu 11 isu lingkungan, 3 isu sosial, dan 4 isu ekonomi. Tabel III-14 menunjukkan isu paling strategis di WP Belakang Padang. Selanjutnya dilakukan penilaian isu prioritas dengan menghubungkan isu paling strategis dengan 10 muatan lingkungan.

Tabel III-14 Hasil penjaringan isu paling strategis WP Belakang Padang

No Isu	Hasil Penjaringan Isu paling strategis
Isu Lingkungan	
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)
Isu Sosial	
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/human trafficking, narkoba dan pencurian SDA
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga
Isu Ekonomi	
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi pendistribusian budidaya ikan
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

Identifikasi isu PB prioritas dilakukan dengan sistem skoring pada setiap muatan lingkungan pada rentang 1 sampai 5, dimana 1 berarti tidak ada kaitan dan 5 berarti isu tersebut sangat penting bagi lingkungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 PP No. 46/2016 unsur-unsur dalam menentukan isu pembangunan berkelanjutan prioritas paling sedikit menggunakan 10 muatan lingkungan hidup, yaitu:

- A. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan; (Kapasitas D3TLH)
- B. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup; (Dampak LH)
- C. Kinerja layanan atau jasa ekosistem; (Kinerja JE)
- D. Intensitas dan cakupan wilayah bencana (Intensitas Bencana)
- E. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam; (Status SDA)
- F. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; (Keanekaragaman hayati)
- G. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; (Adaptasi PI)
- H. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat; (Kemiskinan)
- I. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; (Kesehatan)
- J. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat. (Hukum tradisional)

Tabel berikut ini merupakan bagian analisis dari keterkaitan isu pembangunan berkelanjutan terhadap muatan di atas. Dalam kegiatan KLHS RDTR WP Belakang Padang, Metode kuantitatif dilakukan dengan metode skoring yang menunjukkan derajat penting tidaknya pengaruh isu pembangunan berkelanjutan strategis terhadap masing-masing muatan. Keterangan skor tersebut adalah: Sangat Penting=5; Penting=4; Cukup Penting=3; Tidak Penting=2; Sangat Tidak Penting=1. Tabel III-15 menunjukkan proses skoring dan hasil akhir isu PB Prioritas WP Belakang Padang.

Tabel III-15 Penjaringan Isu PB Prioritas di WP Belakang Padang

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Kapasitas DDTLH	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Bencana	Mutu SDA	Biodiversitas	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Masyarakat	Hukum Tradisional	Total Skor
Isu Lingkungan												
Isu L-1	Permukiman nelayan di wilayah pesisir yang tidak tertata	5	3	1	3	3	1	5	5	5	1	32
		Penataan permukiman dapat meningkatkan daya dukung lingkungan hidup	berdampak pada munculnya sanitasi yang buruk	Tidak ada kaitan	Keterkaitan rendah	Keterkaitan rendah	Tidak ada kaitan	Meningkatkan keterpaparan dan sensitivitas terhadap perubahan iklim	Berkaitan erat dengan kemiskinan	berkaitan dengan kualitas kesehatan masyarakat		
Isu L-2	Ancaman kerusakan lingkungan dan permasalahan lingkungan akibat minimnya pengelolaan sampah darat dan sampah laut	3	5	5	2	5	4	2	2	5	4	37
		Pengelolaan sampah darat dan laut cukup berpengaruh pada Daya Dukung dan Daya Tampung LH	Minimnya pengelolaan sampah menimbulkan dampak destruktif bagi LH	Sampah sangat berpengaruh pada eksistensi JE secara langsung dan tidak langsung	Sampah tidak terlalu mempengaruhi kejadian bencana	Sampah darat dan laut sangat berpengaruh pada mutu SDA	Keberadaan sampah dapat menurunkan potensi biodiversitas	Sampah sedikit berpengaruh terhadap perubahan iklim	Sampah berasosiasi dengan rendahnya pendapatan keluarga/kemiskinan	Sampah berdampak pada kesehatan SDM	Masyarakat Tradisional lebih paham mengenai pengelolaan sampah	
Isu L-3	Keterbatasan akses terhadap air bersih dan inovasi pemanenan air hujan	5	5	5	5	2	1	4	5	5	2	39
		Sumber air bersih dan akses terhadapnya sangat berpengaruh pada DDTLH	Minimnya tersediaan dan akses pada air bersih meningkatkan terjadinya dampak LH	Berkaitan dengan jasa ekosistem penyedia air	Berkaitan dengan potensi bencana kekeringan di pulau kecil	Inovasi pemanenan air hujan berkorelasi dengan mutu SDA	Inovasi pemanenan air hujan berkorelasi dengan biodiversitas	Ketersediaan air bersih penting dalam bertahan menekan terjadinya perubahan iklim	Air dan kemiskinan berasosiasi kuat	air dan kesehatan berasosiasi erat	minimnya pengelolaan air berdampak pada konflik sosial di masyarakat	
Isu L-5		5	5	5	5	2	3	5	3	3	1	37

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Kapasitas DDDTLH	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Bencana	Mutu SDA	Biodiversitas	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Masyarakat	Hukum Tradisional	Tota I Skor
	Peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Risiko bencana berdampak langsung terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan (dua arah – saling mempengaruhi)	Risiko bencana berdampak langsung terhadap penurunan lingkungan hidup	Risiko bencana berdampak langsung terhadap penurunan jasa ekosistem	Risiko bencana berdampak langsung terhadap maraknya bencana yang terjadi	Risiko bencana berdampak tidak langsung terhadap penurunan jasa ekosistem	Risiko bencana berdampak tidak langsung terhadap penurunan keragaman flora dan fauna (matinya flora dan fauna)	Risiko bencana berdampak langsung terhadap perubahan iklim (dua arah – saling mempengaruhi)	Risiko bencana berdampak tidak langsung terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat	Risiko bencana berdampak langsung terhadap penurunan jasa ekosistem	Risiko bencana berdampak tidak langsung terhadap pola adaptasi masyarakat tradisional	
		3	4	1	4	2	3	3	1	1	1	23
Isu L-6	Perlunya pembangunan proyek reklamasi pesisir yang berlandaskan keberlanjutan	reklamasi yang tidak sustainable berdampak buruk pada daya dukung lingkungan hidup	Keterkaitan cukup tinggi, reklamasi dapat merugikan lingkungan hidup jika tidak direncanakan dengan baik	Tidak ada kaitan	Reklamasi akan meningkatkan risiko bencana pesisir	Keterkaitan rendah	Reklamasi dapat berpotensi menghilangkan biodiversitas lokal	proyek akan meningkatkan keterpaparan pada dampak perubahan iklim di daerah pesisir	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	
Isu L-7		3	4	1	4	1	3	3	1	1	2	23

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Kapasitas DDDTLH	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Bencana	Mutu SDA	Biodiversitas	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Masyarakat	Hukum Tradisional	Tota I Skor
	Perlunya pengaturan pemanfaatan ruang pesisir dan laut oleh masyarakat/konflik kepentingan pemanfaatan ruang pesisir dan laut	Pemanfaatan ruang yang tidak baik akan mempengaruhi daya dukung lingkungan hidup	Segala kegiatan pemanfaatan ruang pesisir yang tidak baik akan berdampak pada lingkungan	Tidak ada kaitan	Akan meningkatkan potensi bencana dan kerugian pada bencana pesisir	Tidak ada kaitan	berpotensi menyebabkan kehilangan biodiversitas	kawasan pesisir sangat sensitif terhadap isu perubahan iklim	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Keterkaitan rendah	
Isu L-8	Keterbatasan sarana transportasi antar pulau	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	12
		Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	
Isu L-9	Keterbatasan akses terhadap jaringan telekomunikasi, misalnya di Pulau Lengkang, Kelurahan Sekanak Raya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan
Isu L-10	Permasalahan pengelolaan air limbah (domestik dan komersil)	5	5	2	2	2	2	1	2	2	1	24
		Limbah dapat menurunkan daya dukung lingkungan hidup	Limbah berdampak dan berkaitan erat dengan dampak terhadap lingkungan hidup	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	Tidak ada kaitan	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	Tidak ada kaitan	
		4	5	5	5	4	5	5	1	4	1	39

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Kapasitas DDDTLH	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Bencana	Mutu SDA	Biodiversitas	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Masyarakat	Hukum Tradisional	Tota I Skor
Isu L-11	Berkurangnya fungsi lahan bakau karena fenomena konversi lahan bakau di wilayah pesisir	Lahan bakau menjadi pendukung bagi LH	Lahan bakau berhubungan erat dengan dampak LH	Lahan bakau sebagai salah satu JE penyedia	Lahan Bakau bermanfaat dalam mitigasi bencana non struktural	Lahan Bakau sebagai penjaga SDA	lahan bakau sebagai penjaga biodiversitas yang sangat baik	Lahan Bakau bermanfaat dalam mengurangi dampak perubahan iklim	Tidak ada kaitan	Lahan bakau yang buruk berdampak pada kesehatan sekitar masyarakat	Tidak ada kaitan	
		2	2	2	1	1	5	1	1	1	1	17
Isu L-12	Perlunya pengaturan pada keberadaan keanekaragaman hayati yang dilindungi, misalnya dugong dan lumba-lumba.	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	menyebabkan kehilangan biodiversitas	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	
Isu Sosial												
Isu S-1	Perlunya mempertahankan kearifan lokal dalam hal pengembangan pariwisata (wisata sejarah dan wisata religi)	Pengembangan destinasi wisata yang kurang menggunakan kaidah lingkungan berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Keterkaitan sedang	Pengembangan destinasi wisata yang kurang terencana berdampak pada jasa ekosistem lingkungan	Tidak ada kaitan	Pengembangan destinasi wisata yang kurang memperhatikan kaidah lingkungan berdampak pada mutu dan kualitas SDA	Pengembangan destinasi wisata yang kurang memperhatikan kaidah lingkungan berdampak pada penurunan kuantitas dan kualitas keberagaman flora dan fauna	Tidak ada kaitan	Pengembangan destinasi wisata yang kurang memperhatikan kaidah sosial masyarakat berdampak pada ketimpangan perekonomian masyarakat	Tidak ada kaitan	Pengembangan destinasi wisata yang kurang memperhatikan kaidah sosial masyarakat berdampak pada konflik masyarakat tradisional	35
Isu S-2		1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	13

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Kapasitas DDDTLH	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Bencana	Mutu SDA	Biodiversitas	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Masyarakat	Hukum Tradisional	Tota I Skor
	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhn negara tetangga	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	11
		Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	
Isu Ekonomi												
Isu E-1	Perlunya pengaturan dalam distribusi hasil tangkap dan budidaya perikanan di Belakang Padang	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	12
		Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	termasuk dalam sebuah konsep pemanfaatan hasil laut sebagai bagian dari biodiversitas	Tidak ada kaitan	Berkaitan sedang	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	
Isu E-4		1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	14

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Kapasitas DDDTLH	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Bencana	Mutu SDA	Biodiversitas	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Masyarakat	Hukum Tradisional	Tota l Skor
	Keterbatasan kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Pengangguran sangat berkaitan dengan kemiskinan	Penduduk yang tidak bekerja memiliki tendensi kecenderungan kondisi kesehatan yang buruk	Tidak ada kaitan	
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Isu E-5	Privatisasi pulau-pulau di Belakang Padang untuk kepentingan pariwisata terbatas	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Akan menutup kesempatan bagi masyarakat lokal dalam memanfaatkan potensi ekonomi pada pulau-pulau yang berkaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	
Isu E-6		5	4	2	2	5	5	2	3	5	3	36

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Kapasitas DDTLH	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Bencana	Mutu SDA	Biodiversitas	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Masyarakat	Hukum Tradisional	Tota I Skor
	Aktivitas nelayan ilegal di perairan Belakang Padang	Aktivitas nelayan ilegal berpengaruh pada DDTLH	Aktivitas nelayan ilegal cukup berdampak pada LH	Aktivitas nelayan ilegal sedikit berpengaruh pada JE	Aktivitas nelayan ilegal tidak/sedikit berpengaruh pada bencana	Aktivitas nelayan ilegal sangat berpengaruh pada mutusDA	Aktivitas nelayan ilegal sangat berpengaruh pada Biodiversitas marin/bahari yang menuju eksploitasi ilegal	Aktivitas nelayan ilegal sedikit berpengaruh pada sikap dalam menghadapi perubahan iklim	Aktivitas nelayan ilegal berpengaruh pada ekonomi masyarakat lokal	Aktivitas nelayan ilegal berpengaruh pada kesehatan masyarakat (aspek SDM)	Aktivitas nelayan ilegal cukup berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat lokal dan menimbulkan konflik sosial	

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

Hasil penjaringan isu pembangunan berkelanjutan prioritas menghasilkan enam isu prioritas dengan syarat nilai akhir lebih dari 20. Berdasarkan hasil penapisan pada tabel III-8, maka isu pembangunan berkelanjutan prioritas pada Kecamatan Belakang Padang yang telah disesuaikan penamaannya adalah sebagai berikut:

1. Ancaman kerusakan lingkungan akibat minimnya pengelolaan sampah darat dan sampah laut
2. Keterbatasan akses dan inovasi terhadap air bersih
3. Peningkatan risiko bencana pesisir dan pulau kecil
4. Konversi lahan bakau di wilayah pesisir
5. Mempertahankan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata (wisata sejarah dan religi)
6. Ancaman eksploitasi ilegal sumberdaya ikan di wilayah perairan Belakang Padang

Untuk memastikan bahwa hasil penapisan isu di atas telah sesuai dengan kondisi di lapangan, maka kami melakukan uji publik perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas yang nantinya akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

3.4 Penjabaran Kajian Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Prioritas

3.4.1 Ancaman kerusakan lingkungan akibat minimnya pengelolaan sampah darat dan sampah laut

Pengelolaan sampah di Kecamatan Belakang Padang sedikit lebih menantang dibandingkan dengan permasalahan persampahan di pulau utama Pulau Batam. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi pilihan sebagai bagian dalam pengelolaan sampah domestik masyarakat di pulau-pulau di Kecamatan Belakang Padang. TPA yang saat ini masih aktif menampung pasokan sampah dari seluruh wilayah bagian di Kecamatan Belakang Padang adalah TPA Bulan, yang saat ini sangat jelas membutuhkan sebuah aksi peningkatan kualitas dan kuantitas serta sistem pengolahan sampah terpadu. Saat ini, terlihat pada Gambar 3.1 bahwa TPA Belakang Padang memiliki sistem *Open Dumping* dengan luas lahan yang terbatas.



Gambar 3.1 TPA Belakang Padang

(Sumber: Survei Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang 2021)

3.4.2 Keterbatasan akses dan inovasi terhadap air bersih

Sumberdaya air merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin besar kebutuhan atas air bersih. Kecamatan Belakang Padang memiliki karakteristik yang terdiri dari pulau-pulau dan berada pada daerah perbatasan internasional, sehingga tantangan dalam pemenuhan air bersih menjadi lebih dirasakan. Kecamatan Belakang Padang memiliki beberapa waduk dalam memenuhi kebutuhan airnya, diantaranya yaitu Waduk Sekanank I, Waduk Sekanank II, Waduk Pulau Pemping, Waduk Pulau Lumba, dan Waduk Pulau Mecan.

Karakteristik suatu wilayah sangat menentukan potensi dan kerentanan sumberdaya air di wilayah tersebut. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan target SDGs yaitu pemenuhan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat secara adil dan universal, dengan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor untuk meminimalisir fenomena kelangkaan air bersih (target 6.1, 6.4, dan 6.5 pada SDGs). Beberapa faktor yang menyebabkan keterbatasan ketersediaan air di Kecamatan Belakang Padang adalah sempitnya daerah tangkapan air yang menyebabkan debit aliran yang sangat kecil, sehingga potensi air permukaan sangat minim. Selain itu, Pemanfaatan air tanah di Pulau Batam secara keseluruhan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 tentang pelarangan pemanfaatan airtanah dangkal bagi keperluan non perumahan di kawasan permukiman yang telah padat. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pilihan lain dalam pemenuhan kebutuhan air baku bagi penduduk melalui beberapa program pemanenan air hujan pada skala mikro, untuk mencukupi kebutuhan air harian.

3.4.3 Peningkatan risiko bencana pesisir dan pulau kecil

Kejadian bencana di pulau-pulau kecil membutuhkan upaya pengurangan risiko sebagai salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Rencana dan kebijakan pembangunan dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terhadap bencana pesisir dan dampak perubahan iklim. Dalam hal ini termasuk dalam pengelolaan permukiman, peningkatan kapasitas masyarakat agar tangguh terhadap bencana, dan upaya mitigasi baik struktural maupun non struktural di wilayah pesisir Kecamatan Belakang Padang.

Kejadian bencana di Kecamatan Belakang Padang didominasi oleh kejadian bencana puting beliung dari tahun 2015 hingga 2018. Hampir setiap tahunnya kejadian bencana ini berdampak pada korban luka maupun jiwa, ditambah kerugian ekonomi karena kerusakan bangunan/rumah akibat bencana. Tabel

III-16 menunjukkan rekaman kejadian bencana di Kecamatan Belakang Padang dari tahun 2015 hingga 2018 serta jumlah korban yang diakibatkannya.

Tabel III-16 Kejadian Bencana di Kecamatan Belakang Padang 2015-2018

No	Tahun	Jenis Bencana	Lokasi Kejadian	Jumlah Korban			
				KK	JIWA	LK	PR
1	2015	Puting Beliung	RT 002/006, Pulau Sarang Kel. Sekanak Raya, Kec. Blp	1	4	-	-
2	2016	Puting Beliung	RT 01 RW 01, Pulau Pecong, Belakang Padang	1	3	2	1
3	2017	Puting Beliung	Air Lingka, Kasu, Belakang Padang	2	7	4	3
4	2017	Puting Beliung	Sekanak Raya, Belakang Padang	1	6	2	4
5	2017	Puting Beliung	Pulau Terong, Belakang Padang	2	6	3	3
6	2017	Puting Beliung	Pulau Pecong, Pecong, Belakang Padang	7	29	14	15
7	2018	Tanah Longsor	Kampung Bugis Batu Gajah RT 02 RW 01, Sekanak Raya, Belakang Padang	1	3	2	1
8	2018	Puting Beliung	Kampung Jawa RT 02 RW 03, Sekanak Raya, Belakang Padang	1	6	5	1
9	2018	Puting Beliung	RT 04 dan RT 05, RW 01, Pecong, Belakang Padang	30	107	-	-

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

3.4.4 Konversi lahan bakau di wilayah pesisir

Keberadaa ekosistem bakau sangat bermanfaat bagi daerah pesisir untuk melindungi dan menjaga wilayahnya dari berbagai permasalahan lingkungan pesisir. Beberapa lokasi hutan bakau di Kecamatan Belakang Padang adalah di Pulau Terung, Pulau Mecan, Pulau Kapalajernih, dan Pulau Pemping, serta lokasi lainnya yang perlu dilakukan survei lapangan. Aktivitas perkapalan yang tinggi di Selat Singapura menyebabkan dibutuhkan ekosistem bakau yang sehat di wilayah pesisir dan pulau-pulau di Kecamatan Belakang Padang, agar dapat terhindar dari dampak buruk aktivitas tersebut, misalnya gelombang tinggi dan angin, serta bencana pesisir lainnya. Selain itu, terdapatnya stasiun gas dan minyak (BUMN) di pesisir Kecamatan Belakang Padang, yaitu PT TGI di

Pulau Pemping dan PT Pertamina di Pulau Sambu dan aktivitas penambangan pasir di Pulau Kasu, Pulau Terong dan Pulau Pemping (kkp.go.id), yang menyebabkan terjadinya tekanan dan desakan pada eksistensi ekosistem bakau di Pulau Batam secara keseluruhan.

Menurut Gatra.com, hanya tersisa 40 persen dari luasan ekosistem bakau saat ini. Beberapa lokasi hutan bakau yang masih tersisa di Kecamatan Belakang Padang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan melalui aktivitas ekowisata bakau. Kerusakan hutan bakau juga terjadi karena adanya upaya reklamasi pesisir yang melakukan penimbunan pada lahan hutan bakau, untuk dijadikan lahan terbangun lainnya. Disebabkan karena masih terbatasnya akses menuju kawasan hutan bakau di Kecamatan Belakang Padang, maka tidak banyak kegiatan atau rekam jejak pelestarian hutan bakau di Kecamatan Belakang Padang ini. Sehingga, diperlukan analisis lebih lanjut terkait terjadinya alih fungsi lahan hutan bakau di Kecamatan Belakang Padang.

3.4.5 Mempertahankan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata (wisata sejarah dan religi)

Terdapat berbagai tujuan wisata religi dan sejarah di Kecamatan Belakang Padang. Tidak hanya untuk wisatawan lokal, namun situs wisata ini juga ditujukan untuk wisatawan internasional dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Dua makam syekh di Pulau Tulup Kecil dan Pulau Tulup Besar menjadi destinasi religi yang menarik bagi wisatawan. Sekaligus dalam wisata religi ini, wisatawan dapat menikmati pemandangan birunya laut dan pulau-pulau sekitar di Kecamatan Belakang Padang. Hal yang lebih menarik, yaitu bau harum yang keluar dari sekitar Makam Sunan Thulub yang berada di atas bukit. Beberapa wisata sejarah yang terdapat di Kecamatan Belakang Padang yang dijadikan cagar budaya adalah Gedung Nasional yang berfungsi sebagai pusat pertemuan para unsur Muspida se Kecamatan Belakang Padang pada zaman dahulu, Komplek Angkatan Laut Belakang Padang dan Komplek Perumahan Prajurit Angkatan Laut, Kantor Camat Belakang Padang dan

Kantor Imigrasi yang dibangun pada tahun 1950an. Gambar 3.2 menunjukkan makam Syekh Syarif Ainun di Pulau Tulup Kecil, Kecamatan Belakang Padang.



Gambar 3.2 Wisata Sejarah di Pulau Tulup Kecil
(Sumber: Disbudpar.batam.go.id)

3.4.6 Ancaman eksploitasi ilegal sumberdaya ikan di wilayah perairan Belakang Padang

Berada pada kawasan perbatasan antara Indonesia, Singapura dan Malaysia, membuat wilayah perairan Kecamatan Belakang Padang sangat rentan pada terjadinya aktivitas perikanan ilegal dari negara tetangga. Hal ini berimplikasi pada terdapatnya persaingan tidak sehat diantara nelayan lokal dan nelayan dari negara tetangga, yang dapat memicu munculnya konflik antar negara. Terlebih biodiversitas yang tinggi diperairan Kecamatan Belakang Padang menjadi faktor penarik terjadinya eksploitasi sumberdaya marin. Selain eksploitasi ilegal pada sumberdaya ikan, menurut Ramses (2017), ditemukan sebanyak 102 spesies karang keras dan 15 spesies karang lunak di perairan Pulau Sarang, Kecamatan Belakang Padang. Beberapa jenis karang diantaranya *Goniopora stutchbury*, *Goniopora pandoraensis*, (nama dagang: Jawstone coral) *Discosoma spp*, *Ricordia spp*, *Rhodactis spp* (False coral/Disk anemons)

telah mengalami kepunahan local. Sementara *Tubastrea faulkneri* (Sanggara coral) sangat sulit ditemukan dan terancam punah secara local. Pembudidayaan karang oleh masyarakat (bukan korporasi) sangat perlu dikembangkan, agar kegiatan budidaya dan perdagangan karang tidak semata-mata dilakukan dengan pendekatan bisnis, agar kelestarian karang dapat terjaga, serta dapat menjamin pemanfaatan yang ramah lingkungan.

Perdagangan karang hias secara ilegal ini berimplikasi pada penurunan hasil tangkap perikanan, khususnya bagi nelayan lokal yang hanya menggunakan peralatan sederhana berupa bubu sebagai alat pencari ikan. Ketergantungan ikan pada ekosistem terumbu karang juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan sebagai isu strategis prioritas di Kecamatan Belakang Padang.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENYELENGGARAAN KLHS

3.1 Persiapan Penyelenggaraan KLHS

Pokja KLHS RDTR Belakang Padang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.156/HK/IV/2019 tentang Tim dan Sekretariat Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Batam. Pokja KLHS RDTR Belakang Padang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai Walikota. Terdapat tiga koordinator KLHS RDTR Belakang Padang yaitu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Kepala Bappelitbangda Kota Batam dengan sekretaris 1 yaitu Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Sekretaris 2 yaitu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bapelitbang Kota Batam. Adapun anggota Pokja KLHS ini terdiri atas 32 anggota yang masing-masing mewakili unsur OPD di Kota Batam. Lampiran SK Pokja KLHS dan susunan tim Pokja KLHS dapat dilihat pada lampiran.

3.2 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan atau bentuk proses konsultasi publik lainnya. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017, dinyatakan bahwa identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang representatif dapat diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan, untuk membantu pemilihan pemangku kepentingan yang tidak saja berpengaruh, tetapi juga mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap sasaran pokok dan arah kebijakan, serta peduli terhadap potensi permasalahan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh program pembangunan yang bersangkutan. Tujuan identifikasi pemangku kepentingan adalah:

1. Menentukan secara tepat pihak-pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan KLHS
2. Menjamin diterapkannya asas partisipasi yang diamanatkan undang-undang No.32 Tahun 2009
3. Menjamin hasil perencanaan dan evaluasi program memperoleh legitimasi atau penerimaan oleh publik
4. Agar masyarakat dan pemangku kepentingan mendapatkan akses untuk menyampaikan informasi, saran, pendapat, dan pertimbangan tentang pembangunan berkelanjutan melalui proses penyelenggaraan KLHS RDTR Belakang Padang Tahun 2021-2041

Konsep dasar pelibatan peran pemangku kepentingan dalam KLHS RDTR Belakang Padang, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian dengan lingkup, skala, dan relevansi sasaran pokok dan arah kebijakan RDTR Sungai Beduk
2. Penyesuaian dengan pengaruh dan tingkat pentingnya keterlibatan masyarakat bagi peningkatan kinerja sasaran pokok dan arah kebijakan RDTR Sungai Beduk
3. Pemetaan pemangku kepentingan yang relevan terhadap RDTR Belakang Padang

Identifikasi pemangku kepentingan ini diperlukan tidak saja untuk memperoleh data dan informasi pendukung yang penting/signifikan yang harus merupakan realita, tetapi juga dapat berfungsi sebagai verifikator data, informasi ataupun pengetahuan yang dihasilkan dari proses kajian ini. Oleh karena itu identifikasi pemangku kepentingan ini dilakukan ditahap awal proses awal KLHS. Adapun pemangku kepentingan yang terlibat pada KLHS RDTR Belakang Padang:

1. Pembuat keputusan dan/atau penyusun kebijakan, rencana dan/atau program
2. Lembaga/instansi terkait
3. Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian (perorangan/tokoh/ kelompok). Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian (perorangan/tokoh/ kelompok) biasanya terdiri dari

perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya, asosiasi profesi, forum-forum pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup (DAS, air), LSM. Perorangan/tokoh, kelompok yang mempunyai data dan informasi berkaitan dengan SDA, dan pemerhati lingkungan hidup. Adapun masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian (perorangan/tokoh/ kelompok) dalam KLHS RDTR Belakang Padang yaitu:

A. Universitas Batam

Universitas Batam merupakan salah satu universitas yang terletak di Pulau Batam yang memiliki kerjasama dengan Yayasan Ruang Urban Indonesia dalam membantu pemerintah pada kerangka perencanaan, penataan dan pengelolaan wilayah serta perkotaan. UNIBA sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Provinsi Kepri yang memiliki program studi Magister Perencanaan Wilayah dan RUBI adalah sebuah NGO berbasis kompetensi perencanaan, penataan wilayah dan perkotaan yang fokus dan peduli pada perencanaan, penataan dan pengelolaan wilayah dan perkotaan yang memiliki jaringan network yang luas baik nasional maupun internasional maka diharapkan dengan adanya penjanjian kerjasama ini akan terjalin sinergi dan kolaborasi yang tidak hanya memberikan manfaat bagi UNIBA dan RUBI saja namun juga mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

B. Universitas Riau Kepulauan

Universitas Riau Kepulauan terletak di Kota Batam yang didirikan pada tahun 1994 dengan misi upaya mendirikan, membina dan mengelola perguruan tinggi di Pulau Batam. Terdapat beberapa hibah penelitian dosen yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan baik di Kota Batam maupun di Kepulauan Riau, diantaranya:

- Strategi Pemerintah Kota Batam Dalam Implementasi Program Pemberantasan Buta Aksara Di Daerah Hinterland

- Dinamika Logam Berat Cu, Cd Dan Pb Di Perairan Barat
- Pulau Batam
- Pengembangan Sistem Traffic Light Berdasarkan
- Kepadatan Kendaraan Menggunakan PLC
- Studi Kelayakan Dan Desain Pemanfaatan Sumber Energi
- Terbarukan Di Kampung Tua Tanjung Undap, Batam
- Analisa Kadar Cemar Logam Pada Air Minum Dalam
- Kemasan (AMDK) Yang Di Produksi Di Kota Batam
- Strategi Pemerintah Kota Batam Dalam Implementasi Program Pemberantasan Buta Aksara Di Daerah Hinterland
- Bioekologi Dan Genetik Siput Gonggong (*Strombus Turturella*) Di Perairan Batam Dan Bintan Propinsi
- Kepulauan Riau
- Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui
- Rekonstruksi Tata Kelola Zakat
- Evaluasi Kualitas Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Yang
- Diproduksi Di Kota Batam
- Studi Keanekaragaman Jenis Dan Distribusi Kantong Semar (*Nepenthes Spp*) Di Pulau Batam Dan Implementasinya Dalam Pembuatan Buku Saku Keanekaragaman Hayati Indonesia
- Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

C. Ikatan Ahli Perencanaan Kepulauan Riau

IAP adalah organisasi profesi perencanaan wilayah dan kota tertua dan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, didirikan pada tahun 1971 (<https://iapindonesia.org/>). IAP berfungsi sebagai wadah pembinaan profesi, komunikasi, penelitian dan pengembangan, konsultasi dan koordinasi antar ahli perencanaan wilayah dan kota, juga antara ahli perencanaan wilayah dan kota dengan ahli lainnya,

lembaga masyarakat, swasta, pemerintah dan dunia internasional. Selain itu, IAP juga merupakan wadah untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. IAP didirikan dengan tujuan:

- Mengembangkan keahlian perencanaan wilayah dan kota
 - Meningkatkan mutu, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan bagi segenap ahli perencanaan wilayah dan kota
 - di Indonesia
 - Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai mitra pemerintah, swasta, dan lembaga internasional
- IAP banyak berperan dalam mengawal perencanaan dan pembangunan wilayah dan kota di Indonesia, salah satunya adalah dengan merilis Indonesia Most Livable City Index (MLCI) pada tahun 2009, 2011, 2014, dan terakhir 2017 yang menghasilkan indeks kelayakan huni kota-kota di Indonesia berdasarkan persepsi warga kota. Selain itu, dalam perjalanannya juga IAP banyak memberikan advokasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik dalam aspek pengembangan kota, pengembangan wilayah, maupun isu- isu internasional dan global terkait perencanaan wilayah dan kota. Beberapa advokasi IAP kepada pemerintah pusat adalah memberikan masukan tertulis terhadap NSPK yang disusun oleh pemerintah pusat, seperti peroman tata ruang tentang TOD, pedoman penyusunan rencana tata ruang, dll.

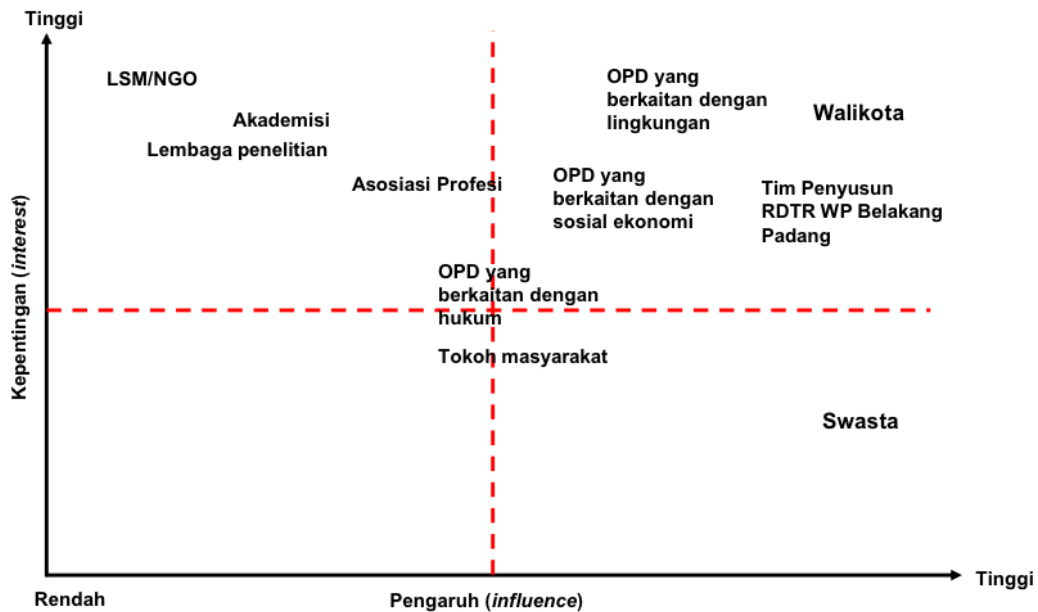
4. Masyarakat yang Terkena Dampak

Masyarakat yang terkena dampak merupakan masyarakat yang berada di wilayah perencanaan yang diwakili oleh camat dan lurah setempat. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota

atas usul sekretariat daerah kabupaten atau kota terhadap Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat. Lurah merupakan pimpinan dari kelurahan. Garis tanggung jawab dari lurah berada tepat di bawah camat. Tugas utama lurah adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun perwakilan dari masyarakat yang terdampak yaitu:

- a. Camat Belakang Padang
- b. Lurah Kasu
- c. Lurah Pulau Terong
- d. Lurah Sekanak Raya
- e. Lurah Pemping
- f. Lurang Tanjung Sari
- g. Lurah Pecong

Dari identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan dokumen ini, dapat dipetakan kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) dari setiap aktor yang disajikan menggunakan metode *interest-influence grid stakeholders*. Dalam metode ini menggunakan dua pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Teoritis, dan (2) Pendekatan Empiris berdasarkan observasi sementara di Kecamatan Belakang Padang. Pemetaan pemangku kepentingan penting dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dan swasta sebagai upaya pengembangan kapasitas (*Capacity Development*). Hasil analisis metode *interest-influence grid stakeholders* disajikan pada Gambar III-1.



Gambar III-1 Analisis interest-influence grid stakeholders dari KLHS RDTR WP Belakang Padang

3.3 Hasil Pelingkupan Isu Pembangunan Berkelanjutan

3.3.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan

Proses identifikasi awal pelingkupan isu pembangunan berkelanjutan strategis dilakukan melalui proses partisipatif yakni dengan penyebaran kuesioner kepada anggota POKJA KLHS RDTR Kecamatan Belakang Padang, tokoh masyarakat, LSM, Pelaku Pembangunan Kelurahan, dan masyarakat dan *Focus Group Discussion* (FGD). Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan FGD, teridentifikasi isu pembangunan berkelanjutan sebanyak 37 isu. Berikut Tabel III-1 menunjukkan hasil lengkap identifikasi awal isu pembangunan berkelanjutan:

Tabel III-1 Daftar Panjang Isu Pembangunan berkelanjutan Kecamatan Belakang Padang

Koding	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Sumber
Isu 1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi (L)	UNIBA
Isu 2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan (L)	UNIBA
Isu 3	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya (S)	UNIBA
Isu 4	Tata kelola dalam lokasi penditrubusian budidaya ikan dll (E)	UNIBA

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Koding	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Sumber
Isu 5	Ketersediaan air bersih masih kurang baik (L)	UNIBA
Isu 6	Pasar tradisional tetap dipertahankan dan penataan Kondisi lingkungan (E)	UNIBA
Isu 7	Wisata Religi tetap dipertahankan dan dikembangkan (S)	UNIBA
Isu 8	Inovasi terhadap ketersediaan Air Baku dari Tadah Hujan (L)	UNIBA
Isu 9	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya (S)	UNIBA
Isu 10	Kriminalitas penjualan Sabu-sabu di Kelurahan Pulau Terong (E)	Tribun.com
Isu 11	Keterbatasan sinyal/jaringan internet di Pulau Lenggang, Kelurahan Sekanak Raya (S)	Merdeka.com
Isu 12	TKI luar negeri ilegal yang mengajukan permohonan pasport di Kantor Imigrasi Belakang Padang (E)	Beritaterkini.com
Isu 13	TPA Sampah di Kecamatan Belakang Padang yang overload (L)	Hasil Survei Tim Penyusun
Isu 14	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat (E)	Antaraneews.com
Isu 15	Buruknya infrastruktur jalan di sepanjang Polsek Belakangpadang – Kampung Baru (S)	Tribunbatam.com
Isu 16	Kriminalitas internasional di Kelurahan Pulau Terung, Belakang Padang (S)	Kumparan.com
Isu 17	Kesulitan dan mahalannya suplai air bersih di Pulau Lenggang (L)	Suara.com
Isu 18	Wisata sejarah di Belakang Padang belum dikembangkan (S)	Hasil Survei Tim Penyusun
Isu 19	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA, misalnya di Kelurahan Pulau Terung (S)	Hasil Survei Tim Penyusun
Isu 20	Ancaman kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas antropogenik, seperti abrasi, intrusi air laut, sampah darat dan laut (L)	Hasil Survei Tim Penyusun
Isu 21	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga (S)	Hasil Survei Tim Penyusun
Isu 22	Abrasi pantai di beberapa pulau (L)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 23	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja (E)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 24	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau (E)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 25	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan (L)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 26	Keterhubungan antar pulau kecil (kebutuhan jaringan jalan penghubung antar pulau kecil) (S)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 27	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat (L)	Dinas CKTR Kota Batam

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Koding	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Sumber
Isu 28	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional (S)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 29	Beberapa ruas jalan di Pulau dalam kondisi buruk, tidak dilengkapi dengan Penerangan Jalan Umum (S)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 30	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah (S)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 31	Kendala sumber air bersih akan mengalami penyusutan ketika musim kemarau memiliki area beresiko permasalahan drainase, belum tersedianya Masterplan Drainase (L)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 32	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah dan persampahan (L)	Dinas CKTR Kota Batam
Isu 33	Membaca situasi lingkungan tentang konflik kepentingan di pesisir (industri, nelayan, industri perairan, habitat bakau) (L)	UNRIKA
Isu 34	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi → dugong, lumba-lumba (L)	UNRIKA
Isu 35	Isu Ekosistem pesisir --> jasa pengaturan tata aliran air dan banjir yang rendah, sementara isu konversi mangrove terjadi (L)	UNRIKA
Isu 36	Ketersediaan air bersih (L)	UPT Air Bersih Belakang Padang
Isu 37	Jaringan sanitasi dan IPAL (L)	UPT Air Bersih Belakang Padang

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

3.3.2 Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu isu lingkungan dengan kode L, isu sosial dengan kode S, dan isu ekonomi dengan kode E. Pengelompokan isu juga dilakukan dengan melebur beberapa isu yang memiliki kemiripan isu menjadi tema isu yang lebih umum. Peleburan isu menghasilkan 12 (dua belas) isu lingkungan, 3 (tiga) isu sosial dan 6 (enam) isu ekonomi. Pengelompokan isu dapat dilihat pada tabel III-2. Tabel III-2 Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan di WP Belakang Padang

Kode	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Informasi	Kata Kunci
Isu Lingkungan			
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi		Penataan permukiman

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Kode	Isu Pembangunan Bekelanjutan	Informasi	Kata Kunci
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	TPA Sampah di Kecamatan Belakang Padang yang overload	infrastruktur wilayah, degradasi lingkungan
		Ancaman kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah laut	
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	Inovasi terhadap ketersediaan Air Baku dari Tadah Hujan	infrastruktur wilayah, ketersediaan air bersih
		Kesulitan dan mahalnya suplai air bersih di Pulau Lengkang	
		Kendala sumber air bersih akan mengalami penyusutan ketika musim kemarau memiliki area beresiko permasalahan drainase, belum tersedianya Masterplan Drainase	
		Ancaman kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas antropogenik, seperti abrasi, intrusi air laut, sampah darat dan laut	
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	Buruknya infrastruktur jalan di sepanjang Polsek Belakangpadang - Kampung Baru	infrastruktur wilayah, jalan
		Beberapa ruas jalan di Pulau dalam kondisi buruk, tidak dilengkapi dengan Penerangan Jalan Umum	
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Abrasi pantai di beberapa pulau	Kerawanan Bencana
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan		Kewilayahan, pengelolaan pesisir
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	Membaca situasi lingkungan tentang konflik kepentingan di pesisir (industri, nelayan, industri perairan, habitat bakau)	Kewilayahan
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	Keterhubungan antar pulau kecil (kebutuhan jaringan jalan penghubung antar pulau kecil)	infrastruktur wilayah, transportasi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

Kode	Isu Pembangunan Bekelanjutan	Informasi	Kata Kunci
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	Keterbatasan sinyal/jaringan internet di Pulau Lengkang, Kelurahan Sekanak Raya	infrastruktur wilayah, telekomunikasi
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	jasa pengaturan tata aliran air	Degradasi lingkungan
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir		Sumberdaya Alam, degradasi lingkungan, konversi lahan
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)		Sumberdaya Alam
Isu Sosial			
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	Wisata Religi tetap dipertahankan dan dikembangkan	Kearifan lokal
		Wisata sejarah di Belakang Padang belum dikembangkan	
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	penjualan Sabu-sabu di Kelurahan Pulau Terong	Perbatasan laut internasional
		TKI luar negeri ilegal yang mengajukan permohonan pasport di Kantor Imigrasi Belakang Padang	
		Kriminalitas internasional di Kelurahan Pulau Terung, Belakang Padang	
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga		
Isu Ekonomi			
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditrubusian budidaya ikan	Keterbatasan nelayan dalam pemasaran hasil perikanan	Peluang Usaha

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Kode	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Informasi	Kata Kunci
Isu E-2	Pasar tradisional tetap dipertahankan dan penataan Kondisi lingkungan	Ancaman pada kehilangan pasar tradisional dan penataan lingkungan pasar eksisting	
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Minimnya sarana prasarana pendukung perekonomian, seperti bank umum daerah dan koperasi.	
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	Keterbatasan kesempatan kerja di Kecamatan Belakang Padang akan menimbulkan terjadinya peningkatan migrasi keluar	
Isu E-5	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	Perusakan dan eksploitasi SDA oleh pelaku internasional	
Isu E-6	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	Pulau-pulau kecil di Kecamatan Belakang Padang diakuisisi oleh pihak swasta, menyebabkan nelayan terbatas dalam mengeksplor potensi wilayah	

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

Setelah melakukan pengelompokan isu strategis, maka teridentifikasi 21 Isu-isu pembangunan strategis merupakan keseluruhan isu pembangunan berkelanjutan hasil dari proses identifikasi isu, yang selanjutnya dikelompokkan menjadi isu pembangunan berkelanjutan dengan pengelompokan berdasarkan kesamaan tema subtansi dan/atau telaah sebab-akibat. Hasil pengelompokan berdasarkan kesamaan tema subtansi dan/atau telaah sebab-akibat ada 21 isu utama tersebut berdasarkan hasil kesamaan tema berdasarkan isu-isu panjang yang terdapat pada pembahasan daftar isu-isu panjang pada tabel III.2 sebelumnya. Berikut ini Tabel III-3 menunjukkan daftar Isu Pembangunan berkelanjutan (Isu PB) berdasarkan kesamaan tema, subtansi dan/atau telaah sebab akibat.

Tabel III-3 Hasil Pengelompokan Isu PB Kecamatan Belakang Padang

No Isu	Isu Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Pengelompokan
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditribusian budidaya ikan
Isu E-2	Pasar tradisional tetap dipertahankan dan penataan Kondisi lingkungan
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

3.3.3 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Setelah melakukan pengelompokan isu pembangunan berkelanjutan, dilakukan analisis tentang keterkaitan lintas isu pembangunan berkelanjutan, dimana diasumsikan semakin banyak terdapat lintas isu, maka semakin penting Isu pembangunan berkelanjutan tersebut. Analisis keterkaitan tersebut diantaranya meliputi empat aspek yaitu, (1) lintas wilayah, (2) lintas pemangku kepentingan, dan (3) lintas waktu. Kita dapat menetapkan tingkat pentingnya keterkaitan isu tersebut misalnya minimal 1 atau 2 lintas isu. Analisis ini dilakukan dengan skoring, dimana 3 = keterkaitan lintas isu tinggi, 2 = keterkaitan lintas isu sedang, 1 = keterkaitan lintas isu rendah, dan 0 = tidak ada lintas isu. Isu yang dipilih merupakan isu yang memiliki nilai >5 karena dinilai memenuhi lebih dari setengah kriteria strategis. Adapun penilaian untuk setiap unsur seperti berikut:

a. Lintas Wilayah

Isu yang bersifat lintas wilayah berarti isu tersebut berdampak pada skala wilayah tertentu. Penilaian isu yang bersifat lintas wilayah terdiri atas tiga kategori. Kategori pertama yaitu isu tersebut hanya berpengaruh secara lokal atau dalam buffer wilayah tersebut. Kategori ini memiliki nilai paling rendah yaitu 1 (satu). Kategori kedua yaitu suatu isu yang memiliki pengaruh terhadap seluruh wilayah perencanaan dan sekitarnya. Kategori ini memiliki nilai 2 (dua). Kategori ketiga yaitu suatu isu yang memiliki pengaruh terhadap wilayah yang lebih luas baik di dalam wilayah perencanaan, sekitar wilayah perencanaan, lingkup kota, lingkup provinsi, maupun lingkup nasional. Kategori ini memiliki nilai 3 (tiga). Justifikasi penilaian setiap isu yang bersifat lintas wilayah dapat dilihat pada Tabel III.4.

Tabel III-4 Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Lintas Wilayah

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Wilayah
Kategori Isu Lingkungan			
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi	Tata kelola hunian di pesisir sebaiknya terintegrasi dengan wilayah sekitarnya (Skala WP)	2
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	Penanganan sampah dilakukan dengan skema hilirisasi yang baik (Skala Kota)	3
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	Sumberdaya air bersih agar dapat dikelola dengan baik, akses dan kualitas diupayakan merata diseluruh WP (Skala WP)	3
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	Jalan lingkungan menjadi akses darat utama yang menghubungkan antar desa di dalam WP (Skala WP)	2
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Harus dilakukan upaya pengurangan risiko bencana yang terintegrasi di WP Belakang Padang, terutama karakteristik WP Belakang Padang yang berupa kepulauan	2

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Wilayah
		menjadi tantangan regional (Skala WP)	
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan	Berkaitan dengan kegiatan yang dapat berdampak destruktif bagi kawasan pesisir setempat (Skala WP)	3
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	Pembagian otoritas yang jelas dan tegas agar setiap masyarakat dapat memanfaatkan ruang laut dengan adil (Skala WP)	3
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	Transportasi laut menjadi penting, terlebih dengan karakteristik kepulauan, masuk/keluar WP Belakang Padang (Skala kota)	3
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	Layanan penyedia jaringan telekomunikasi perlu disediakan dengan baik (Skala WP)	2
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	Diperlukan sistem pembuangan air limbah yang terintegrasi agar tidak berdampak pada lingkungan darat dan laut (Skala Kota)	3
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir	Lahan Mangrove mempunyai kecenderungan mudah tertekan akibat pembangunan wilayah pesisir, dan jika rusak akan berdampak buruk bagi lingkungan pesisir (skala WP)	3
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindung (dugong, lumba-lumba)	Spesies hewan yang ditemukan secara lokal (Skala lokal)	1
Kategori Isu Sosial			
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	Kearifan lokal yang dijadikan faktor penarik wisatawan lokal maupun internasional	3

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Wilayah
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	Berlokasi didaerah perbatasan membutuhkan pengelolaan yang ekstra di WP Belakang Padang, dan berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan skala nasional	3
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga	Berlokasi didaerah perbatasan membutuhkan pengelolaan yang ekstra di WP Belakang Padang, dan berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan skala nasional	3
Kategori Isu Ekonomi			
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditrubusian budidaya ikan	rantai nilai hasil laut dan distribusinya membutuhkan dukungan dari wilayah lain sekitarnya, baik secara lokal maupun internasional	3
Isu E-2	Pasar tradisional tetap dipertahankan dan penataan Kondisi lingkungan	Pusat kegiatan ekonomi yang terbatas di daerah kepulauan menjadi penting untuk dikelola secara lokal (Skala lokal)	1
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Pusat kegiatan ekonomi yang terbatas di daerah kepulauan menjadi penting untuk dikelola secara kompleks karena membutuhkan investor lokal ataupun nasional	3
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	Pengangguran harus dikelola secara menyeluruh dan memanfaatkan potensi lapangan kerja dari kawasan diluar WP Belakang Padang	3

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Wilayah
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	Privatisasi pulau mengganggu aktifitas masyarakat lokal dalam melakukan eksplorasi hasil laut skala lokal	2
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	perairan terbuka dikawasan perbatasan rawan menjadi sasaran kelompok pencurian ikan internasional, membutuhkan dukungan wilayah sekitar WP Belakang Padang untuk tetap memonitoring ini agar tidak menimbulkan kerugian yang besar	3

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

b. Lintas sektor/pemangku kepentingan

Kerja sama lintas sektor melibatkan dinas dan orang-orang di luar sektor tertentu yang merupakan usaha bersama mempengaruhi faktor yang secara langsung atau tidak langsung. Kerjasama dilakukan untuk mendefinisikan masalah, prioritas kebutuhan, pengumpulan, dan interpretasi informasi serta evaluasi. Lintas sektor merupakan hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dari sektor yang berbeda, dibentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil yang tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan atau efisien. Prinsip kerja sama lintas sektor melalui pertalian dengan program di dalam dan di luar sektor untuk mencapai kesadaran yang lebih besar terhadap konsekuensi kesehatan dari keputusan kebijakan dan praktek organisasi sektor-sektor yang berbeda. Penilaian skor untuk lintas sektor/pemangku kepentingan terdiri atas tiga kategori. Kategori pertama yaitu melibatkan 1- 2 sektor yang memiliki pilar yang sama. Skor untuk kategori ini yaitu 1 (satu). Kategori kedua yaitu melibatkan dua sektor atau lebih dari berbeda pilar. Skor untuk kategori ini yaitu 2 (dua). Kategori ketiga yaitu melibatkan lebih dari empat sektor baik dari pilar yang sama maupun pilar berbeda.

Skor untuk kategori ini yaitu 3 (tiga). Adapun penilaian lintas sektor/pemangku kepentingan untuk setiap isu pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel III-5.

Tabel III-5 Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Lintas Sektor

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Sektor
Kategori Isu Lingkungan			
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi	Hunia nelayan melibatkan instansi daerah yaitu Dinas Perkim & Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	2
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	Pengelolaan sampah melibatkan Dinas LH, Dinas Perkim, Dinas CKTR, & Dinkes	3
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam) sebagai instansi penyedia air bersih di Kota Batam, Dinas CKTR, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan untuk mengintegrasikan prasarana air bersih dan permukiman, Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air	3
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	Dinas Perhubungan & Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan	2
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Bencana pesisir ditangani oleh BMKG sebagai penyedia data hidrometeorologi, BP Batam melakukan survei titik banjir, Dinas Pemadam Kebakaran yang menangani kebencanaan dan jalur evakuasi bencana, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang memberikan bantuan cepat tanggap ketika terjadi bencana	3

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Sektor
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan	Kawasan pesisir yang diatur oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, BP Batam sebagai pengelola investasi/sektor swasta, Dinas Lingkungan Hidup mengelola lingkungan pesisir sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta Dinas Pariwisata dan Dinas Perindag dan ESDM	3
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	Kawasan pesisir yang diatur oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, BP Batam sebagai pengelola investasi/sektor swasta, Dinas Lingkungan Hidup mengelola lingkungan pesisir sesuai dengan tugas dan fungsinya	3
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	Dinas Perhubungan Kota Batam mengelola akses terhadap fasilitas transportasi,	2
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	Kominfo Kota Batam mengatur jaringan telekomunikasi publik	2
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam) sebagai pengelola badan air yang berpotensi tercemar air limbah, Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengawas lingkungan perairan	2
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir	BPKH Wilayah XII berwenang dalam pengaturan dan pelepasan wilayah hutan, dinas lingkungan hidup berperan dalam mengontrol alih fungsi kawasan bakau di pesisir	2
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)	Dinas Perikanan mengontrol terjadinya eksploitasi SDA hayati dan Dinas Lingkungan Hidup mengontrol kegiatan yang berpotensi mengganggu eksistensi SDA hayati yang dilindungi tersebut	2
Kategori Isu Sosial			

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Sektor
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkewenangan mengelola kawasan yang dianggap bernilai sejarah dan budaya yang tinggi	2
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berwenang mengelola SDA lokal, rehabilitasi, dan pembinaan masyarakat. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral mengelola keluar/masuknya dan aktivitas perdagangan baik lokal maupun ke daerah perbatasan, bekerja sama dengan Polsek Belakang Padang dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhn negara tetangga	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berwenang mengelola SDA lokal, rehabilitasi, dan pembinaan masyarakat, bekerja sama dengan Polresta Balerang	3
Kategori Isu Ekonomi			
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditribusian budidaya ikan	Dinas Perikanan mengendalikan aktivitas budidaya perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memperhatikan unit usaha nelayan di WP Belakang Padang	2
Isu E-2	Pasar tradisional tetap dipertahankan dan penataan Kondisi lingkungan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Lingkungan Hidup berwenang mengatur kondisi fisik dan kualitas pasar tradisional di WP Belakang Padang	1

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Sektor
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindag, bekerja sama dengan pihak swasta dalam menyediakan akses perbankan pendukung perekonomian masyarakat di WP Belakang Padang	2
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	UPTD Pengawasan Batam Dinas Tenaga Kerja berperan dalam pemantauan kesempatan kerja bagi usia produktif, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berperan dalam menambah modal SDM	3
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkewenangan mengelola kawasan yang dianggap mampu menambah pendapatan daerah namun tetap memperhatikan kaidah lingkungan dan menjunjung tinggi keutuhan NKRI, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berwenang mengatur fungsi ruang di kepulauan WP Belakang Padang	3
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	Dinas Perikanan mengendalikan aktivitas budidaya perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memperhatikan unit usaha nelayan di WP Belakang Padang, bekerja sama dengan Polsek Belakang Padang dan Polresta Balerang	3

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

c. Lintas Waktu

Isu yang bersifat lintas waktu merupakan isu yang dapat terjadi dan diselesaikan dalam rentang waktu tertentu baik dalam skala tahunan maupun periode masa pemerintahan. Penilaian skor untuk lintas waktu terdiri atas tiga kategori. Kategori pertama yaitu isu yang dapat diselesaikan dalam skala tahunan hingga lima tahun pertama perencanaan. Skor untuk kategori ini yaitu 1 (satu). Kategori kedua yaitu isu yang dapat diselesaikan selama rentang waktu perencanaan yaitu 20

tahun. Skor untuk kategori ini yaitu 2 (dua). Kategori ketiga isu yang selalu muncul setiap tahun dan penyelesaiannya dilakukan dari waktu ke waktu. Skor untuk kategori ini yaitu 3 (tiga). Adapun penilaian lintas waktu untuk setiap isu pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel III-6.

Tabel III-6 Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Lintas Waktu

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Lintas Waktu
Kategori Isu Lingkungan			
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi	Penataan permukiman/hunian membutuhkan perawatan jangka panjang, agar dapat berkelanjutan dan tidak kembali menjadi kawasan yang tidak tertata seperti sebelumnya	3
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	Sampah menjadi tantangan yang berkepanjangan jika tidak dilakukan tindakan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu	3
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	Air bersih sebagai kebutuhan dasar manusia menjadi kebutuhan primer yang tetap selama masih ada penduduk yang menghuni WP Belakang Padang, sehingga membutuhkan pengelolaan jangka panjang	3
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	Penataan Jalan Lingkungan memiliki batasan sesuai dengan masa perencanaan jalan tersebut	2
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Pengelolaan bencana dan penekan risiko kerawanan bencana perlu dilakukan dengan orientasi jangka panjang, terlebih karena frekuensi bencana yang tidak pasti	3
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan	Reklamasi membutuhkan waktu yang panjang dalam eksekusinya dan juga berpotensi memiliki dampak jangka panjang setelah proyek selesai dilakukan	3

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	Laut dan kelimpahan sumberdaya-nya membutuhkan pengelolaan dan kontrol yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk menghindari terjadi eksploitasi SDA	3
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	Peningkatan kualitas jaringan transportasi di daerah dengan karakteristik kepulauan membutuhkan rencana jangka panjang, mempertimbangkan kontur wilayah dan kebutuhan masyarakat sehingga dibutuhkan pengelolaan jangka panjang	2
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	Jaringan telekomunikasi dibangun dengan pertimbangan kontur wilayah dan membutuhkan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu, dan akan membutuhkan pergantian/perawatan unit (ms: BTS) secara berkala	2
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	Semakin berkembangnya WP Belakang Padang, terutama pada sektor industri dan permukiman maka potensi pencemaran air akibat limbah akan semakin besar, sehingga dibutuhkan pengelolaan air limbah yang berkala	2
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir	Isu ini dapat diatasi dengan mempertegas regulasi dan hukuman bagi yang melanggar, yang dilakukan oleh instansi terkait	2
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)	Isu ini dapat diatasi dengan mempertegas regulasi dan hukuman bagi yang melanggar, yang dilakukan oleh instansi terkait	3
Kategori Isu Sosial			
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	Kearifan lokal jika tidak dikelola dari waktu ke waktu akan berpotensi menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya tersebut	3

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	Isu ini dapat diatasi dengan mempertegas regulasi dan hukuman bagi yang melanggar, yang dilakukan oleh instansi terkait	3
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga	Instansi terkait agar dapat melakukan kontrol dan pengelolaan pada sektor-sektor yang terancam kehilangan nilai-nilai nasionalisme di WP Belakang Padang secara berkala	3
Kategori Isu Ekonomi			
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditrubusian budidaya ikan	SDA perikanan berpotensi habis dan punah jika tidak dikelola secara berkala	2
Isu E-2	Pasar tradisional tetap dipertahankan dan penataan Kondisi lingkungan	Pusat kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan membutuhkan pemantauan dari waktu ke waktu oleh instansi terkait	2
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Isu ini dapat diatasi dengan keterbukaan daerah penerima dan kesediaan investor/swasta dalam melakukan kegiatan perekonomian di WP Belakang Padang	2
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	Isu ini butuh pemantauan dan pengelolaan SDM secara berkala	3
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	Isu privatisasi pulau adalah isu yang sifatnya tidak terbuka atau informasi yang tidak dapat diakses oleh banyak orang, sehingga Instansi daerah harus tegas dalam penyelesaiannya	2
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	Isu ini butuh pemantauan dan pengelolaan SDA secara berkala	2

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

Tabel III-7 menunjukkan hasil rekapan pemusatan isu menjadi strategis di WP Belakang Padang.

Kode	Longlist Isu PB	Lintas Wilayah	Lintas Sektor	Lintas Waktu	Total Skor	Kesimpulan (Ya/Tidak)
Kategori Isu Lingkungan						
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi	2	2	3	7	Ya
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	3	3	3	9	Ya
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	3	3	3	9	Ya
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	2	2	2	6	Ya
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	2	3	3	8	Ya
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan	3	3	3	9	Ya
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	3	3	3	9	Ya
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	3	2	2	7	Ya
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	2	2	2	6	Ya
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	3	2	2	7	Ya
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir	3	2	2	7	Ya
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)	1	2	3	6	Ya
Kategori Isu Sosial						

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

Kode	Longlist Isu PB	Lintas Wilayah	Lintas Sektor	Lintas Waktu	Total Skor	Kesimpulan (Ya/Tidak)
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	3	2	3	8	Ya
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	3	3	3	9	Ya
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhn negara tetangga	3	3	3	9	Ya
Kategori Isu Ekonomi						
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditrubusian budidaya ikan	3	2	2	7	Ya
Isu E-2	Pasar tradisional tetap dipertahankan dan penataan Kondisi lingkungan	1	1	2	4	Tidak
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	3	2	2	7	Ya
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	3	3	3	9	Ya
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	2	3	2	7	Ya
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	3	3	2	8	Ya

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

3.3.4 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis

Hasil pemusatan isu menghasilkan 20 isu strategis di WP Belakang Padang, yang terdiri dari 12 isu lingkungan, 3 isu sosial, dan 5 isu ekonomi.

Tabel III-8 Hasil Pemusatan Isu Pembangunan Berkelanjutan WP Belakang Padang

No Isu	Hasil Pemusatan Isu Pembangunan Berkelanjutan
Isu Lingkungan	
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)
Isu Sosial	
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga
Isu Ekonomi	
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditribusian budidaya ikan
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

Proses selanjutnya dalam penyelenggaraan KLHS RDTR WP Belakang Padang adalah mengacu pada Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang unsur-unsur dalam menentukan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Karakteristik wilayah yang didasarkan pada kondisi ekosistem tertentu atau merujuk pada kondisi dengan kualitas lingkungan tertentu. Selain itu juga ditambahkan dengan merujuk pada wilayah administrasi dan geografis.

Tabel III-9 Penilaian Isu PB berdasarkan Karakteristik Wilayah

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Karakteristik Wilayah
Kategori Isu Lingkungan			
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi	Dari citra satelit Google Earth terlihat pola permukiman nelayan yang tidak tertata rapi, misalnya pada kawasan perairan padat penduduk di Pulau Kasu	3
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	TPA Belakang Padang bersistem open dumping dan cenderung mengalami degradasi fungsi dari tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan lahan pembuangan sampah bagi penduduk WP Belakang Padang	3
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	Kondisi kepulauan di WP Belakang Padang sangat relevan dengan keterbatasan pada isu ini, namun data lebih pasti perlu dikonfirmasi pada instansi setempat	3
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	Isu ini perlu dikonfirmasi ke Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan	1
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Bencana pesisir sangat relevan dengan kondisi geografis WP Belakang Padang yang didominasi oleh kepulauan	3
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan	terdapat beberapa lokasi diperaian utara Batam yang dijadikan kawasan pengembangan perairan melalui kegiatan reklamasi, namun perlu dikonfirmasi lokasi spesifiknya	3

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Karakteristik Wilayah
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	Isu ini berkaitan dengan pengelolaan SDA Perikanan dan Kelautan, serta pengelolaan kawasan pesisir oleh masyarakat. Banyaknya ruang pesisir yang dijadikan kawasan permukiman menjadi salah satu bagian dalam isu ini	3
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	Angkutan yang digunakan untuk penyeberangan orang dan barang menuju pulau-pulau di WP Belakang Padang adalah angkutan kayu dengan mesin atau dengan dayungan manual untuk jarak pendek antar pulau	3
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	Jaringan komunikasi di daerah ini sulit untuk dikembangkan karena karakteristik wilayah yang cukup banyak, sehingga cakupan BTS sulit dilakukan	2
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	Air limbah dari aktivitas kilang minyak dan gas, serta aktivitas manusia, namun perlu dikonfirmasi titik ditemukannya perairan yang tercemar limbah	3
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir	Perencanaan pengembangan hutan mangrove di Pulau Penawar Rindu WP Belakang Padang seluas 110,5 ha yang patut diperhatikan (Melisa, 2014)	3
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)	Perlu konfirmasi lebih lanjut terkait lokasi ditemukannya SD hayati ini di WP Belakang Padang, namun terdapat Pulau Lumba, yang jika ditinjau dr toponiminya berkemungkinan ditemukan lumba-lumba disekitarnya	2
Kategori Isu Sosial			
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	Terdapat nilai kebudayaan dan sejarah yang tinggi di WP Belakang Padang, khususnya di Pulau Tolop	3

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Karakteristik Wilayah
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	Dibutuhkan data lebih lanjut dari Imigrasi setempat tentang isu ini	3
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga	Kawasan perbatasan cenderung rawan terhadap isu ini, namun diperlukan data dan informasi mendalam terkait isu ini	3
Kategori Isu Ekonomi			
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditrubusian budidaya ikan	Terbatasnya Tempat Penjualan Ikan di WP Belakang Padang	2
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Terbatasnya jumlah koperasi dan bank di WP Belakang Padang	2
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	Isu ini berhubungan dengan masih terdapat sejumlah lebih dari 1700 penduduk dengan tingkat pendidikan tidak lulus Sekolah Dasar, hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan akses pekerjaan	2
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	Melihat banyaknya pulau-pulau yang tidak berpenghuni di WP Belakang Padang, tidak menutup kemungkinan isu ini terjadi. Namun perlu konfirmasi lebih lanjut	3

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Karakteristik Wilayah
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	Luasnya kawasan perairan laut WP Belakang Padang membuka kesempatan bagi nelayan ilegal untuk masuk, misalnya fenomena nelayan selam di Pulau Cukus Sarang (Mongobay.co.id)	3

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

- b. Tingkat pentingnya potensi dampak dengan mengidentifikasi dampaknya terhadap besarnya jumlah penduduk, luas penyebaran, intensitas, banyaknya komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dan sifat kumulatif dampak.

Tabel III-10 Penilaian Isu PB berdasarkan Tingkat Potensi Dampak

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Tingkat Potensi Dampak
Kategori Isu Lingkungan			
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi	Isu ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan misalnya pencemaran perairan, penyakit akibat bakteri dan kuman, dan penurunan fungsi dan daya dukung lingkungan pesisir	2
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	Isu ini berpotensi menimbulkan dampak dan degradasi kualitas lingkungan	3
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	Isu ini berpotensi menimbulkan keterbatasan Kuantitas dan kualitas air bersih serta akses untuk mendapatkan kebutuhan dasar penduduk di WP Belakang Padang	3
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	Isu ini berpotensi berdampak pada keterbatasan akses transportasi darat di WP Belakang Padang	1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Tingkat Potensi Dampak
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Isu ini akan memberikan kerusakan dan kerugian lingkungan pesisir dan ekonomi yang cukup besar dalam jangka panjang jika tidak ditangani	3
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan	Isu ini akan memberikan kerusakan dan kerugian lingkungan pesisir dan ekonomi yang cukup besar dalam jangka panjang jika tidak ditangani	3
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	Isu ini berpotensi menimbulkan konflik sosial akibat permasalahan lingkungan atas pengelolaan lahan pesisir dan perairan laut	3
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	Isu ini berpotensi menimbulkan keterbatasan akses masuk dan keluar WP Belakang Padang, dan potensi kecelakaan lalu lintas laut	2
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	Isu ini berpotensi menimbulkan keterbatasan akses informasi dan kemajuan digital bagi generasi muda di WP Belakang Padang, dan membatasi pengembangan era 4.0 dan 5.0	3
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	Isu ini berpotensi memicu timbulnya degradasi lingkungan dan penurunan mutu dan kualitas air akibat pembuangan limbah cair	3
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir	Lahan mangrove dan fungsi ekologisnya terancam akan hilang jika isu ini tidak ditangani	3
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)	Mempertahankan keanekaragaman hayati menjadi penting, dan akan terganggu jika isu ini tidak ditangani	2
Kategori Isu Sosial			
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	Dampak yang ditimbulkan berskala Kota Batam bahkan Nasional, yaitu kehilangan ciri khas budaya daerah	2
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi	Dampak yang ditimbulkan akan memberikan pengaruh pada penurunan kualitas SDM	3

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Tingkat Potensi Dampak
	ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	Indonesia dan permasalahan antara negara tetangga dan Indonesia, berpengaruh pada sektor ekonomi, sosial dan sektor penting lainnya	
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhan negara tetangga	Dampak yang ditimbulkan akan memberikan pengaruh pada penurunan kualitas SDM Indonesia dan permasalahan antara negara tetangga dan Indonesia, berpengaruh pada sektor ekonomi, sosial dan sektor penting lainnya	3
Kategori Isu Ekonomi			
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditrubusian budidaya ikan	Isu ini memberikan dampak yang sedang bagi lingkungan	2
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Isu ini tidak memberikan dampak lingkungan yang signifikan	1
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	Isu ini akan berdampak pada tingginya angka pelaku pengrusakan lingkungan, karena kecenderungan sikap yang eksploitatif pada alam bagi para pencari kerja/penduduk tidak bekerja	2
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	Privatisasi pulau akan memberikan kemungkinan hilangnya hak NKRI dalam mengelola lingkungan darat dan laut sekitar pulau yang berkaitan	3
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	Isu ini memberikan dampak yang sedang bagi lingkungan, seperti potensi hilangnya keanekaragaman hayati akibat aktivitas nelayan ilegal	3

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

- c. Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat antar isu pembangunan berkelanjutan lainnya.
- d. Keterkaitan dengan materi muatan KRP

Keterkaitan KRP berarti menilai isu strategis yang dapat dimuat dalam KRP baik dari pola ruang, struktur ruang, peraturan zonasi, maupun indikasi program. Isu strategis yang dapat tertuang dalam empat unsur KRP tersebut memiliki skor 3. Isu strategis yang dapat tertuang dalam indikasi program memiliki skor 2. Isu strategis yang tidak memiliki keterkaitan dengan KRP memiliki skor 1. Keterangan keterkaitan KRP dapat dilihat pada tabel III-11.

Tabel III-11 Penilaian Isu PB berdasarkan Tingkat Keterkaitan KRP

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Tingkat Keterkaitan KRP
Kategori Isu Lingkungan			
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi	Penanganannya dapat dituangkan dalam indikasi program	3
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	Penanganannya dapat dituangkan di dalam struktur ruang pada Rencana Jaringan Persampahan	3
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	Penanganannya dapat dituangkan di dalam struktur ruang pada Sistem Jaringan Sumber Daya Air	3
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	Penanganannya dapat dituangkan di dalam struktur ruang pada Sistem Jaringan Transportasi Jalan Lingkungan	2
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Isu kebencanaan dapat digambarkan dalam struktur ruang SDA, drainase, dan jaringan prasarana lainnya; dapat digambarkan dalam pola ruang tempat evakuasi bencana; dapat diatur dalam peraturan zonasi melalui aturan dasar maupun ketentuan khusus KRB, TEB; dapat dituangkan dalam indikasi program	3

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Tingkat Keterkaitan KRP
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan	Dapat digambarkan dalam pola ruang dan peraturan zonasinya	3
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	Dapat digambarkan dalam pola ruang dan peraturan zonasinya	3
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	Penanganannya dapat dituangkan di dalam struktur ruang pada Sistem Jaringan Transportasi Laut	3
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	Dapat digambarkan didalam struktur ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi	3
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	Dapat digambarkan dalam struktur ruang pengelolaan limbah; dapat digambarkan dalam pola ruang IPAL, dapat dituangkan dalam indikasi program	3
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir	Dapat digambarkan dalam pola ruang dan peraturan zonasinya	3
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)	Dapat digambarkan didalam Rencana Pola Ruang untuk Kawasan Lindung; Zona Lindung; Zona Konservasi; Suaka Margasatwa Laut	3
Kategori Isu Sosial			
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	Dapat digambarkan didalam Pola Ruang Zona Cagar Budaya; Zona Pariwisata	3
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	Dapat digambarkan didalam struktur ruang, peraturan zonasi dan indikasi program	3

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Tingkat Keterkaitan KRP
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga	Dapat digambarkan didalam struktur ruang, peraturan zonasi dan indikasi program	3
Kategori Isu Ekonomi			
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi pendistribusian budidaya ikan	Dapat dituangkan dalam struktur ruang pada sistem pusat pelayanan	3
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Dapat dituangkan dalam struktur ruang pada sistem pusat pelayanan	2
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	Tidak berkaitan dengan KRP	1
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	Dapat dituangkan dalam peraturan zonasi zona pariwisata	1
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	Tidak berkaitan dengan KRP	1

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

e. Keterkaitan RPPLH

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun guna memberikan arahan melestarikan jasa LH dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kota Batam sendiri belum memiliki

dokumen RPPLH sehingga tidak dapat dilakukan pembobotan untuk keterkaitan RPPLH dengan isu strategis.

f. Keterkaitan dengan KLHS di atasnya

Keterkaitan dengan KLHS di atasnya berarti mengintegrasikan isu strategis pembangunan berkelanjutan dengan KLHS RTRW Kota Batam. KLHS RTRW Kota Batam telah disusun pada tahun 2019. Justifikasi untuk muatan ini yaitu bobot 3 jika tercantum dalam isu prioritas pada KLHS RTRW. Bobot 2 jika tercantum dalam isu strategis KLHS RTRW. Bobot 1 jika terdapat dalam longlist isu KLHS RTRW. Bobot 0 jika tidak terdapat dalam isu PB pada KLHS RTRW. Keterangan keterkaitan dengan KLHS di atasnya dapat dilihat pada tabel III-12.

Tabel III-12 Penilaian Isu PB berdasarkan Keterkaitan dengan KRP di atasnya

Koding Isu	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan/Justifikasi	Bobot Tingkat Keterkaitan KRP (KLHS di atasnya)
Kategori Isu Lingkungan			
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Pemukiman kumuh	3
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Penataan pengelolaan limbah dan sampah	3
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Minimnya upaya konservasi air	3
Isu L-4	Jalan Lingkungan di tata meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitarnya	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Pengembangan infrastruktur jalan, terminal, pelabuhan, dan lapangan udara berskala internasional	3
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: rawan bencana	3
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Reklamasi	3

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat	Tidak terdapat didalam KLHS RTRW	1
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: peningkatan aksesibilitas	3
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah	Tidak terdapat didalam KLHS RTRW	1
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: pengelolaan air limbah belum optimal	2
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: alih fungsi lahan	3
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)	Tidak terdapat didalam KLHS RTRW	1
Kategori Isu Sosial			
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: alih fungsi lahan	3
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Peningkatan kualitas produk kepariwisataan	3
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhan negara tetangga	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Pulau Terdepan	3
Kategori Isu Ekonomi			
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi pendistribusian budidaya ikan	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Industri maritim	3

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Kemitraan usaha, lembaga ekonomi non bank	3
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja	Termasuk dalam longlist isu KLHS RTRW: Lapangan Kerja dan Pengangguran	3
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau	Tidak terdapat didalam KLHS RTRW	1
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang	Tidak terdapat didalam KLHS RTRW	1

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

Tabel III-13 Rekapitulasi Penilaian Kriteria Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis WP Belakang Padang

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Unsur Penapisan Isu PB Paling Strategis (Pasal 9(1), PP 46/2016)						Hasil (Ya/Tidak)
		Karakteristik Wilayah	Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Muatan KRP	KRP di atasnya	Total Skor	
Isu L-1	Permukiman nelayan di wilayah pesisir yang tidak tertata	3	2	2	3	3	13	Ya
Isu L-2	Ancaman kerusakan lingkungan dan permasalahan lingkungan akibat minimnya pengelolaan sampah darat dan sampah laut	3	3	3	3	3	15	Ya
Isu L-3	Keterbatasan akses terhadap air bersih dan inovasi pemanenan air hujan	3	3	3	3	3	15	Ya
Isu L-4	Buruknya infrastruktur jalan di beberapa lokasi di Belakang Padang, misalnya di sepanjang Polesek - Kampung Baru	1	1	2	2	3	9	Tidak
Isu L-5	Peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	3	3	3	3	3	15	Ya
Isu L-6	Perlunya pembangunan proyek reklamasi pesisir yang berlandaskan keberlanjutan	3	3	3	3	3	15	Ya

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Unsur Penapisan Isu PB Paling Strategis (Pasal 9(1), PP 46/2016)						Hasil (Ya/Tidak)
		Karakteristik Wilayah	Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Muatan KRP	KRP di atasnya	Total Skor	
Isu L-7	Perlunya pengaturan pemanfaatan ruang pesisir dan laut oleh masyarakat/konflik kepentingan pemanfaatan ruang pesisir dan laut	3	3	3	3	1	13	Ya
Isu L-8	Keterbatasan sarana transportasi antar pulau	3	2	3	3	3	14	Ya
Isu L-9	Keterbatasan akses terhadap jaringan telekomunikasi, misalnya di Pulau Lenggang, Kelurahan Sekanak Raya	2	3	2	3	1	11	Ya
Isu L-10	Permasalahan pengelolaan air limbah (domestik dan komersil)	3	3	3	3	2	14	Ya
Isu L-11	Berkurangnya fungsi lahan bakau karena fenomena konversi lahan bakau di wilayah pesisir	3	3	3	3	3	15	Ya
Isu L-12	Perlunya pengaturan pada keberadaan keanekaragaman hayati yang dilindungi, misalnya dugong dan lumba-lumba.	2	2	3	3	1	11	Ya
Isu S-1	Perlunya mempertahankan kearifan lokal dalam hal pengembangan pariwisata (wisata sejarah dan wisata religi)	3	2	2	3	3	13	Ya

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Unsur Penapisan Isu PB Paling Strategis (Pasal 9(1), PP 46/2016)						Hasil (Ya/Tidak)
		Karakteristik Wilayah	Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Muatan KRP	KRP di atasnya	Total Skor	
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	3	3	3	3	3	15	Ya
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhannya negara tetangga	3	3	3	3	3	15	Ya
Isu E-1	Perlunya pengaturan dalam distribusi hasil tangkap dan budidaya perikanan di Belakang Padang	2	2	3	3	3	13	Ya
Isu E-3	Keterbatasan akses perbankan, akses permodalan dan sarana prasarana pendukung ekonomi masyarakat	2	1	1	2	3	9	Tidak
Isu E-4	Keterbatasan kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja	2	2	2	1	3	10	Ya

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Unsur Penapisan Isu PB Paling Strategis (Pasal 9(1), PP 46/2016)						Hasil (Ya/Tidak)
		Karakteristik Wilayah	Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Muatan KRP	KRP di atasnya	Total Skor	
Isu E-5	Privatisasi pulau-pulau di Belakang Padang untuk kepentingan pariwisata terbatas	3	3	3	1	3	13	Ya
Isu E-6	Aktivitas nelayan ilegal di perairan Belakang Padang	3	3	3	1	3	13	Ya

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

3.3.5 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Hasil penjaringan isu strategis menghasilkan 18 isu paling strategis di WP Belakang Padang, yaitu 11 isu lingkungan, 3 isu sosial, dan 4 isu ekonomi. Tabel III-14 menunjukkan isu paling strategis di WP Belakang Padang. Selanjutnya dilakukan penilaian isu prioritas dengan menghubungkan isu paling strategis dengan 10 muatan lingkungan.

Tabel III-14 Hasil penjaringan isu paling strategis WP Belakang Padang

No Isu	Hasil Penjaringan Isu paling strategis
Isu Lingkungan	
Isu L-1	Hunian Nelayan yang tidak tertata rapi
Isu L-2	Penanggulangan Sampah untuk kesehatan lingkungan
Isu L-3	Ketersediaan air bersih masih kurang baik
Isu L-5	Potensi peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut
Isu L-6	Pengaturan reklamasi pulau yang berkelanjutan
Isu L-7	Pengaturan pembangunan atas laut oleh masyarakat
Isu L-8	Operasionalisasi angkutan penyeberangan masih bersistem secara tradisional
Isu L-9	Pelayanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah
Isu L-10	Merupakan area beresiko permasalahan pengelolaan air limbah
Isu L-11	Konversi mangrove di pesisir
Isu L-12	Ditemukan keanekaragaman hayati yang dilindungi (dugong, lumba-lumba)
Isu Sosial	
Isu S-1	Kearifan lokal yang dipertahankan untuk menjadikan ciri khas berbudaya
Isu S-2	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/human trafficking, narkoba dan pencurian SDA
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhan negara tetangga
Isu Ekonomi	
Isu E-1	Tata kelola dalam lokasi penditrubusian budidaya ikan
Isu E-4	Tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja
Isu E-5	Beberapa pulau difungsikan sepenuhnya untuk kegiatan pariwisata, terlihat seperti privatisasi pulau
Isu E-6	Nelayan ilegal diperairan belakang padang

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

Identifikasi isu PB prioritas dilakukan dengan sistem skoring pada setiap muatan lingkungan pada rentang 1 sampai 5, dimana 1 berarti tidak ada kaitan dan 5 berarti isu tersebut sangat penting bagi lingkungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 PP No. 46/2016 unsur-unsur dalam menentukan isu pembangunan berkelanjutan prioritas paling sedikit menggunakan 10 muatan lingkungan hidup, yaitu:

- A. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan; (Kapasitas D3TLH)
- B. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup; (Dampak LH)
- C. Kinerja layanan atau jasa ekosistem; (Kinerja JE)
- D. Intensitas dan cakupan wilayah bencana (Intensitas Bencana)
- E. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam; (Status SDA)
- F. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; (Keanekaragaman hayati)
- G. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; (Adaptasi PI)
- H. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat; (Kemiskinan)
- I. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; (Kesehatan)
- J. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat. (Hukum tradisional)

Tabel berikut ini merupakan bagian analisis dari keterkaitan isu pembangunan berkelanjutan terhadap muatan di atas. Dalam kegiatan KLHS RDTR WP Belakang Padang, Metode kuantitatif dilakukan dengan metode skoring yang menunjukkan derajat penting tidaknya pengaruh isu pembangunan berkelanjutan strategis terhadap masing-masing muatan. Keterangan skor tersebut adalah: Sangat Penting=5; Penting=4; Cukup Penting=3; Tidak Penting=2; Sangat Tidak Penting=1. Tabel III-15 menunjukkan proses skoring dan hasil akhir isu PB Prioritas WP Belakang Padang.

Tabel III-15 Penjaringan Isu PB Prioritas di WP Belakang Padang

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Kapasitas DDTLH	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Bencana	Mutu SDA	Biodiversitas	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Masyarakat	Hukum Tradisional	Total Skor
Isu Lingkungan												
Isu L-1	Permukiman nelayan di wilayah pesisir yang tidak tertata	5	3	1	3	3	1	5	5	5	1	32
		Penataan permukiman dapat meningkatkan daya dukung lingkungan hidup	berdampak pada munculnya sanitasi yang buruk	Tidak ada kaitan	Keterkaitan rendah	Keterkaitan rendah	Tidak ada kaitan	Meningkatkan keterpaparan dan sensitivitas terhadap perubahan iklim	Berkaitan erat dengan kemiskinan	berkaitan dengan kualitas kesehatan masyarakat		
Isu L-2	Ancaman kerusakan lingkungan dan permasalahan lingkungan akibat minimnya pengelolaan sampah darat dan sampah laut	3	5	5	2	5	4	2	2	5	4	37
		Pengelolaan sampah darat dan laut cukup berpengaruh pada Daya Dukung dan Daya Tampung LH	Minimnya pengelolaan sampah menimbulkan dampak destruktif bagi LH	Sampah sangat berpengaruh pada eksistensi JE secara langsung dan tidak langsung	Sampah tidak terlalu mempengaruhi kejadian bencana	Sampah darat dan laut sangat berpengaruh pada mutu SDA	Keberadaan sampah dapat menurunkan potensi biodiversitas	Sampah sedikit berpengaruh terhadap perubahan iklim	Sampah berasosiasi dengan rendahnya pendapatan keluarga/kemiskinan	Sampah berdampak pada kesehatan SDM	Masyarakat Tradisional lebih paham mengenai pengelolaan sampah	
Isu L-3	Keterbatasan akses terhadap air bersih dan inovasi pemanenan air hujan	5	5	5	5	2	1	4	5	5	2	39
		Sumber air bersih dan akses terhadapnya sangat berpengaruh pada DDTLH	Minimnya tersediaan dan akses pada air bersih meningkatkan terjadinya dampak LH	Berkaitan dengan jasa ekosistem penyedia air	Berkaitan dengan potensi bencana kekeringan di pulau kecil	Inovasi pemanenan air hujan berkorelasi dengan mutu SDA	Inovasi pemanenan air hujan berkorelasi dengan biodiversitas	Ketersediaan air bersih penting dalam bertahan menekan terjadinya perubahan iklim	Air dan kemiskinan berasosiasi kuat	air dan kesehatan berasosiasi erat	minimnya pengelolaan air berdampak pada konflik sosial di masyarakat	
Isu L-5		5	5	5	5	2	3	5	3	3	1	37

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Kapasitas DDDTLH	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Bencana	Mutu SDA	Biodiversitas	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Masyarakat	Hukum Tradisional	Tota I Skor
	Peningkatan kerawanan bencana seperti abrasi, intrusi air laut	Risiko bencana berdampak langsung terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan (dua arah – saling mempengaruhi)	Risiko bencana berdampak langsung terhadap penurunan lingkungan hidup	Risiko bencana berdampak langsung terhadap penurunan jasa ekosistem	Risiko bencana berdampak langsung terhadap maraknya bencana yang terjadi	Risiko bencana berdampak tidak langsung terhadap penurunan jasa ekosistem	Risiko bencana berdampak tidak langsung terhadap penurunan keragaman flora dan fauna (matinya flora dan fauna)	Risiko bencana berdampak langsung terhadap perubahan iklim (dua arah – saling mempengaruhi)	Risiko bencana berdampak tidak langsung terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat	Risiko bencana berdampak langsung terhadap penurunan jasa ekosistem	Risiko bencana berdampak tidak langsung terhadap pola adaptasi masyarakat tradisional	
		3	4	1	4	2	3	3	1	1	1	23
Isu L-6	Perlunya pembangunan proyek reklamasi pesisir yang berlandaskan keberlanjutan	reklamasi yang tidak sustainable berdampak buruk pada daya dukung lingkungan hidup	Keterkaitan cukup tinggi, reklamasi dapat merugikan lingkungan hidup jika tidak direncanakan dengan baik	Tidak ada kaitan	Reklamasi akan meningkatkan risiko bencana pesisir	Keterkaitan rendah	Reklamasi dapat berpotensi menghilangkan biodiversitas lokal	proyek akan meningkatkan keterpaparan pada dampak perubahan iklim di daerah pesisir	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	
Isu L-7		3	4	1	4	1	3	3	1	1	2	23

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Kapasitas DDDTLH	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Bencana	Mutu SDA	Biodiversitas	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Masyarakat	Hukum Tradisional	Tota I Skor
	Perlunya pengaturan pemanfaatan ruang pesisir dan laut oleh masyarakat/konflik kepentingan pemanfaatan ruang pesisir dan laut	Pemanfaatan ruang yang tidak baik akan mempengaruhi daya dukung lingkungan hidup	Segala kegiatan pemanfaatan ruang pesisir yang tidak baik akan berdampak pada lingkungan	Tidak ada kaitan	Akan meningkatkan potensi bencana dan kerugian pada bencana pesisir	Tidak ada kaitan	berpotensi menyebabkan kehilangan biodiversitas	kawasan pesisir sangat sensitif terhadap isu perubahan iklim	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Keterkaitan rendah	
Isu L-8	Keterbatasan sarana transportasi antar pulau	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	12
		Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	
Isu L-9	Keterbatasan akses terhadap jaringan telekomunikasi, misalnya di Pulau Lingsang, Kelurahan Sekanak Raya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan
Isu L-10	Permasalahan pengelolaan air limbah (domestik dan komersil)	5	5	2	2	2	2	1	2	2	1	24
		Limbah dapat menurunkan daya dukung lingkungan hidup	Limbah berdampak dan berkaitan erat dengan dampak terhadap lingkungan hidup	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	Tidak ada kaitan	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	Tidak ada kaitan
		4	5	5	5	4	5	5	1	4	1	39

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Kapasitas DDDTLH	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Bencana	Mutu SDA	Biodiversitas	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Masyarakat	Hukum Tradisional	Tota I Skor
Isu L-11	Berkurangnya fungsi lahan bakau karena fenomena konversi lahan bakau di wilayah pesisir	Lahan bakau menjadi pendukung bagi LH	Lahan bakau berhubungan erat dengan dampak LH	Lahan bakau sebagai salah satu JE penyedia	Lahan Bakau bermanfaat dalam mitigasi bencana non struktural	Lahan Bakau sebagai penjaga SDA	lahan bakau sebagai penjaga biodiversitas yang sangat baik	Lahan Bakau bermanfaat dalam mengurangi dampak perubahan iklim	Tidak ada kaitan	Lahan bakau yang buruk berdampak pada kesehatan sekitar masyarakat	Tidak ada kaitan	
		2	2	2	1	1	5	1	1	1	1	17
Isu L-12	Perlunya pengaturan pada keberadaan keanekaragaman hayati yang dilindungi, misalnya dugong dan lumba-lumba.	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	Berkaitan sedang	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	menyebabkan kehilangan biodiversitas	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	
Isu Sosial												
Isu S-1	Perlunya mempertahankan kearifan lokal dalam hal pengembangan pariwisata (wisata sejarah dan wisata religi)	4	3	5	1	5	5	1	5	1	5	35
		Pengembangan destinasi wisata yang kurang menggunakan kaidah lingkungan berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Keterkaitan sedang	Pengembangan destinasi wisata yang kurang terencana berdampak pada jasa ekosistem lingkungan	Tidak ada kaitan	Pengembangan destinasi wisata yang kurang memperhatikan kaidah lingkungan berdampak pada mutu dan kualitas SDA	Pengembangan destinasi wisata yang kurang memperhatikan kaidah lingkungan berdampak pada penurunan kuantitas dan kualitas keberagaman flora dan fauna	Tidak ada kaitan	Pengembangan destinasi wisata yang kurang memperhatikan kaidah sosial masyarakat berdampak pada ketimpangan perekonomian masyarakat	Tidak ada kaitan	Pengembangan destinasi wisata yang kurang memperhatikan kaidah sosial masyarakat berdampak pada konflik masyarakat tradisional	
Isu S-2		1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	13

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Kapasitas DDDTLH	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Bencana	Mutu SDA	Biodiversitas	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Masyarakat	Hukum Tradisional	Tota I Skor
	Kawasan perbatasan laut rentan terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan internasional/lintas negara seperti penyelundupan manusia/ human trafficking, narkoba dan pencurian SDA	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	
Isu S-3	Masyarakat kawasan perbatasan laut memiliki interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat mereka rentan dari keterpengaruhn negara tetangga	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	11
		Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	
Isu Ekonomi												
Isu E-1	Perlunya pengaturan dalam distribusi hasil tangkap dan budidaya perikanan di Belakang Padang	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	12
		Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	termasuk dalam sebuah konsep pemanfaatan hasil laut sebagai bagian dari biodiversitas	Tidak ada kaitan	Berkaitan sedang	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	
Isu E-4		1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	14

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Kapasitas DDDTLH	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Bencana	Mutu SDA	Biodiversitas	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Masyarakat	Hukum Tradisional	Tota I Skor
	Keterbatasan kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Pengangguran sangat berkaitan dengan kemiskinan	Penduduk yang tidak bekerja memiliki tendensi kecenderungan kondisi kesehatan yang buruk	Tidak ada kaitan	
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Isu E-5	Privatisasi pulau-pulau di Belakang Padang untuk kepentingan pariwisata terbatas	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	Akan menutup kesempatan bagi masyarakat lokal dalam memanfaatkan potensi ekonomi pada pulau-pulau yang berkaitan	Tidak ada kaitan	Tidak ada kaitan	
Isu E-6		5	4	2	2	5	5	2	3	5	3	36

Kode	Hasil Pemusatan Isu	Kapasitas DDTLH	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Bencana	Mutu SDA	Biodiversitas	Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan Masyarakat	Hukum Tradisional	Tota I Skor
	Aktivitas nelayan ilegal di perairan Belakang Padang	Aktivitas nelayan ilegal berpengaruh pada DDTLH	Aktivitas nelayan ilegal cukup berdampak pada LH	Aktivitas nelayan ilegal sedikit berpengaruh pada JE	Aktivitas nelayan ilegal tidak/sedikit berpengaruh pada bencana	Aktivitas nelayan ilegal sangat berpengaruh pada mutusDA	Aktivitas nelayan ilegal sangat berpengaruh pada Biodiversitas marin/bahari yang menuju eksploitasi ilegal	Aktivitas nelayan ilegal sedikit berpengaruh pada sikap dalam menghadapi perubahan iklim	Aktivitas nelayan ilegal berpengaruh pada ekonomi masyarakat lokal	Aktivitas nelayan ilegal berpengaruh pada kesehatan masyarakat (aspek SDM)	Aktivitas nelayan ilegal cukup berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat lokal dan menimbulkan konflik sosial	

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

Hasil penjaringan isu pembangunan berkelanjutan prioritas menghasilkan enam isu prioritas dengan syarat nilai akhir lebih dari 20. Berdasarkan hasil penapisan pada tabel III-8, maka isu pembangunan berkelanjutan prioritas pada Kecamatan Belakang Padang yang telah disesuaikan penamaannya adalah sebagai berikut:

1. Ancaman kerusakan lingkungan akibat minimnya pengelolaan sampah darat dan sampah laut
2. Keterbatasan akses dan inovasi terhadap air bersih
3. Peningkatan risiko bencana pesisir dan pulau kecil
4. Konversi lahan bakau di wilayah pesisir
5. Mempertahankan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata (wisata sejarah dan religi)
6. Ancaman eksploitasi ilegal sumberdaya ikan di wilayah perairan Belakang Padang

Untuk memastikan bahwa hasil penapisan isu di atas telah sesuai dengan kondisi di lapangan, maka kami melakukan uji publik perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas yang nantinya akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

3.4 Penjabaran Kajian Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Prioritas

3.4.1 Ancaman kerusakan lingkungan akibat minimnya pengelolaan sampah darat dan sampah laut

Pengelolaan sampah di Kecamatan Belakang Padang sedikit lebih menantang dibandingkan dengan permasalahan persampahan di pulau utama Pulau Batam. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi pilihan sebagai bagian dalam pengelolaan sampah domestik masyarakat di pulau-pulau di Kecamatan Belakang Padang. TPA yang saat ini masih aktif menampung pasokan sampah dari seluruh wilayah bagian di Kecamatan Belakang Padang adalah TPA Bulan, yang saat ini sangat jelas membutuhkan sebuah aksi peningkatan kualitas dan kuantitas serta sistem pengolahan sampah terpadu. Saat ini, terlihat pada Gambar III-2 bahwa TPA Belakang Padang memiliki sistem *Open Dumping* dengan luas lahan yang terbatas.



Gambar III-2 TPA Belakang Padang

(Sumber: Survei Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang 2021)

3.4.2 Keterbatasan akses dan inovasi terhadap air bersih

Sumberdaya air merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin besar kebutuhan atas air bersih. Kecamatan Belakang Padang memiliki karakteristik yang terdiri dari pulau-pulau dan berada pada daerah perbatasan internasional, sehingga tantangan dalam pemenuhan air bersih menjadi lebih dirasakan. Kecamatan Belakang Padang memiliki beberapa waduk dalam memenuhi kebutuhan airnya, diantaranya yaitu Waduk Sekanank I, Waduk Sekanank II, Waduk Pulau Pemping, Waduk Pulau Lumba, dan Waduk Pulau Mecan.

Karakteristik suatu wilayah sangat menentukan potensi dan kerentanan sumberdaya air di wilayah tersebut. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan target SDGs yaitu pemenuhan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat secara adil dan universal, dengan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor untuk meminimalisir fenomena kelangkaan air bersih (target 6.1, 6.4, dan 6.5 pada SDGs). Beberapa faktor yang menyebabkan keterbatasan ketersediaan air di Kecamatan Belakang Padang adalah sempitnya daerah tangkapan air yang menyebabkan debit aliran yang sangat kecil, sehingga potensi air permukaan sangat minim. Selain itu, Pemanfaatan air tanah di Pulau Batam secara keseluruhan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 tentang pelarangan pemanfaatan airtanah dangkal bagi keperluan non perumahan di kawasan permukiman yang telah padat. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pilihan lain dalam pemenuhan kebutuhan air baku bagi penduduk melalui beberapa program pemanenan air hujan pada skala mikro, untuk mencukupi kebutuhan air harian.

3.4.3 Peningkatan risiko bencana pesisir dan pulau kecil

Kejadian bencana di pulau-pulau kecil membutuhkan upaya pengurangan risiko sebagai salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Rencana dan kebijakan pembangunan dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terhadap bencana pesisir dan dampak perubahan iklim. Dalam hal ini termasuk dalam pengelolaan permukiman, peningkatan kapasitas masyarakat agar tangguh terhadap bencana, dan upaya mitigasi baik struktural maupun non struktural di wilayah pesisir Kecamatan Belakang Padang.

Kejadian bencana di Kecamatan Belakang Padang didominasi oleh kejadian bencana puting beliung dari tahun 2015 hingga 2018. Hampir setiap tahunnya kejadian bencana ini berdampak pada korban luka maupun jiwa, ditambah kerugian ekonomi karena kerusakan bangunan/rumah akibat bencana. Tabel

III-16 menunjukkan rekaman kejadian bencana di Kecamatan Belakang Padang dari tahun 2015 hingga 2018 serta jumlah korban yang diakibatkannya.

Tabel III-16 Kejadian Bencana di Kecamatan Belakang Padang 2015-2018

No	Tahun	Jenis Bencana	Lokasi Kejadian	Jumlah Korban			
				KK	JIWA	LK	PR
1	2015	Puting Beliung	RT 002/006, Pulau Sarang Kel. Sekanak Raya, Kec. Blp	1	4	-	-
2	2016	Puting Beliung	RT 01 RW 01, Pulau Pecong, Belakang Padang	1	3	2	1
3	2017	Puting Beliung	Air Lingka, Kasu, Belakang Padang	2	7	4	3
4	2017	Puting Beliung	Sekanak Raya, Belakang Padang	1	6	2	4
5	2017	Puting Beliung	Pulau Terong, Belakang Padang	2	6	3	3
6	2017	Puting Beliung	Pulau Pecong, Pecong, Belakang Padang	7	29	14	15
7	2018	Tanah Longsor	Kampung Bugis Batu Gajah RT 02 RW 01, Sekanak Raya, Belakang Padang	1	3	2	1
8	2018	Puting Beliung	Kampung Jawa RT 02 RW 03, Sekanak Raya, Belakang Padang	1	6	5	1
9	2018	Puting Beliung	RT 04 dan RT 05, RW 01, Pecong, Belakang Padang	30	107	-	-

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

3.4.4 Konversi lahan bakau di wilayah pesisir

Keberadaa ekosistem bakau sangat bermanfaat bagi daerah pesisir untuk melindungi dan menjaga wilayahnya dari berbagai permasalahan lingkungan pesisir. Beberapa lokasi hutan bakau di Kecamatan Belakang Padang adalah di Pulau Terong, Pulau Mecan, Pulau Kapalajernih, dan Pulau Pemping, serta lokasi lainnya yang perlu dilakukan survei lapangan. Aktivitas perkapalan yang tinggi di Selat Singapura menyebabkan dibutuhkan ekosistem bakau yang sehat di wilayah pesisir dan pulau-pulau di Kecamatan Belakang Padang, agar dapat terhindar dari dampak buruk aktivitas tersebut, misalnya gelombang tinggi dan angin, serta bencana pesisir lainnya. Selain itu, terdapatnya stasiun gas dan minyak (BUMN) di pesisir Kecamatan Belakang Padang, yaitu PT TGI di

Pulau Pemping dan PT Pertamina di Pulau Sambu dan aktivitas penambangan pasir di Pulau Kasu, Pulau Terong dan Pulau Pemping (kkp.go.id), yang menyebabkan terjadinya tekanan dan desakan pada eksistensi ekosistem bakau di Pulau Batam secara keseluruhan.

Menurut Gatra.com, hanya tersisa 40 persen dari luasan ekosistem bakau saat ini. Beberapa lokasi hutan bakau yang masih tersisa di Kecamatan Belakang Padang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan melalui aktivitas ekowisata bakau. Kerusakan hutan bakau juga terjadi karena adanya upaya reklamasi pesisir yang melakukan penimbunan pada lahan hutan bakau, untuk dijadikan lahan terbangun lainnya. Disebabkan karena masih terbatasnya akses menuju kawasan hutan bakau di Kecamatan Belakang Padang, maka tidak banyak kegiatan atau rekam jejak pelestarian hutan bakau di Kecamatan Belakang Padang ini. Sehingga, diperlukan analisis lebih lanjut terkait terjadinya alih fungsi lahan hutan bakau di Kecamatan Belakang Padang.

3.4.5 Mempertahankan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata (wisata sejarah dan religi)

Terdapat berbagai tujuan wisata religi dan sejarah di Kecamatan Belakang Padang. Tidak hanya untuk wisatawan lokal, namun situs wisata ini juga ditujukan untuk wisatawan internasional dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Dua makam syekh di Pulau Tulup Kecil dan Pulau Tulup Besar menjadi destinasi religi yang menarik bagi wisatawan. Sekaligus dalam wisata religi ini, wisatawan dapat menikmati pemandangan birunya laut dan pulau-pulau sekitar di Kecamatan Belakang Padang. Hal yang lebih menarik, yaitu bau harum yang keluar dari sekitar Makam Sunan Thulub yang berada diatas bukit. Beberapa wisata sejarah yang terdapat di Kecamatan Belakang Padang yang dijadikan cagar budaya adalah Gedung Nasional yang berfungsi sebagai pusat pertemuan para unsur Muspida se Kecamatan Belakang Padang pada zaman dahulu, Komplek Angkatan Laut Belakang Padang dan Komplek Perumahan Prajurit Angkatan Laut, Kantor Camat Belakang Padang dan Kantor Imigrasi yang dibangun pada tahun 1950an. Gambar III-3

menunjukkan makam Syekh Syarif Ainun di Pulau Tulup Kecil, Kecamatan Belakang Padang.



Gambar III-3 Wisata Sejarah di Pulau Tulup Kecil
(Sumber: Disbudpar.batam.go.id)

3.4.6 Ancaman eksploitasi ilegal sumberdaya ikan di wilayah perairan Belakang Padang

Berada pada kawasan perbatasan antara Indonesia, Singapura dan Malaysia, membuat wilayah perairan Kecamatan Belakang Padang sangat rentan pada terjadinya aktivitas perikanan ilegal dari negara tetangga. Hal ini berimplikasi pada terdapatnya persaingan tidak sehat diantara nelayan lokal dan nelayan dari negara tetangga, yang dapat memicu munculnya konflik antar negara. Terlebih biodiversitas yang tinggi diperairan Kecamatan Belakang Padang menjadi faktor penarik terjadinya eksploitasi sumberdaya marin. Selain eksploitasi ilegal pada sumberdaya ikan, menurut Ramses (2017), ditemukan sebanyak 102 spesies karang keras dan 15 spesies karang lunak di perairan Pulau Sarang, Kecamatan Belakang Padang. Beberapa jenis karang diantaranya *Goniopora stutchbury*, *Goniopora pandoraensis*, (nama dagang: Jawstone coral) *Discosoma spp*, *Ricordia spp*, *Rhodactis spp* (False coral/Disk anemons) telah mengalami kepunahan local. Sementara *Tubastrea faulkneri* (Sanggora

coral) sangat sulit ditemukan dan terancam punah secara local. Pembudidayaan karang oleh masyarakat (bukan korporasi) sangat perlu dikembangkan, agar kegiatan budidaya dan perdagangan karang tidak semata-mata dilakukan dengan pendekatan bisnis, agar kelestarian karang dapat terjaga, serta dapat menjamin pemanfaatan yang ramah lingkungan.

Perdagangan karang hias secara ilegal ini berimplikasi pada penurunan hasil tangkap perikanan, khususnya bagi nelayan lokal yang hanya menggunakan peralatan sederhana berupa bubu sebagai alat pencari ikan. Ketergantungan ikan pada ekosistem terumbu karang juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan sebagai isu strategis prioritas di Kecamatan Belakang Padang.

3.5 Hasil Identifikasi Muatan KRP

3.5.1 Hasil Identifikasi Muatan KRP

Identifikasi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dilakukan dengan menelaah dasar-dasar penyusunannya (visi, misi, tujuan, sasaran, latar belakang), konsepnya (konsep makro, desain besar, peta jalan), dan/atau muatan arahnya (strategi, skenario, desain, rencana aksi, kriteria, struktur kegiatan, teknis pelaksanaan) sesuai dengan tingkat kemajuan penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program pada saat mulai dilakukan KLHS. Muatan-muatan yang ada disusun dalam komponen-komponen materi kebijakan, rencana, dan/atau program yang kemudian dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. penurunan atau terlampauinya kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. penurunan kinerja layanan jasa ekosistem;
3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, atau kebakaran hutan dan lahan;
4. penurunan mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
5. penurunan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
6. peningkatan kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
7. peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
8. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau;
9. ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Tabel III-17 menunjukkan identifikasi muatan KRP. Pada tabel tersebut simbol (+) menandakan menimbulkan pengaruh positif terhadap lingkungan hidup; simbol (0) menandakan tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup; dan simbol (-) menandakan menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan

hidup. Jika KRP memiliki lebih dari dua dampak negatif maka dinilai memiliki potensi menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan hidup.

3.5.2 Keterkaitan KRP dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Keterkaitan KRP dengan isu pembangunan berkelanjutan prioritas menyimpulkan terkait KRP tersebut membutuhkan analisis 6 muatan KLHS. Adapun isu pembangunan berkelanjutan prioritas di WP Belakang Padang yaitu:

1. Minimnya Pengelolaan Sampah
2. Keterbatasan Air Bersih
3. Risiko Bencana Pesisir
4. Konversi Lahan Bakau
5. Pengembangan pariwisata
6. Eksploitasi ikan ilegal

Tabel III-18 menunjukkan muatan KRP yang membutuhkan analisis enam muatan KLHS. Pada tabel tersebut simbol (+) menandakan menimbulkan pengaruh positif terhadap lingkungan hidup; simbol (0) menandakan tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup; dan simbol (-) menandakan menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan hidup. Jika KRP memiliki lebih dari dua dampak negatif maka dinilai memiliki potensi menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

Tabel III-17 Identifikasi Muatan KRP

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
A	Perwujudan Struktur Ruang											
A.1	Perwujudan Pusat Pelayanan											
A.1.1	Perwujudan PL Kecamatan											
1	Pembangunan Kawasan PL Kecamatan di Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu	-	-	-	0	-	-	+	+	0	5	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Peningkatan kualitas/revitalisasi kawasan PL Kecamatan di Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Pemantapan Kawasan PL Kecamatan di Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
4	Pemeliharaan Kawasan PL Kecamatan di Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.1.2	Perwujudan Pusat Lingkungan (PL)											
1	Pembangunan kawasan PL di Kelurahan Pulau Mecan, Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Pemping, Kel. Pemping; Pulau Terong, Kel. Pulau Terong; Pulau Pecong, Kel. Pecong	-	-	-	0	-	-	+	+	0	5	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Peningkatan kualitas/revitalisasi kawasan PL Kelurahan di Kelurahan Pulau Mecan, Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Pemping, Kel. Pemping; Pulau Terong, Kel. Pulau Terong; Pulau Pecong, Kel. Pecong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
3	Pemantapan Kawasan PL Kelurahan di Kelurahan Pulau Mecan, Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Pemping, Kel. Pemping; Pulau Terong, Kel. Pulau Terong; Pulau Pecong, Kel. Pecong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	Pemeliharaan Kawasan PL Kelurahan di Kelurahan Pulau Mecan, Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Pemping, Kel. Pemping; Pulau Terong, Kel. Pulau Terong; Pulau Pecong, Kel. Pecong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.2	Perwujudan Jaringan Transportasi											
A.2.1	Rencana Jaringan Jalan											
1	Rencana Jaringan Jalan Arteri Sekunder											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pembangunan Jaringan Jalan arteri sekunder di Ruas jalan yang menghubungkan Pulau Batam – Pulau Tengah – Pulau Boyan – Tanjung Kubu – Pulau Teluk Bakau, Pulau Lumba, Pulau Surai Cundung – Pulau Uban – Pulau Tandur – Pulau Panjang – Pulau Bulat – Pulau Kepala Jeri – Pulau Anak Ladan – Pulau Ladan	-	-	-	0	-	-	+	-	0	6	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Peningkatan kualitas jaringan jalan arteri sekunder di Ruas jalan yang menghubungkan Pulau Batam – Pulau Tengah – Pulau Boyan – Tanjung Kubu – Pulau Teluk Bakau, Pulau Lumba, Pulau Surai Cundung – Pulau Uban – Pulau Tandur – Pulau Panjang – Pulau Bulat – Pulau Kepala Jeri – Pulau Anak Ladan – Pulau Ladan jalan arteri sekunder	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	- Pemeliharaan jaringan jalan arteri sekunder											
	Pemeliharaan jaringan jalan arteri sekunder di Ruas jalan yang menghubungkan Pulau Batam – Pulau Tengah – Pulau Boyan – Tanjung Kubu – Pulau Teluk Bakau, Pulau Lumba, Pulau Surai Cundung – Pulau Uban – Pulau Tandur – Pulau Panjang – Pulau Bulat – Pulau Kepala Jeri – Pulau Anak Ladan – Pulau Ladan	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemantapan pelayanan jaringan jalan arteri sekunder di Ruas jalan yang menghubungkan Pulau Batam – Pulau Tengah – Pulau Boyan – Tanjung Kubu – Pulau Teluk Bakau, Pulau Lumba, Pulau Surai Cundung – Pulau Uban – Pulau Tandur – Pulau Panjang – Pulau Bulat – Pulau Kepala Jeri – Pulau Anak Ladan – Pulau Ladan	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
2	Rencana Jaringan Jalan Lingkungan											
	Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan di Seluruh jaringan jalan lingkungan di WP Belakang Padang (Hinterland Kota Batam)	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan jaringan jalan lingkungan di Seluruh jaringan jalan lingkungan di WP Belakang Padang (Hinterland Kota Batam)	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemantapan pelayanan jaringan jalan lingkungan di Seluruh jaringan jalan lingkungan di WP Belakang Padang (Hinterland Kota Batam)	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pembangunan PJU Hinterland Kota Batam di Seluruh jaringan jalan lingkungan di WP Belakang Padang (Hinterland Kota Batam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.2.2	Rencana Pengembangan Jembatan											
1	Jembatan											
	Pembangunan Jembatan/pelantar wilayah Hinterland di Seluruh Jembatan/ Pelantar Wilayah Hinterland	0	0	+	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan jembatan/pelantar wilayah hinterland di Seluruh Jembatan/ Pelantar Wilayah Hinterland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.2.3	Rencana Jaringan Transportasi Laut											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
1	Pelabuhan Laut											
	Pemantapan pelabuhan pengumpul di Kelurahan Tanjung Sari	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan pengumpul di Kelurahan Tanjung Sari	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan pelabuhan pengumpul di Kelurahan Tanjung Sari	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemantapan pelabuhan lokal di Kelurahan Sekanak Raya, Kelurahan Pemping, Kelurahan Pecong	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pengembangan dan peningkatan kualitas	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	pelayanan pelabuhan lokal di Kelurahan Sekanak Raya, Kelurahan Pemping, Kelurahan Pecong											Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan pelabuhan lokal di di Kelurahan Sekanak Raya, Kelurahan Pemping, Kelurahan Pecong	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Terminal khusus											
	Pemantapan terminal Khusu di Kelurahan Tanjung Sari	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan terminal khusus di Kelurahan Tanjung Sari	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan terminal khusu di Kelurahan Tanjung Sari	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
												Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Alur Pelayaran di laut											
	Pemantauan alur pelayanan laut di Batam (Sekupang) - Provinsi DKI Jakarta (Tanjung Priok); Batam – Karimun (Provinsi Kepulauan Riau); Batam (Sekupang) – Singapore (Harbourfront); Batam (Sekupang) - Malaysia	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemantapan alur pelayanan laut di Batam (Sekupang) - Provinsi DKI Jakarta (Tanjung Priok); Batam – Karimun (Provinsi Kepulauan Riau); Batam (Sekupang) – Singapore (Harbourfront); Batam (Sekupang) - Malaysia	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.3.	Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Ketenagalistrikan											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
A.3.1	Rencana Pengembangan											
	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi											
1	Sarana Penyimpanan Bahan Bakar											
	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa depo minyak dan gas (migas) di Kelurahan Pemping	0	0	-	0	0	0	0	-	0	3	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan fungsi dan kualitas pelayanan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa depo minyak dan gas (migas) di Kelurahan Pemping	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen											
	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas jaringan yang menyalurkan gas bumi	0	0	-	0	0	0	0	-	0	3	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	dari kilang pengolahan ke konsumen di Kecamatan Belakang Padang											Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan fungsi dan kualitas pelayanan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen di Kecamatan Belakang Padang	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.3.2	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung											
1	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik PLTG											
	Pemantapan fungsi dan pelayanan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik PLTG di PLTG Kepala Jeri	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas infrastruktur pembangkitan	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	tenaga listrik PLTG di PLTG Kepala Jeri											Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan fungsi dan kualitas pelayanan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik PLTG di PLTG Kepala Jeri	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik PLTD											
	Pemantapan fungsi dan pelayanan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik PLTD di PLTD Belakang Padang; PLTD Pulau Terong; PLTD Pulau Pecong; PLTD Pulau Kasu	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas infrastruktur pembangkitan tenaga listrik PLTD di PLTD Belakang Padang; PLTD Pulau Terong; PLTD Pulau Pecong; PLTD Pulau Kasu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pemeliharaan fungsi dan kualitas pelayanan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik PLTD di PLTD Belakang Padang; PLTD Pulau Terong; PLTD Pulau Pecong; PLTD Pulau Kasu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.3.3	Rencana Pengembangan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung											
A.3.3.1	Transmisi Listrik											
	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik SUTM di Seluruh WP Belakang Padang	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Peningkatan Kualitas infrastruktur penyaluran tenaga listrik SUTM di Seluruh WP Belakang Padang	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	mantapan fungsi dan pelayanan infrastruktur penyaluran tenaga listrik SUTM di Seluruh WP Belakang Padang	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan fungsi dan kualitas pelayanan infrastruktur penyaluran tenaga listrik SUTM di Seluruh WP Belakang Padang	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.3.3.2	Distribusi Listrik											
1	Gardu Induk											
	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik Gardu Induk	0	0	0	0	0	0	+	-	0	1	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Peningkatan Kualitas infrastruktur penyaluran tenaga listrik Gardu Induk	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pemeliharaan fungsi dan kualitas pelayanan infrastruktur penyaluran tenaga listrik Gardu Induk	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Gardu Hubung											
	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik Gardu Hubung di Seluruh Gardu Hubung di WP Belakang Padang	0	0	0	0	0	0	+	-	0	1	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Peningkatan Kualitas infrastruktur penyaluran tenaga listrik Gardu Hubung di Seluruh Gardu Hubung di WP Belakang Padang	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemantapan fungsi dan pelayanan infrastruktur penyaluran tenaga listrik Gardu Hubung di Seluruh Gardu Hubung di WP Belakang Padang	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pemeliharaan fungsi dan kualitas pelayanan infrastruktur penyaluran tenaga listrik Gardu Hubung di Seluruh Gardu Hubung di WP Belakang Padang	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Gardu Distribusi											
	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik Gardu Distribusi	0	0	0	0	0	0	+	-	0	1	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Peningkatan Kualitas infrastruktur penyaluran tenaga listrik Gardu Distribusi	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemantapan fungsi dan pelayanan infrastruktur penyaluran tenaga listrik Gardu Distribusi	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pemeliharaan fungsi dan Kualitas pelayanan infrastruktur penyaluran tenaga listrik Gardu Distribusi	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.4	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi											
A.4.1	Rencana Pengembangan Jaringan Tetap											
1	Pengembangan dan peningkatan jaringan tetap Seluruh WP Belakang Padang											
	Jaringan kabel serat optic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Jaringan kabel darat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
												Terhadap Kondisi LH
	Jaringan kabel bawah tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Jaringan kabel bawah laut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.4.2	Rencana Pengembangan Jaringan Bergerak											
1	Pengembangan dan peningkatan jaringan bergerak di Seluruh WP Belakang Padang											
	Jaringan terestrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Jaringan satelit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Jaringan selular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel di Seluruh WP Belakang Padang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama di Seluruh WP Belakang Padang	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	Pengembangan jaringan layanan internet pada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	fasilitas umum di Seluruh WP Belakang Padang											Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.5	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air											
A.5.1	Rencana Pengembangan Prasarana Sumber Daya Air											
1	Penyusunan sistem informasi jaringan sumber daya air di Seluruh situ/ waduk/ embung/ daerah irigasi di WP Belakang Padang	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Sistem Jaringan Air bersih di Waduk Sekanak I; Waduk Sekanak II; Waduk Pulau Pemping; Waduk Pulau Lumba; Waduk Pulau Mecan											
	Pemanfaatan sumber air permukaan	+	+	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Penataan kawasan di sekitar sumber air permukaan	+	+	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemantauan kualitas sumber air permukaan	+	+	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan dan perlindungan sumber air permukaan	+	+	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Sistem Pengendalian Banjir											
	Pengembangan dan pembangunan sistem pengendalian banjir	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pemantapan sistem pengendali banjir berupa kolam retensi	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	Bangunan Sumber Daya Air											
	Pemantapan bangunan sumber daya air berupa waduk/embung	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pengembangan dan peningkatan fungsi pelayanan waduk/embung	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan fungsi pelayanan waduk/embung	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
A.6	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya											
A.6.1	Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum											
1	Unit Air Baku di Waduk Sekanak I berada di Pulau Sekanak; Waduk Sekanak II berada di Pulau Sekanak; Waduk Pulau Pemping berada di Pulau Pemping; Waduk Pulau Lumba, Waduk Pulau Mecan											
	Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan											
	a. Pembangunan unit air baku	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	b. Peningkatan kualitas/ Pengembangan unit air baku	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
												Terhadap Kondisi LH
	c. Pemantapan unit air baku	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	d. Pemeliharaan unit air baku	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan melalui pengolahan air laut menjadi air minum Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Pulau Belakang Padang	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Unit Produksi di IPA Sekanak I; IPA Sekanak II; IPA Pulau Pemping; IPA Pulau Mecan; IPA Embung Pulau Karas; IPA Embung Pulau Terong; IPA											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pulau Kasu; IPA Pulau Geranting; IPA Pulau Pecong											
	Pembangunan unit produksi	0	0	0	0	0	+	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Peningkatan kualitas unit produksi	0	0	0	0	0	+	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemantapan unit produksi	0	0	0	0	0	+	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan unit produksi	0	0	0	0	0	+	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Unit Pelayanan											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pembangunan unit pelayanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Peningkatan kualitas/ Pengembangan unit pelayanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemantapan unit pelayanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan unit pelayanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.6.2	Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)											
A.6.2.1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik											
1	Pemantapan bangunan Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	0	0	0	+	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Pengembangan dan peningkatan fungsi pelayanan Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	0	0	0	+	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Pemeliharaan fungsi pelayanan Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	0	0	0	+	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.6.2.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
1	Pemantapan bangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	0	0	0	+	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Pengembangan dan peningkatan fungsi pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	0	0	0	+	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Pemeliharaan fungsi pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	0	0	0	+	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.6.2.3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
1	Pemantapan bangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	0	0	0	+	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Pengembangan dan peningkatan fungsi pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	0	0	0	+	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Pemeliharaan fungsi pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	0	0	0	+	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.6.3	Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
1	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) di Kelurahan Tanjung Sari; Kelurahan Sekanak Raya; Kelurahan Pemping; Kelurahan Pecong											
	Penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	0	0	+	+	0	+	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	0	0	+	+	0	+	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Sosialisasi dan penyuluhan masyarakat dalam pengelolaan sampah	0	0	+	+	0	+	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Dukungan Peningkatan kinerja Bank Sampah	0	0	+	+	0	+	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Tempat Penampungan Sementara di Kelurahan Tanjung Sari; Kelurahan Sekanak Raya; Kelurahan Pemping; Kelurahan Pecong											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Permanen dan Bin Container	+	+	+	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Permanen dan Bin Container	+	+	+	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kelurahan Tanjung Sari Blok X.A.3	+	+	+	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.6.4	Rencana Pengembangan Jaringan Drainase											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
1	Jaringan Drainase Primer di Kelurahan Tanjung Sari; Kelurahan Sekanak Raya; Kelurahan Pemping											
	Pembangunan drainase primer	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Peningkatan kualitas/ Pengembangan drainase primer	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pemantapan drainase primer	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan drainase primer	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Jaringan Drainase Sekunder di Kelurahan Tanjung Sari; Kelurahan Sekanak Raya; Kelurahan Pemping											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pembangunan drainase sekunder	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Peningkatan kualitas/ Pengembangan drainase sekunder	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemantapan drainase sekunder	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pemeliharaan drainase sekunder	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Jaringan Drainase Tersier di Kelurahan Tanjung Sari; Kelurahan Sekanak Raya; Kelurahan Pemping											
	Pembangunan drainase tersier	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Peningkatan kualitas/ Pengembangan drainase tersier pada jalan local sekunder/ lingkungan	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemantapan drainase tersier	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan drainase tersier	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
4	Jaringan Drainase Lokal di Kelurahan Tanjung Sari; Kelurahan Sekanak Raya; Kelurahan Pemping											
	Pembangunan drainase lokal	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Peningkatan kualitas/ Pengembangan drainase lokal	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pemantapan drainase lokal	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan drainase lokal	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
A.6.5	Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya											
1	Jalur Evakuasi Bencana di Kelurahan Tanjung Sari; Kelurahan Sekanak Raya; Kelurahan Pemping											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pemantapan jalur evakuasi bencana	0	0	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan jalur evakuasi bencana	0	0	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Tempat Evakuasi di Kelurahan Tanjung Sari; Kelurahan Sekanak Raya; Kelurahan Pemping											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Penyediaan Lokasi Titik Kumpul	0	0	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Penyediaan Lokasi Tempat evakuasi Sementara	0	0	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Penyediaan Lokasi Tempat Evakuasi Akhir	0	0	+	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
3	Jalur Sepeda di Kelurahan Tanjung Sari; Kelurahan Sekanak Raya; Kelurahan Pemping											
	Pembangunan/Penyediaan jalur sepeda sesuai kebutuhan pada lokasi strategis pada ruas jalan utama	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Peningkatan kualitas jalur sepeda	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pemantapan pelayanan jalur sepeda	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan jalur sepeda	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	Jalur pejalan kaki di Kelurahan Tanjung Sari; Kelurahan Sekanak Raya; Kelurahan Pemping											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pembangunan/Penyediaan jalur pejalan kaki sesuai kebutuhan pada lokasi strategis	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Peningkatan kualitas jalur pejalan kaki	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemantapan pelayanan jalur pejalan kaki	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pemeliharaan jalur pejalan kaki	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
5	Pengaman Pantai di Pulau Tolop Besar; Pulau Tolop Kecil; Pulau Anak Sambu											
	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Tebing Pantai	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengamanan Tebing Pantai	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Pembangunan Tanggul Pantai	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pemeliharaan Tanggul Pantai	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B	PERWUJUDAN POLA RUANG											
B.1.	Perwujudan Zona Lindung											
B.1.1	Rencana Pengembangan Zona Badan Air											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
1	Inventarisasi dan Identifikasi badan air di Seluruh Badan air di WP Belakang Padang	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Penyusunan dan penetapan baku mutu air di Seluruh Badan air di WP Belakang Padang	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air di Seluruh Badan air di WP Belakang Padang	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
4	Pengendalian pencemaran air di Seluruh Badan air di WP Belakang Padang	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.1.2	Rencana Pengembangan Zona Perlindungan Setempat											
1	Inventarisasi dan identifikasi karakteristik kawasan perlindungan setempat	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Rehabilitasi kawasan perlindungan setempat	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
3	Pemeliharaan kawasan perlindungan setempat	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	Perlindungan kawasan perlindungan setempat	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.1.3	Rencana Pengembangan Zona Ruang Terbuka Hijau	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.1.3.1	Sub Zona Rimba Kota (RTH-1)											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
1	Inventarisasi dan identifikasi karakteristik kawasan rimba kota	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Pengembangan keanekaragaman hayati	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Pemeliharaan kawasan rimba kota untuk menjaga fungsi kelestarian hidrologis kota	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
4	Perlindungan kawasan rimba kota	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.1.3.2	Sub Zona Taman Kota (RTH-2)											
1	Inventarisasi dan identifikasi karakteristik taman kota	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Pembangunan Taman Kota	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
3	Peningkatan kualitas Taman Kota dan penambahan fungsi sosial	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	Pemeliharaan Taman kota	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.1.3.3	Sub Zona Taman Kecamatan (RTH-3)											
1	Inventarisasi dan identifikasi karakteristik taman kecamatan	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
2	Peningkatan kualitas dan penambahan fungsi sosial taman kecamatan	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Pembangunan Taman kecamatan	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	Pemeliharaan taman kecamatan	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.1.3.4	Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4)											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
1	Inventarisasi dan identifikasi karakteristik taman kelurahan	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Peningkatan kualitas dan penambahan fungsi sosial taman kelurahan	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Pembangunan Taman kelurahan	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
4	Pemeliharaan taman kelurahan	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.1.3.5	Sub Zona Pemakaman (RTH-7)											
1	Pemeliharaan kawasan Pemakaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Perlindungan kawasan Pemakaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.1.3.6	Sub Zona Jalur Hijau (RTH-8)											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
1	Penyediaan jalur hijau	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Penataan jalur hijau	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Pemeliharaan jalur hijau	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
4	Perlindungan jalur hijau	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.	Perwujudan Zona Budidaya											
B.2.1	Rencana Pengembangan Zona Badan Jalan (BJ)											
B.2.2	Rencana Pengembangan Zona Hutan Produksi											
B.2.2.1	Sub Zona Hutan Produksi Tetap											
1	Inventarisasi dan identifikasi karakteristik hutan produksi tetap	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
2	Perlindungan lahan kawasan hutan produksi tetap yang masih produktif	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Rehabilitasi dan pengembalian fungsi kawasan HP yang sudah tidak produktif (lahan didominasi semak belukar, lahan kosong, dan kebun campuran) kembali produktif	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	Pengelolaan kawasan HP dengan tetap mengacu pada asas konservasi tanah dan air serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
B.2.2.2	Sub Zona Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)											
1	Inventarisasi dan identifikasi karakteristik hutan produksi yang dapat dikonversi	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Perlindungan lahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang masih produktif	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Pemanfaatan kawasan HPK yang sudah tidak produktif (lahan didominasi semak belukar, lahan kosong, dan kebun campuran)	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
4	Pengelolaan kawasan HPK dengan tetap mengacu pada asas konservasi tanah dan air serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.3	Rencana Pengembangan Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (MG)											
1	pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
3	peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	peningkatan pengelolaan energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
5	pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
6	perlindungan kelestarian fungsi lingkungan hidup	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.3	Rencana Pengembangan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)											
1	pengembangan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	pembangunan infrastruktur penunjang industri	-	-	-	-	-	-	+	-	0	7	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
3	pengembangan prasarana pengolahan limbah yang mungkin dihasilkan oleh industri	+	+	0	+	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	optimalisasi perbaikan aspek lingkungan hidup untuk industri yang berkelanjutan	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.4	Rencana Pengembangan Zona Pariwisata (W)											
1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kegiatan Wisata											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata berstandar internasional	0	+	0	+	+	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pengembangan Pengelolaan Pariwisata	0	+	0	+	+	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Integrasi kegiatan wisata bahari dengan pemanfaatan ruang yang memiliki potensi strategis	0	+	0	+	+	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Peningkatan daya tarik wisata pada klaster Pulau Belakang Padang dan sekitarnya											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
	penataan kembali berbagai potensi dan kekayaan sumber daya alam, dan buatan serta menjaga keanekaragaman hayati secara terpadu dan berkelanjutan	0	+	0	+	+	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	0	+	0	+	+	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	Pengembangan edukasi dan partisipasi untuk wisatawan dan masyarakat setempat dalam Pemanfaatan kawasan pesisir sebagai daya tarik wisata	0	+	0	+	+	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
3	Peningkatan even rutin untuk mendukung kegiatan pariwisata yang mendorong perekonomian lokal dan menangkap tren wisata bahari dan melayu di Pulau Belakang Padang											
	Pengembangan kawasan tematik perkotaan yang berfungsi sebagai objek wisata buatan yang mendukung ekonomi kota	0	+	0	+	+	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
	pengembangan objek, daya tarik, dan usaha-usaha terkait bidang wisata yang dikembangkan untuk memberi manfaat bagi ekonomi local	0	+	0	+	+	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
4	Pemasaran wisata dalam konsep tourism, trade dan investmen (TTI)	0	+	0	+	+	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.5	Rencana Pengembangan Zona Perumahan (R)											
B.2.5.1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)											
1	Pemutakhiran profil kawasan permukiman kumuh	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Pengembangan hunian vertikal	-	-	-	0	-	-	+	0	0	5	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
3	Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	Penyiapan lahan untuk permukiman baru	-	-	-	0	-	-	+	0	0	5	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
5	Sosialisasi hunian sehat	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
6	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
B.2.5.2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)											
1	Penataan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Penyediaan Dukungan PSU Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan BPS	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
4	Penyiapan lahan untuk permukiman baru	-	-	-	0	-	-	+	+	0	5	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
5	Sosialisasi hunian sehat	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
6	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.6	Rencana Pengembangan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
B.2.6.1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)											
1	Pemantapan dan pengembangan Sarana Pendidikan SMK berbasis kemaritiman di Kelurahan Tanjung Sari	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Pembangunan Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	-	0	0	0	-	0	0	0	0	2	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Pemeliharaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
4	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan di Kelurahan Tanjung Sari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.6.2	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)											
1	Penambahan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan skala Kelurahan Balai/Klinik Kesehatan di Kelurahan Tanjung Sari; Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Kasu, Kelurahan Kasu; Pulau Terong, Kelurahan Pulau Terong	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
2	Penambahan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan skala Kelurahan Puskesmas Pembantu di Kelurahan Tanjung Sari	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Pembangunan Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	-	0	0	0	-	0	0	0	0	2	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	Pemeliharaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
5	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.6.3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)											
1	Penambahan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan skala RW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Penambahan dan rehabilitasi fasilitas peribadatan skala RW (Mushola)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
3	Pembangunan Sarana Pelayanan Umum Skala RW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	Pemeliharaan Sarana Pelayanan Umum Skala RW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
5	Peningkatan efektivitas kegiatan rukun warga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.7	Rencana Pengembangan Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
1	Pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau baru	-	-	-	0	-	-	0	0	0	5	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Revitalisasi Ruang Terbuka Non Hijau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Pemeliharaan Ruang Terbuka Non Hijau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
4	Penataan kembali lapangan olahra	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.8	Rencana Pengembangan Zona Campuran (C)											
B.2.8.1	Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)											
1	Pembangunan Campuran Intensitas Menengah/Sedang (Perumahan, kegiatan komersial, perkantoran, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial)	-	-	-	0	-	-	0	0	0	5	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
2	Penataan dan peningkatan kualitas Campuran Intensitas Menengah/Sedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	perencanaan Kawasan Berorientasi Transit (terintegrasi dengan fasilitas intermoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	Pemeliharaan Campuran Intensitas Menengah/Sedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.9	Rencana Pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
B.2.9.1	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)											
1	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP	-	-	-	0	-	-	0	0	0	5	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Pembenahan sistem perpikiran dan lokasi PKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
4	Penyediaan fasilitas pendukung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
5	Upaya perlindungan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP dari keberadaan PKL Liar	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
6	Pemeliharaan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.9.2	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP (K-3)											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
1	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP	-	-	-	0	-	-	0	0	0	5	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Pembenahan sistem perpikiran dan lokasi PKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
4	Penyediaan fasilitas pendukung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
5	Upaya perlindungan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP dari keberadaan PKL Liar	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
6	Pemeliharaan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.10	Rencana Pengembangan Zona Perkantoran (KT)											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
1	Pembangunan Kawasan Perkantoran	-	-	-	0	-	-	0	0	0	5	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Perkantoran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Penyediaan fasilitas pendukung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
4	Upaya perlindungan Kawasan Perkantoran dari keberadaan PKL Liar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
5	Pemeliharaan Kawasan Perkantoran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.11	Rencana Pengembangan Zona Peruntukan Lainnya (PL)											
B.2.11.1	Sub Zona Pergudangan (PL-6)											
1	Pembangunan Kawasan Pergudangan	-	-	-	0	-	-	0	0	0	5	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
2	Penataan kawasan Pergudangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Penyediaan fasilitas pendukung Pergudangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	Pemeliharaan Kawasan Pergudangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.12	Rencana Pengembangan Zona Pengelolaan Persampahan (PP)											

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
1	Pembangunan Kawasan Pengelolaan Persampahan	-	-	+	0	-	-	0	0	0	4	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Penataan kawasan Pengelolaan Persampahan	+	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Penyediaan fasilitas pendukung Pengelolaan Persampahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
4	Pemeliharaan Kawasan Pengelolaan Persampahan	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.13	Rencana Pengembangan Zona Transportasi (TR)											
1	Pembangunan Kawasan Transportasi	-	-	0	0	-	-	0	0	0	4	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
2	Penataan kawasan Transportasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang

2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
3	Penyediaan fasilitas pendukung Kawasan Transportasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	Pemeliharaan Kawasan Transportasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
B.2.14	Rencana Pengembangan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)											
1	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	-	-	0	0	-	0	0	0	0	3	Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	DDDTLH	Jasa Ekosistem	Kebencanaan	Mutu SDA	Ken. hayati	Perubahan Iklim	Kemisikinan	Risiko Kesehatan	Hukum Adat	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH / Tidak)
2	Penataan kawasan Pertahanan dan Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
3	Penyediaan fasilitas pendukung Pertahanan dan Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH
4	Pemeliharaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi LH

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

Tabel III-18 Identifikasi KRP terhadap Isu PB Prioritas

No	KRP	Pengelolaan Sampah	Keterbatasan air bersih	Risiko bencana pesisir	konversi lahan bakau	Pengembangan Pariwisata	eksploitasi ikan ilegal	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Memerlukan Kajian Muatan KLHS/Tidak)
1	Pembangunan Kawasan PL Kecamatan di Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu	-	-	-	0	0	0	3	Memerlukan Kajian 6 Muatan KLHS
2	Pembangunan kawasan PL di Kelurahan Pulau Mecan, Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Pemping, Kel. Pemping; Pulau Terong, Kel. Pulau Terong; Pulau Pecong, Kel. Pecong	-	-	-	0	0	0	3	Memerlukan Kajian 6 Muatan KLHS
3	Pembangunan Jaringan Jalan arteri sekunder di Ruas jalan yang menghubungkan Pulau Batam – Pulau Tengah – Pulau Boyan – Tanjung Kubu – Pulau Teluk Bakau, Pulau Lumba, Pulau Surai Cundung – Pulau Uban – Pulau Tandur – Pulau Panjang – Pulau Bulat – Pulau Kepala Jeri – Pulau Anak Ladan – Pulau Ladan	0	0	0	0	+	0	0	
4	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa depo minyak dan gas (migas) di Kelurahan Pemping	0	0	-	-	0	0	2	Memerlukan Kajian 6 Muatan KLHS
5	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen di Kecamatan Belakang Padang	0	0	-	-	0	0	2	Memerlukan Kajian 6 Muatan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	Pengelolaan Sampah	Keterbatasan air bersih	Risiko bencana pesisir	konversi lahan bakau	Pengembangan Pariwisata	eksploitasi ikan ilegal	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Memerlukan Kajian Muatan KLHS/Tidak)
6	pembangunan infrastruktur penunjang industri	0	0	-	0	0	0	1	
7	Pengembangan hunian vertikal	-	-	-	0	0	0	3	Memerlukan Kajian 6 Muatan KLHS
8	Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-1)	-	-	-	0	0	0	3	Memerlukan Kajian 6 Muatan KLHS
9	Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-2)	-	-	-	0	0	0	3	Memerlukan Kajian 6 Muatan KLHS
10	Pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau baru	-	0	0	0	+	0	1	
11	Pembangunan Campuran Intensitas Menengah/Sedang (Perumahan, kegiatan komersial, perkantoran, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial)	-	-	-	-	+	0	4	Memerlukan Kajian 6 Muatan KLHS
12	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP	-	-	-	-	+	0	4	Memerlukan Kajian 6 Muatan KLHS
13	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP	-	-	-	-	+	0	4	Memerlukan Kajian 6 Muatan KLHS
14	Pembangunan Kawasan Perkantoran	-	-	-	-	0	0	4	Memerlukan Kajian 6 Muatan KLHS
15	Pembangunan Kawasan Pergudangan	-	-	-	-	0	0	4	Memerlukan Kajian 6 Muatan KLHS, tapi tidak ada data spasial

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

No	KRP	Pengelolaan Sampah	Keterbatasan air bersih	Risiko bencana pesisir	konversi lahan bakau	Pengembangan Pariwisata	eksploitasi ikan ilegal	Jumlah Dampak Negatif	Keterangan (Memerlukan Kajian Muatan KLHS/Tidak)
16	Pembangunan Kawasan Pengelolaan Persampahan	+	0	0	0	+	0		
18	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	+	+	4	Memerlukan Kajian 6 Muatan KLHS

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RDTR WP Belakang Padang, 2021

3.6 Analisis 6 Muatan KLHS Terhadap KRP Berpengaruh

Hasil identifikasi kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang berdampak terhadap lingkungan hidup di Wilayah Perencanaan Belakang Padang, selanjutnya dilakukan analisis enam muatan KLHS. Berdasarkan identifikasi dan analisis, KRP yang berdampak lingkungan hidup dalam KLHS RDTR WP Belakang Padang, yaitu:

1. KRP Struktur Ruang
 - a. Pembangunan Kawasan PL Kecamatan di Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu;
 - b. Pembangunan kawasan PL di Kelurahan Pulau Mecan, Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Pemping, Kel. Pemping; Pulau Terong, Kel. Pulau Terong; Pulau Pecong, Kel. Pecong;
 - c. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa depo minyak dan gas (migas) di Kelurahan Pemping;
 - d. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen di Kecamatan Belakang Padang;
2. KRP Pola Ruang
 - a. Pengembangan hunian vertikal;
 - b. Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-1);
 - c. Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-2);
 - d. Pembangunan Campuran Intensitas Menengah/Sedang (Perumahan, kegiatan komersial, perkantoran, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial);
 - e. Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP;
 - f. Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP;
 - g. Pembangunan Kawasan Perkantoran;
 - h. Pembangunan Kawasan Pergudangan
 - i. Pembangunan Kawasan Transportasi;
 - j. Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

KRP berdampak lingkungan hidup selanjutnya dianalisis menggunakan enam muatan KLHS, yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 16 dan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2016 Pasal 13, yang didalamnya meliputi:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

3.6.1 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

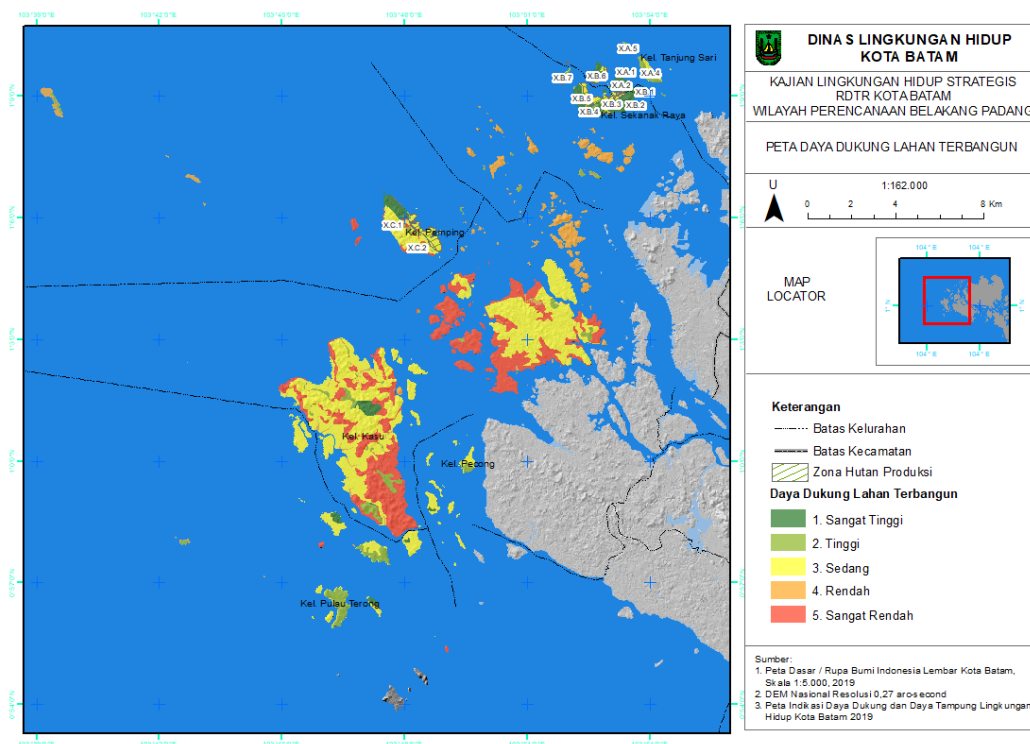
3.6.1.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Terbangun

Daya tampung lahan terbangun menggunakan basis data jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup. Terdapat lima klasifikasi jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Semakin tinggi jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup maka semakin tinggi pula daya dukung lahan terbangun pada wilayah tersebut. Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup sangat tinggi mendukung wilayah terbangun dengan ambang 80%, Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup tinggi mendukung wilayah terbangun dengan ambang 70%, Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup sedang mendukung wilayah terbangun dengan ambang 50%, Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup rendah mendukung wilayah terbangun dengan ambang 30%, dan Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup sangat rendah mendukung wilayah terbangun dengan ambang 20%, Formula yang digunakan untuk menghitung daya tampung lahan terbangun yaitu:

$$D_t : \frac{(A_{C1ST} \times 80\%) + (A_{C1T} \times 70\%) + (A_{C1S} \times 50\%) + (A_{C1R} \times 30\%) + (A_{C1SR} \times 20\%)}{A_{total}}$$

Di mana D_t merupakan daya tampung lahan terbangun, A yaitu luas dengan satuan hektar, C1 ST merupakan jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup sangat tinggi, C1 T merupakan jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup tinggi, C1 S merupakan jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup sedang, C1 R merupakan jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup rendah, dan C1 SR merupakan jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup sangat rendah.

Wilayah Perencanaan Belakang Padang terdiri dari 14 blok. Blok inilah yang digunakan didalam perhitungan daya tampung lahan terbangun pada setiap bloknya. Dari 14 blok KRP ini terpusat pada beberapa kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sari, Kelurahan Sekanak Raya, dan Kelurahan Pemping. Daya dukung lahan terbangun dengan luasan terbesar adalah Kelurahan Tanjung Sari Blok X.A.4, yaitu seluas 2805,63 hektar. Gambar III-4 menunjukkan peta daya dukung lahan terbangun di WP Belakang Padang, dan luasan untuk setiap blok KRP disampaikan pada Table III-19.



Gambar III-4 Peta Daya Dukung Lahan Terbangun WP Belakang Padang

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

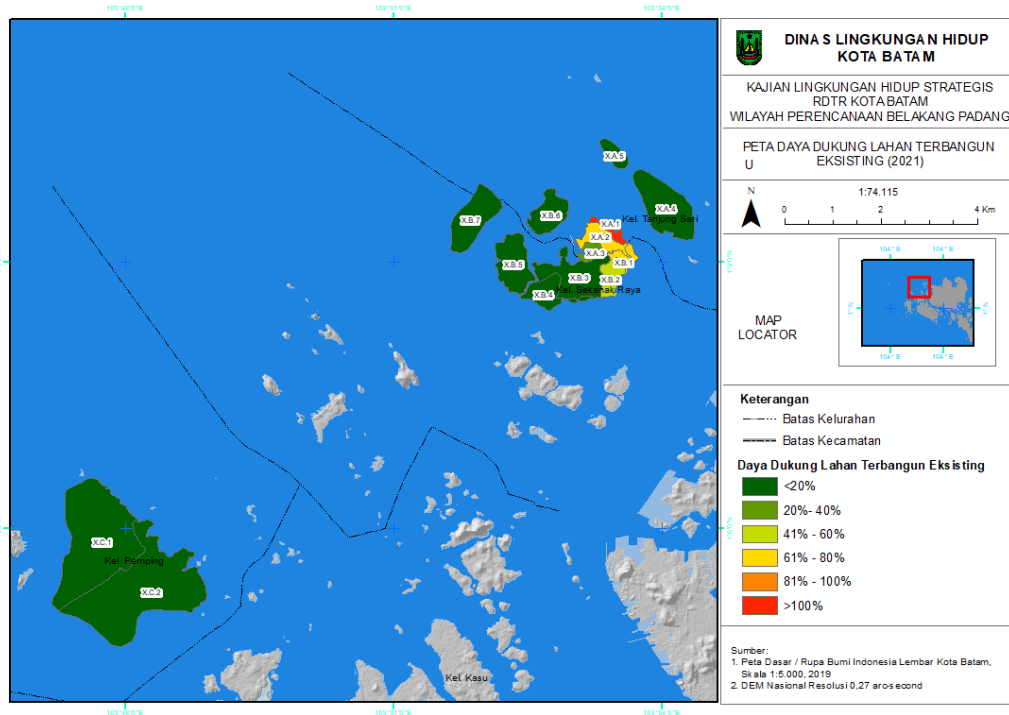
Tabel III-19 Luas Daya Dukung Lahan Terbangun di WP Belakang Padang

Kelurahan	Blok	Kelas Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tingga dan Ruang Hidup					Luas (ha)	Daya Dukung Lahan Terbangun (ha)
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah		
Tanjung Sari	X.A.1	10,82					10,82	8,65
	X.A.2	32,85					32,85	26,28
	X.A.4		3921,37	121,35			4042,72	2805,63
	X.A.5		640,83	19,65			660,48	458,41
	X.B.6	29,58		20,15			49,74	33,74
Sekanak Raya	X.A.3	4,41		9,08	0,85		14,35	8,33
	X.B.1	15,26					15,26	12,20
	X.B.2	27,93					27,93	22,34
	X.B.3	81,67	1,87	51,58	2,80		88,88	93,27
	X.B.4	32,28	7,00	2,55			41,83	32,00
	X.B.5	43,56		27,15			70,71	48,43
	X.B.7	0,67	7,92	8,04			16,62	10,10
Pemping	X.C.1	61,93	13,41			11,77	87,11	58,96
	X.C.2		3,42	165,78		32,52	201,73	85,32

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS WP Belakang Padang, 2021

Perhitungan daya tampung lahan terbangun disusun menggunakan dua skenario, yaitu skenario daya tampung lahan terbangun saat ini (tahun 2021) dan daya tampung lahan terbangun rencana (tahun 2042). Pada skenario pertama menggunakan data peta dasar tutupan lahan tahun 2021, sementara daya tampung rencana menggunakan data rencana zona budidaya terbangun dari drat pola ruang RDTR WP Sungai Beduk. Gambar III-5 menunjukkan daya tampung lahan terbangun tahun 2021, sementara daya tampung lahan terbangun rencana ditunjukkan pada Gambar III-6.

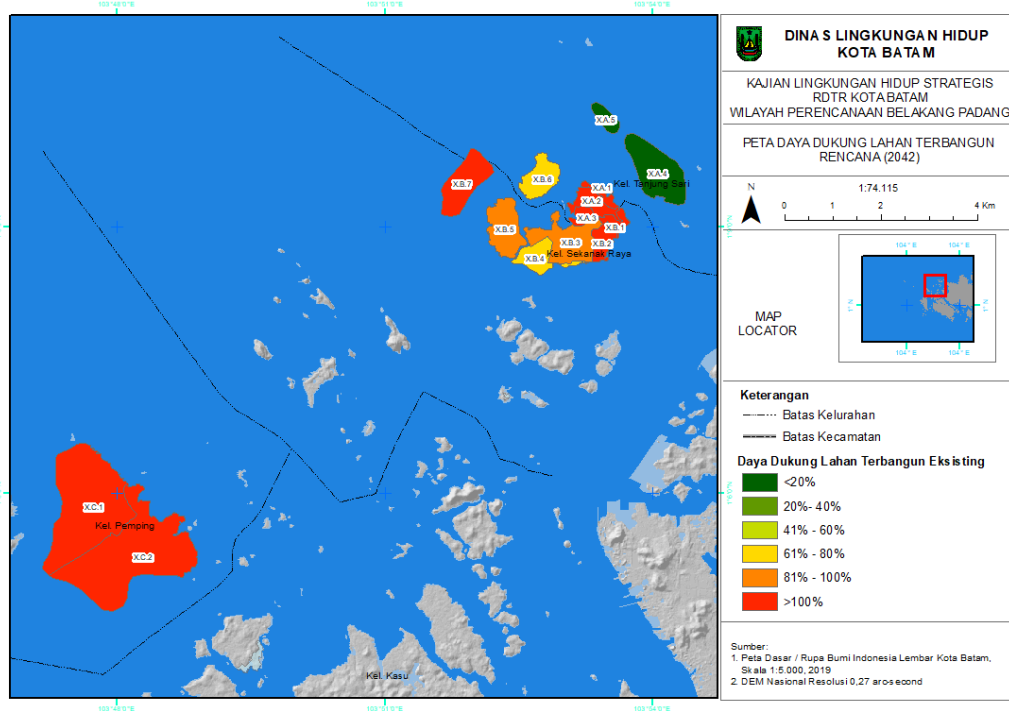
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042



Gambar III-5 Peta Status Daya Tampung Lahan Terbangun Tahun 2021

Terdapat daya tampung lahan terbangun saat ini yang sudah terlampaui yaitu pada Kelurahan Tanjung Sari Blok X.A.1 dan X.A.2, serta Kelurahan Sekanak Raya Blok X.B.1. Kelurahan Tanjung Sari Blok X.A.1 termasuk pada persentase lahan terbangun melebihi 100%, yaitu 111%, sementara pada Blok X.A.2 seluas 76%. Kelurahan Sekanak Raya termasuk pada persentase lahan terbangun melebihi 60%, yaitu seluas 69%. Dominasi blok perencanaan di WP Belakang Padang berada pada status belum terlampaui, namun dalam perencanaannya dibutuhkan pertimbangan pada tiga blok yang termasuk melampaui 60% dari status lahan terbangun eksisting.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042



Gambar III-6 Peta Status Daya Tampung Lahan Terbangun Tahun 2042

Daya tampung lahan terbangun berdasarkan rencana pola ruang RDTR WP Belakang Padang yang menunjukkan status terlampaui terdapat pada 11 blok dari 14 blok, yang secara detail ditunjukkan pada Tabel III-20. Mengingat hal tersebut, maka dibutuhkan strategi khusus dalam pembangunan yang direncanakan untuk WP Belakang Padang.

Tabel III-20 Status Daya Tampung Lahan Terbangun WP Belakang Padang

Kelurahan	Blok	Daya Dukung Lahan Terbangun (ha)	luas lahan terbangun (ha)		Persentase Lahan Terbangun Terhadap Daya Tampung (%)		Status	
			Eksisting	Rencana	Eksisting	Rencana	Eksisting	Rencana
Tanjung Sari	X.A.1	8,65	9,59	10,82	111	125	Terlampaui	Terlampaui
	X.A.2	26,28	19,89	32,62	76	124	Belum Terlampaui	Terlampaui
	X.A.4	2805,63	19,23	106,20	1	4	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
	X.A.5	458,41	0,00	19,52	0	4	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

Kelurahan	Blok	Daya Dukung Lahan Terbangun (ha)	luas lahan terbangun (ha)		Persentase Lahan Terbangun Terhadap Daya Tampung (%)		Status	
			Eksisting	Rencana	Eksisting	Rencana	Eksisting	Rencana
	X.B.6	33,74	0,00	23,42	0	69	Belum Terlampaui	Terlampaui
Sekanak Raya	X.A.3	8,33	2,49	12,13	30	146	Belum Terlampaui	Terlampaui
	X.B.1	12,20	8,36	34,50	69	283	Belum Terlampaui	Terlampaui
	X.B.2	22,34	9,29	27,40	42	123	Belum Terlampaui	Terlampaui
	X.B.3	93,27	9,24	84,06	10	90	Belum Terlampaui	Terlampaui
	X.B.4	32,00	5,18	23,49	16	73	Belum Terlampaui	Terlampaui
	X.B.5	48,43	0,00	47,66	0	98	Belum Terlampaui	Terlampaui
	X.B.7	10,10	0,00	70,71	0	700	Belum Terlampaui	Terlampaui
Pemping	X.C.1	58,96	5,42	284,11	9	482	Belum Terlampaui	Terlampaui
	X.C.2	85,32	0,00	244,99	0	287	Belum Terlampaui	Terlampaui

3.6.1.2 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Terhadap KRP Berpengaruh

Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi salah satu muatan lingkungan hidup dalam menentukan rekomendasi lingkungan hidup dalam menentukan rekomendasi lingkungan terhadap 13 KRP yang berdampak terhadap lingkungan, menggunakan analisis daya tampung lahan terbangun pada WP Belakang Padang. Tabel III-21 menunjukkan detail daya tampung lahan terbangun pada 13 KRP berpengaruh.

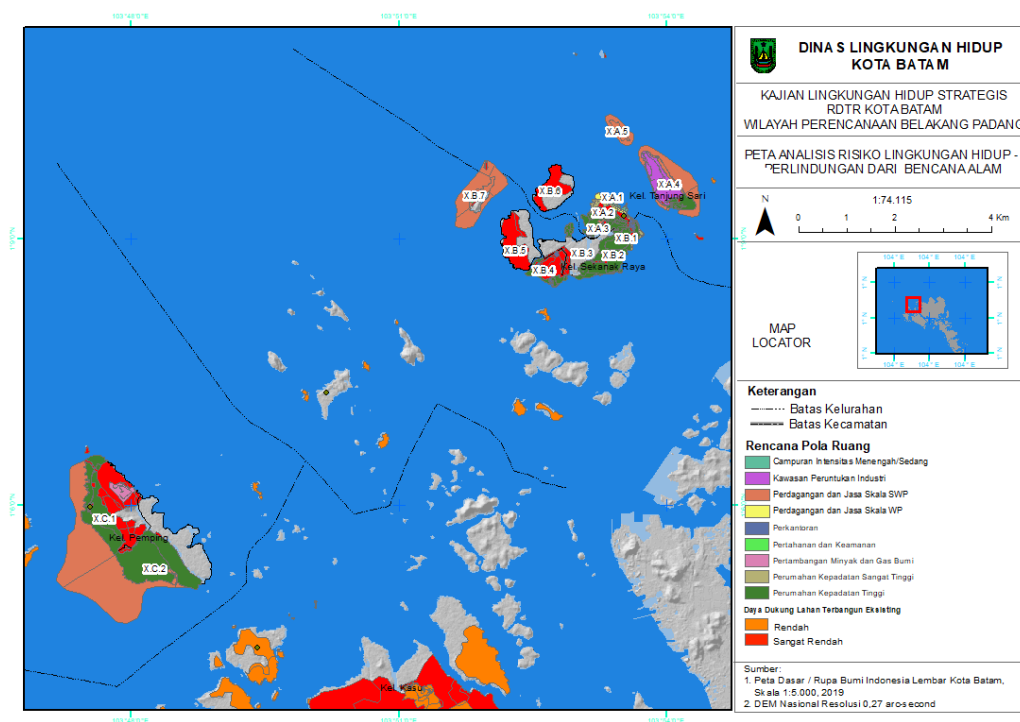
Tabel III-21 Analisis KRP Berdampak Lingkungan terhadap daya dukung lingkungan hidup

No	KRP	Daya Dukung Lahan Terbangun
1	Pembangunan Kawasan PL Kecamatan di Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu	Berada pada daya tampung lahan terlampaui di Blok X.A.1 Kel. Tanjung Sari dan jasa pendukung tempat tinggal dan ruang hidup kelas sedang pada Blok X.C.1. Kel. Kasu.
2	Pembangunan kawasan PL di Kelurahan Pulau Mecan, Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Pemping, Kel. Pemping; Pulau Terong, Kel. Pulau Terong; Pulau Pecong, Kel. Pecong	Berada pada daya tampung lahan terlampaui di Blok X.C.1 Pulau Pemping, Kel. Pemping, dan lainnya berada diluar Jasa Pendukung Lahan dan Tempat Tinggal kelas sedang, yaitu pada Kel. Pulau Terong, Kel. Pecong, Kel. Kasu; dan kelas rendah pada Kel. Sekanak Raya.
3	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa depo minyak dan gas (migas) di Kelurahan Pemping	Berada pada daya tampung lahan terlampaui pada blok X.C.1 Kelurahan Pemping
4	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen di Kecamatan Belakang Padang	Berada pada daya tampung lahan terlampaui pada blok X.C.1 Kelurahan Pemping
5	Pengembangan hunian vertikal	Berada pada daya tampung lahan terlampaui pada blok X.A.2
6	Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-1)	Berada pada daya tampung lahan terlampaui pada blok X.B.1
7	Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-2)	Berada pada daya tampung lahan terlampaui pada blok X.A.2; X.A.3; X.B.1; X.B.2; X.C.1; X.C.2; Daya Tampung hampir terlampaui pada blok X.B.3
8	Pembangunan Campuran Intensitas Menengah/Sedang (Perumahan, kegiatan komersial, perkantoran, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial)	Berada pada daya tampung lahan terlampaui pada blok X.A.1
9	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP	Berada pada daya tampung lahan terlampaui pada blok X.A.1, X.A.2
10	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP	Berada pada daya tampung lahan terlampaui pada blok X.A.1; X.A.3; X.B.7; X.C.1; X.C.2
11	Pembangunan Kawasan Perkantoran	Berada pada daya tampung lahan terlampaui pada blok X.A.2, X.B.1; X.B.2;

No	KRP	Daya Dukung Lahan Terbangun
		X.C.1 dan daya tampung hampir terlampaui pada blok X.B.3
12	Pembangunan Kawasan Pergudangan	Tidak terdapat pada data spasial
13	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Berada pada daya tampung lahan terlampaui pada blok X.B.7

3.6.2 Analisis Risiko Lingkungan Hidup terhadap KRP Berpengaruh

Analisis risiko terhadap bencana alam di WP Belakang Padang menggunakan analisis spasial dari struktur ruang dan pola ruang di WP Belakang Padang dengan jasa perlindungan dari bencana alam. Pada Gambar III-7 terlihat pada 14 blok. Beberapa blok yang didominasi memiliki kelas jasa perlindungan terhadap bencana alam sangat rendah berada pada Blok X.B.4; X.B.5; X.B.6; dan X.C.1. Semakin tinggi jasa ekosistem perlindungan bencana alam di WP Belakang Padang, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung perikehidupan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Begitupun sebaliknya. Tabel III-22 menunjukkan analisis KRP berdampak lingkungan terhadap risiko bencana alam.



Gambar III-7 Peta perlidungan terhadap bencana alam di WP Belakang Padang

Tabel III-22 Analisis KRP Berdampak terhadap Jasa Perlindungan terhadap bencana alam di WP Belakang Padang

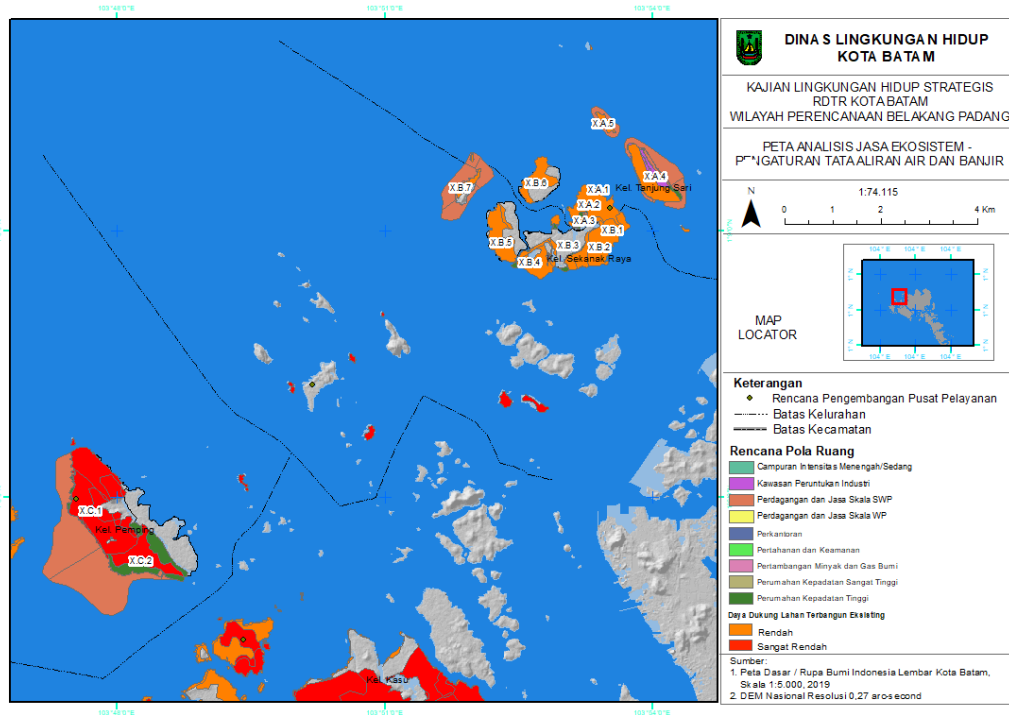
No	KRP	Risiko Bencana Alam
1	Pembangunan Kawasan PL Kecamatan di Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu	Berada pada Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam kelas sangat rendah di Blok X.A.1 dan kelas rendah pada Kel. Kasu
2	Pembangunan kawasan PL di Kelurahan Pulau Mecan, Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Pemping, Kel. Pemping; Pulau Terong, Kel. Pulau Terong; Pulau Pecong, Kel. Pecong	Berada pada Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam kelas sangat rendah di Blok X.C.1 P. Pemping dan kelas rendah pada Kel. Kasu; Kelas Rendah pada P. Pecong
3	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa depo minyak dan gas (migas) di Kelurahan Pemping	Berada pada Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam kelas sangat rendah di Blok X.C.1
4	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen di Kecamatan Belakang Padang	Berada pada Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam kelas sangat rendah di Blok X.C.1
5	Pengembangan hunian vertikal	Berada pada Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam kelas sangat rendah di Blok X.A.2
6	Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-1)	Berada pada Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam kelas sangat rendah di Blok X.B.1
7	Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-2)	Berada dominan pada Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam kelas sangat rendah di Blok X.A.2; X.A.3; X.B.1; X.B.2; X.C.1; X.C.2; X.B.3
8	Pembangunan Campuran Intensitas Menengah/Sedang (Perumahan, kegiatan komersial, perkantoran, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial)	Berada pada Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam kelas sangat rendah di Blok X.A.1

No	KRP	Risiko Bencana Alam
9	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP	Berada pada Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam kelas sangat rendah di Blok X.A.1 dan X.A.2
10	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP	Berada pada Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam kelas sangat rendah di Blok X.A.3; X.A.5; dan X.A.2; dan berada pada kawasan perairan pesisir/lautan yaitu pada Blok X.A.4; X.C.2 dan X.C.1
11	Pembangunan Kawasan Perkantoran	Berada pada Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam kelas sangat rendah di Blok X.A.2, X.B.1; X.B.2; X.C.1; X.B.3
12	Pembangunan Kawasan Pergudangan	Tidak terdapat pada data spasial
13	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Berada pada Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam kelas sangat rendah di Blok X.B.7

3.6.3 Analisis Jasa Ekosistem terhadap KRP Berpengaruh

Analisis jasa ekosistem yang digunakan dalam hal ini adalah Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di WP Belakang Padang. Secara operasional, didalam jasa ekosistem ini mengandung analisis siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air yang dibatasi pada setiap kategori penggunaan lahan di WP Belakang Padang. Secara detail analisis Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di WP Belakang Padang dan statusnya terhadap KRP Berpengaruh disajikan pada Gambar III-8 dan Tabel III- 23.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042



Gambar III-8 Peta kelas Jasa ekosistem terhadap KRP berdampak di WP Belakang Padang

Tabel III-23 Analisis KRP Berdampak terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem

No	KRP	Jasa Ekosistem
1	Pembangunan Kawasan PL Kecamatan di Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu	Berada pada Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir kelas rendah di Blok X.A.1; dan kelas sangat rendah di Kel. Kasu
2	Pembangunan kawasan PL di Kelurahan Pulau Mecan, Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Pemping, Kel. Pemping; Pulau Terong, Kel. Pulau Terong; Pulau Pecong, Kel. Pecong	Berada pada Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir kelas sangat rendah di Blok X.C.1 P. Pemping; kelas rendah di Kel. Pecong
3	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa depo minyak dan gas (migas) di Kelurahan Pemping	Berada pada Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir kelas sangat rendah di Blok X.C.1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

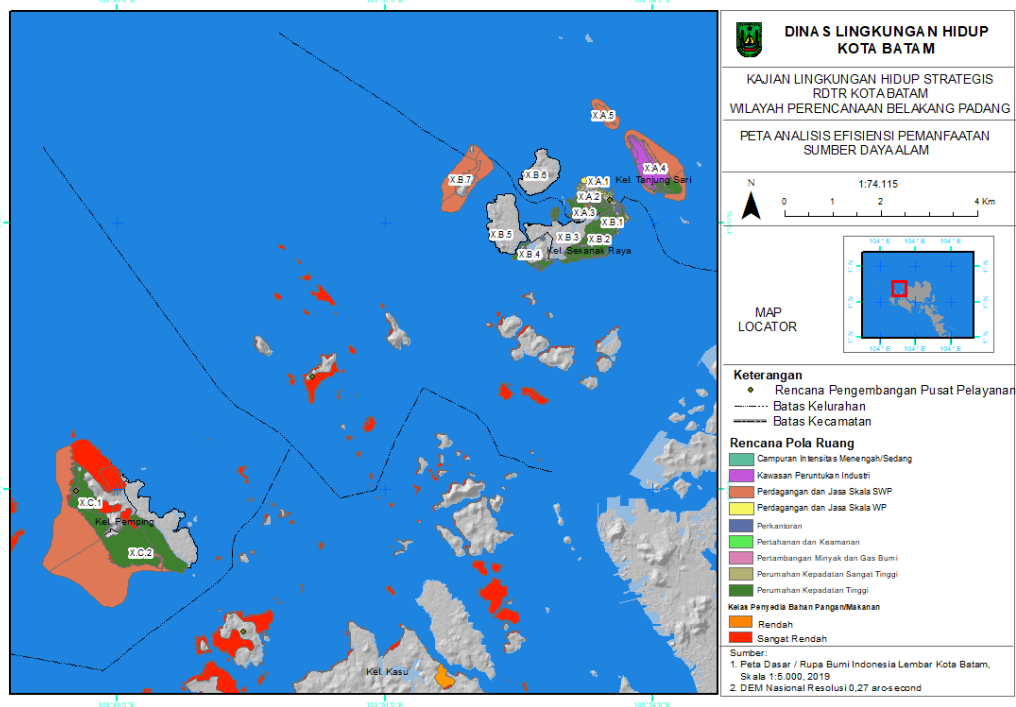
4	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen di Kecamatan Belakang Padang	Berada pada Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir kelas sangat rendah di Blok X.C.1
5	Pengembangan hunian vertikal	Berada pada Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir kelas sangat rendah di Blok X.A.2
6	Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-1)	Berada pada Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir kelas sangat rendah di Blok X.B.1
7	Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-2)	Berada pada Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir kelas sangat rendah di Blok X.C.1 dan X.C.2; dan kelas rendah di blok X.A.2; X.A.3; X.A.4; X.B.1; X.B.2;X.B.3; X.B.4
8	Pembangunan Campuran Intensitas Menengah/Sedang (Perumahan, kegiatan komersial, perkantoran, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial)	Berada pada Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir kelas rendah di Blok X.A.1
9	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP	Berada pada Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir kelas rendah di Blok X.A.1 dan X.A.2
10	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP	Berada dominan pada Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir kelas rendah di Blok X.A.3; X.A.4; X.A.5; X.A.7; dan berada pada kawasan perairan pesisir/lautan yaitu pada blok X.C.1 dan X.C.2
11	Pembangunan Kawasan Perkantoran	Berada pada Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir kelas sangat rendah di Blok X.C.1 dan kelas rendah di Blok X.A.2; X.B.1; X.B.3; X.B.4
12	Pembangunan Kawasan Pergudangan	Tidak terdapat pada data spasial
13	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Berada pada Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir kelas sangat rendah di Blok X.B.7

3.6.4 Efisiensi SDA

Analisis efisiensi Sumber Daya Alam menggunakan Jasa Penyedia Bahan Pangan/Makanan, yang didalamnya melingkupi hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan dan hasil peternakan. Analisis KRP berdampak lingkungan dengan penampalan rencana

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042

pola ruang dan struktur ruang berdampak dengan kelas jasa penyedia bahan pangan/makanan di WP Belakang Padang. Secara detail ditunjukkan pada Gambar III-9 dan Tabel III-24 dibawah ini.



Gambar III-9 Peta kelas efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam terhadap KRP berdampak di WP Belakang Padang

Tabel III-24 Analisis KRP Berdampak terhadap efisiensi Sumber daya alam di WP Belakang Padang

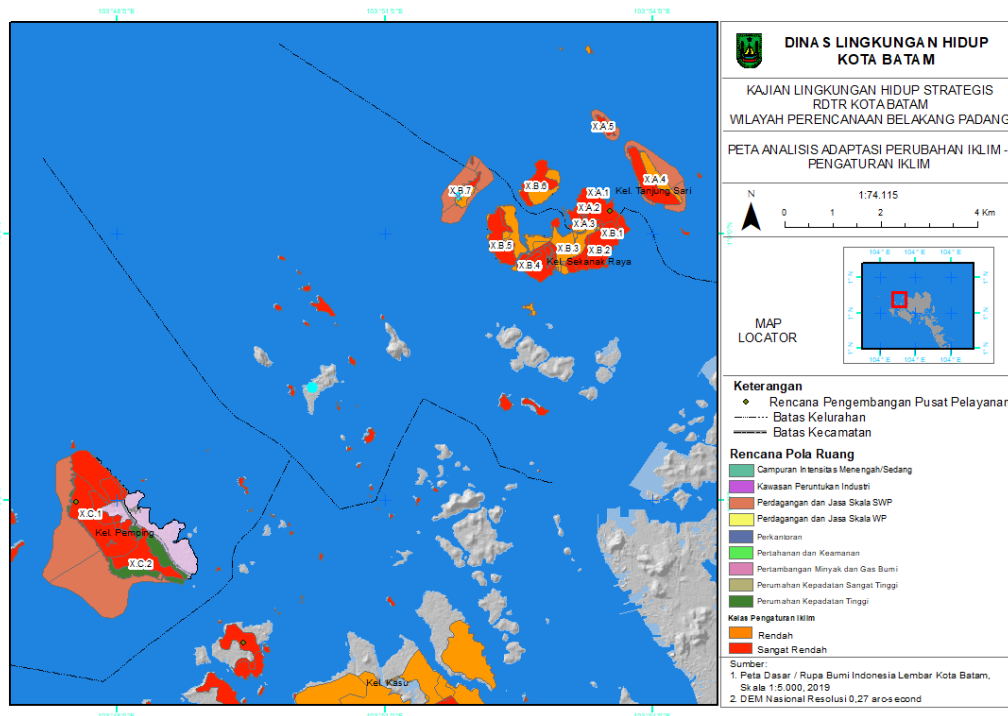
No	KRP	SDA
1	Pembangunan Kawasan PL Kecamatan di Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu	Berada diluar Jasa Penyedia Pangan kelas rendah dan sangat rendah
2	Pembangunan kawasan PL di Kelurahan Pulau Mecan, Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Pemping, Kel. Pemping; Pulau Terong, Kel. Pulau Terong; Pulau Pecong, Kel. Pecong	Berada pada Jasa Penyedia Bahan Pangan kelas sangat rendah di Pulau Mecan Kel. Sekanak Raya
3	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa depo minyak dan gas (migas) di Kelurahan Pemping	Berada pada Jasa Penyedia Bahan Pangan kelas sangat rendah di Blok X.C.1

No	KRP	SDA
4	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen di Kecamatan Belakang Padang	Berada pada Jasa Penyedia Bahan Pangan kelas sangat rendah di Blok X.C.1
5	Pengembangan hunian vertikal	Berada diluar Jasa Penyedia Pangan kelas rendah dan sangat rendah
6	Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-1)	Berada diluar Jasa Penyedia Pangan kelas rendah dan sangat rendah
7	Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-2)	Sebagian kecil berada pada Jasa Penyedia Bahan Pangan kelas sangat rendah di Blok X.C.1 dan X.C.2
8	Pembangunan Campuran Intensitas Menengah/Sedang (Perumahan, kegiatan komersial, perkantoran, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial)	Berada diluar Jasa Penyedia Pangan kelas rendah dan sangat rendah
9	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP	Berada diluar Jasa Penyedia Pangan kelas rendah dan sangat rendah
10	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP	Berada diluar Jasa Penyedia Pangan kelas rendah dan sangat rendah
11	Pembangunan Kawasan Perkantoran	Berada pada Jasa Penyedia Bahan Pangan kelas sangat rendah di Blok X.C.1
12	Pembangunan Kawasan Pergudangan	Tidak terdapat pada data spasial
13	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Berada diluar Jasa Penyedia Pangan kelas rendah dan sangat rendah

3.6.5 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Analisis Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim menggunakan pengkelasan Jasa Pengaturan Iklim di WP Belakang Padang, yang didalamnya terdapat informasi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon. Analisis KRP berdampak lingkungan dengan penampalan rencana pola ruang dan struktur ruang berdampak dengan kelas jasa pengaturan iklim di WP Belakang Padang. Secara detail ditunjukkan pada Gambar III-10 dan Tabel III-25 dibawah ini.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042



Gambar III-10 Peta kelas pengaturan iklim terhadap KRP berdampak di WP Belakang Padang

Tabel III-25 Analisis KRP Berdampak terhadap Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim di WP Belakang Padang

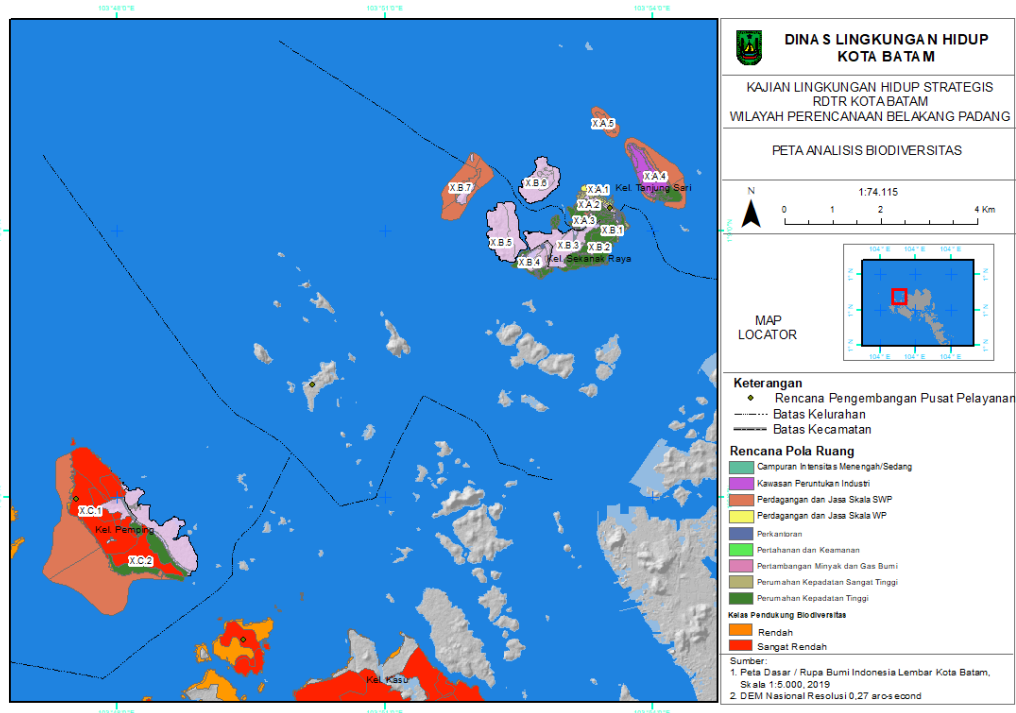
No	KRP	Adaptasi Perubahan Iklim
1	Pembangunan Kawasan PL Kecamatan di Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu	Berada pada Jasa Pengaturan iklim kelas sangat rendah di Blok X.A.1 dan di Kel. Kasu
2	Pembangunan kawasan PL di Kelurahan Pulau Mecan, Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Pemping, Kel. Pemping; Pulau Terong, Kel. Pulau Terong; Pulau Pecong, Kel. Pecong	Berada pada Jasa Pengaturan iklim kelas sangat rendah di Blok X.C.1; Kel. Pecong; Pulau Terong
3	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa depo minyak dan gas (migas) di Kelurahan Pemping	Berada pada Jasa Pengaturan Iklim kelas sangat rendah yaitu di blok X.C.1
4	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen di Kecamatan Belakang Padang	Berada pada Jasa Pengaturan Iklim kelas sangat rendah yaitu di blok X.C.1
5	Pengembangan hunian vertikal	Berada pada Jasa Pengaturan Iklim kelas sangat rendah yaitu di blok X.A.2

6	Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-1)	Berada pada Jasa Pengaturan Iklim kelas sangat rendah yaitu di blok X.B.1
7	Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-2)	Berada pada Jasa Pengaturan Iklim kelas sangat rendah yaitu di blok X.A.2; X.A.3; X.B.1; X.B.2; X.C.1; X.C.2; X.B.3
8	Pembangunan Campuran Intensitas Menengah/Sedang (Perumahan, kegiatan komersial, perkantoran, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial)	Berada pada Jasa Pengaturan Iklim kelas sangat rendah yaitu di blok X.B.1
9	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP	Berada pada Jasa Pengaturan Iklim kelas sangat rendah yaitu di blok X.A.1 dan X.A.2
10	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP	Berada dominan pada Jasa Pengaturan Iklim kelas rendah di Blok X.A.3; X.A.4; X.A.5; X.A.7; dan berada pada kawasan perairan pesisir/lautan yaitu pada blok X.C.1 dan X.C.2
11	Pembangunan Kawasan Perkantoran	Berada pada Jasa Pengaturan Iklim kelas sangat rendah di Blok X.A.2, X.B.1; X.B.2; X.C.1; X.B.3
12	Pembangunan Kawasan Pergudangan	Tidak terdapat pada data spasial
13	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Berada pada Jasa Pengaturan Iklim kelas sangat rendah yaitu di blok X.B.7

3.6.6 Tingkat Kerentanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Analisis Tingkat Kerentanan dan potensi keanekaragaman hayati menggunakan pengkelasan Jasa Pendukung Biodiversitas di WP Belakang Padang. Analisis KRP berdampak lingkungan dengan penampalan rencana pola ruang dan struktur ruang berdampak dengan kelas jasa pendukung biodiversitas di WP Belakang Padang. Secara detail ditunjukkan pada Gambar III-11 dan Tabel III-26 dibawah ini.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042



Gambar III-11 Peta kelas pengaturan iklim terhadap KRP berdampak di WP Belakang Padang

Tabel III-26 Analisis KRP Berdampak terhadap Tingkat Kerentanan dan potensi keanekaragaman hayati di WP Belakang Padang

No	KRP	Biodiversitas
1	Pembangunan Kawasan PL Kecamatan di Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu	Berada pada Jasa Pendukung Biodiversitas kelas sangat rendah yaitu di Kel. Kasu
2	Pembangunan kawasan PL di Kelurahan Pulau Mecan, Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Pemping, Kel. Pemping; Pulau Terong, Kel. Pulau Terong; Pulau Pecong, Kel. Pecong	Berada pada Jasa Pendukung Biodiversitas kelas sangat rendah yaitu di blok X.C.1
3	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa depo minyak dan gas (migas) di Kelurahan Pemping	Berada pada Jasa Pendukung Biodiversitas kelas sangat rendah yaitu di Blok X.C.1
4	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen di Kecamatan Belakang Padang	Berada pada Jasa Pendukung Biodiversitas kelas sangat rendah yaitu di Blok X.C.1
5	Pengembangan hunian vertikal	Berada di luar Jasa Pendukung Biodiversitas

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Belakang Padang
2022-2042**

6	Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-1)	Berada di luar Jasa Pendukung Biodiversitas
7	Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-2)	Berada pada Jasa Pendukung Biodiversitas kelas sangat rendah yaitu di Blok X.C.1 dan X.C.2
8	Pembangunan Campuran Intensitas Menengah/Sedang (Perumahan, kegiatan komersial, perkantoran, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial)	Berada di luar Jasa Pendukung Biodiversitas
9	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP	Berada di luar Jasa Pendukung Biodiversitas
10	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP	Berada di luar Jasa Pendukung Biodiversitas
11	Pembangunan Kawasan Perkantoran	Berada pada Jasa Pendukung Biodiversitas kelas sangat rendah yaitu di Blok X.C.1
12	Pembangunan Kawasan Pergudangan	Tidak terdapat pada data spasial
13	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Berada di luar Jasa Pendukung Biodiversitas

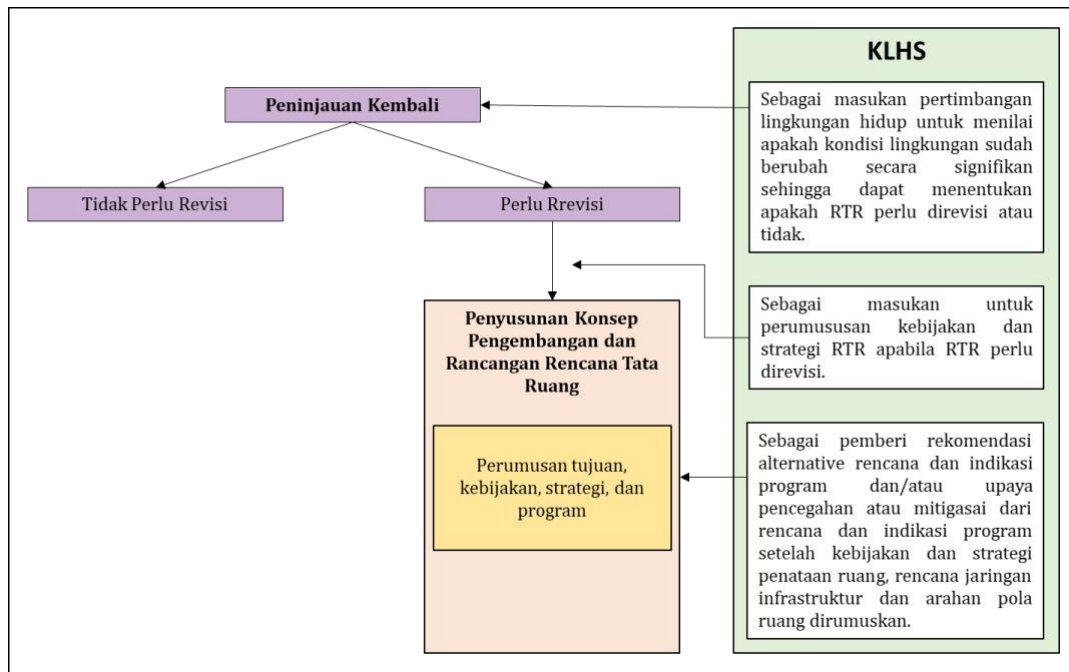
BAB V INTEGRASI

Untuk memudahkan implementasi KLHS terhadap rencana penataan ruang, terutama perlu adanya integrasi dari isu pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam rencana pembangunan. KLHS sendiri adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Sedangkan pengertian dari pembangunan berkelanjutan yaitu menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia, dengan cara:

- memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya;
- memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan
- memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar pelaksanaan KLHS merupakan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk mencapai kondisi keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup manusia, yang meliputi sekurang-kurangnya prinsip saling ketergantungan, prinsip keseimbangan, dan prinsip keadilan.

Oleh karena itu, maksud dan tujuan pengintegrasian pelaksanaan KLHS ke dalam RDTR WP Belakang Padang adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RDTR WP Belakang Padang, serta meningkatkan kualitas penyusunan RDTR WP Belakang Padang sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

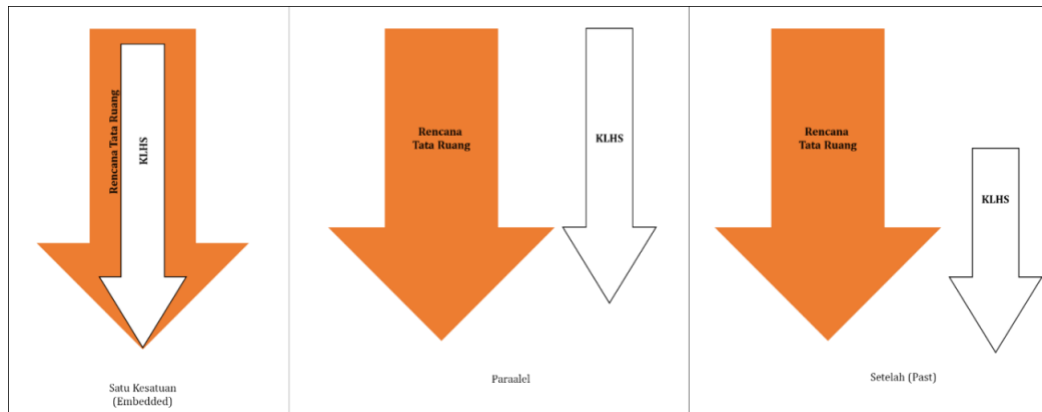


Gambar V- 1 Peran KLHS dalam Penyusunan Rencana Penataan Ruang Wilayah

Dalam dokumen RDTR WP Belakang Padang telah mengembangkan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis yang telah disesuaikan dengan dinamika-dinamika perubahan internal maupun eksternal yang terjadi selama pembangunan Kawasan Perbatasan Negara di Serasan sehingga dampak serta risiko yang besar terhadap lingkungan hidup sekitarnya dapat dicegah. Tujuan penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara di Serasan yang mengamanatkan pembangunan berkelanjutan, maka penggunaan KLHS ini sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan tujuan penataan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rancangan Rencana Tata Ruang berisi program-program pembangunan memuat tujuan, kebijakan dan strategis, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis, arahan pemanfaatan, indikasi program dan arahan pengendalian. Terdapat 3 jenis pendekatan integrasi KLHS kedalam Rencana Tata Ruang yang pertama secara paralel yang berarti penyusunan KLHS dan dokumen Rencana Tata Ruang dilaksanakan secara bersamaan, yang kedua penyusunan KLHS dilaksanakan

sebelum penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang dan yang ketiga adalah penyusunan KLHS dilaksanakan setelah penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang. Jenis pendekatan Paralel ini yang digunakan Tim Pokja untuk penyusunan KLHS yang dilakukan dengan penyusunan RDTR WP Belakang Padang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar V- 2 Pendekatan Pelaksanaan Penyusunan KLHS

Dalam pelaksanaan KLHS dimulai dengan membentuk tim penyusunan dokumen KLHS untuk RDTR WP Belakang Padang. Hasil penyelarasan digunakan oleh tim penyusun RDTR untuk menyempurnakan dokumen RDTR tersebut. Integrasi substansi muatan KLHS ke dalam muatan kebijakan, rencana dan/atau program adalah hasil langsung dari integrasi proses penyusunannya. Bentuk dari integrasi muatan KLHS ke dalam muatan KRP adalah dokumentasi tertulis masukan-masukan KLHS dalam butir-butir substansi kebijakan, rencana, dan/atau program. Oleh sebab itu, teknis pelaksanaannya ditentukan oleh ketentuan cara dan sistematika penulisan serta cara penjaminan kualitas.

Secara lengkap hasil pengintegrasian KLHS ini kedalam RDTR WP Belakang Padang.

PENINGTEGRASIAN KLHS RDTR BELAKANG PADANG

KRP Berdampak	Rekomendasi	Hasil Integrasi																	
		No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta					
2022	2023					2024	2025	2026	2027 2031	2032 2036	2037 2042	APBD Kota	APBD Provinsi		APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)			(7)							
Pembangunan Kawasan PL Kecamatan di Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu	Alternatif/rekomendasi: 1) Bangunan sebaiknya dalam susunan vertikal 2) Penerapan 3R 3) Penerapan sistem pemanenan air hujan skala mikro 4) Menambah kapasitas pengetahuan pengguna kawasan terhadap efisiensi penggunaan air bersih	Alternatif/rekomendasi: telah diakomodasi dalam indikasi program dalam rincian rencana Pembangunan Kawasan PL Kecamatan di Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu.																	
		A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																	
		A.1. Perwujudan Pusat Pelayanan																	
		A.1.1. Perwujudan PL Kecamatan																	
		1.	Pembangunan Kawasan PL Kecamatan	Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Ditjen Cipta Karya Kemen PUPR, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau									V	V	V	V		
			- Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU)													V	V	V	V
			- Penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle)													V	V	V	V
			- Penerapan sistem pemanenan air hujan skala mikro													V	V	V	V
			- Sosialisasi pengetahuan pengguna kawasan terhadap efisiensi penggunaan air bersih													V	V	V	V
		2.	Peningkatan kualitas/Revitalisasi Kawasan PL Kecamatan											V	V	V	V		
		3.	Pemantapan Kawasan PL Kecamatan											V	V	V	V		
		4.	Pemeliharaan Kawasan PL Kecamatan											V	V	V	V		
		A.1.2. Perwujudan pusat lingkungan (PL)																	
		1.	Pembangunan Kawasan PL kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> Pulau Mecan, Kel. Sekanak Raya Pulau Pemping, Kel. Pemping Pulau Terong, Kel. Pulau Terong Pulau Pecong, Kel. Pecong 	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Ditjen Cipta Karya Kemen PUPR, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau									V	V	V	V		
			- Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU)													V	V	V	V
	- Penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle)													V	V	V	V		
	- Penerapan sistem pemanenan air hujan skala mikro													V	V	V	V		
	- Sosialisasi pengetahuan pengguna kawasan terhadap efisiensi penggunaan air bersih													V	V	V	V		
A.1.2. Perwujudan pusat lingkungan (PL)																			
Alternatif/rekomendasi: telah diakomodasi dalam indikasi program dalam rincian rencana Pembangunan kawasan PL di Kelurahan Pulau Mecan, Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Pemping, Kel. Pemping; Pulau Terong, Kel. Pulau Terong; Pulau Pecong, Kel. Pecong.																			
Pembangunan kawasan PL di Kelurahan Pulau Mecan, Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Pemping, Kel. Pemping; Pulau Terong, Kel. Pulau Terong; Pulau Pecong, Kel. Pecong	Alternatif/rekomendasi: 1) Bangunan sebaiknya dalam susunan vertikal 2) Penerapan 3R 3) Penerapan sistem pemanenan air hujan skala mikro 4) Menambah kapasitas pengetahuan pengguna kawasan terhadap efisiensi penggunaan air bersih	Alternatif/rekomendasi: telah diakomodasi dalam indikasi program dalam rincian rencana Pembangunan kawasan PL di Kelurahan Pulau Mecan, Kelurahan Sekanak Raya; Pulau Pemping, Kel. Pemping; Pulau Terong, Kel. Pulau Terong; Pulau Pecong, Kel. Pecong.																	
		A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																	
		A.1. Perwujudan Pusat Pelayanan																	
		A.1.1. Perwujudan PL Kecamatan																	
		1.	Pembangunan Kawasan PL Kecamatan	Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Kasu	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Ditjen Cipta Karya Kemen PUPR, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau									V	V	V	V		
			- Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU)													V	V	V	V
			- Penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle)													V	V	V	V
			- Penerapan sistem pemanenan air hujan skala mikro													V	V	V	V
			- Sosialisasi pengetahuan pengguna kawasan terhadap efisiensi penggunaan air bersih													V	V	V	V
		2.	Peningkatan kualitas/Revitalisasi Kawasan PL Kecamatan											V	V	V	V		
		3.	Pemantapan Kawasan PL Kecamatan											V	V	V	V		
		4.	Pemeliharaan Kawasan PL Kecamatan											V	V	V	V		
		A.1.2. Perwujudan pusat lingkungan (PL)																	
		1.	Pembangunan Kawasan PL kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> Pulau Mecan, Kel. Sekanak Raya Pulau Pemping, Kel. Pemping Pulau Terong, Kel. Pulau Terong Pulau Pecong, Kel. Pecong 	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Ditjen Cipta Karya Kemen PUPR, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau									V	V	V	V		
			- Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU)													V	V	V	V
	- Penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle)													V	V	V	V		
	- Penerapan sistem pemanenan air hujan skala mikro													V	V	V	V		
	- Sosialisasi pengetahuan pengguna kawasan terhadap efisiensi penggunaan air bersih													V	V	V	V		

KRP Berdampak	Rekomendasi	Hasil Integrasi																																																																																														
Pengembangan dan Peningkatan Kualitas infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa depo minyak dan gas (migas) di Kelurahan Pemping	<p>Alternatif/rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memastikan setiap kegiatan pada kawasan pengembangan minyak dan gas telah melalui uji AMDAL Membangun instalasi pengolahan limbah, dan memastikan limbah tidak dibuang ke laut lepas Menetapkan sistem insentif/disinsentif bagi setiap ketaatan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Memastikan perusahaan melakukan kegiatan CSR yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar Melakukan pemetaan luasan dan kondisi ekosistem mangrove secara berkala Membangun bangunan penahan gelombang atau bencana pesisir lainnya disekitar pengembangan migas <p>Indikasi Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 	<p>Alternatif/rekomendasi: Poin (1) telah diakomodasi dalam Lampiran V.2.2 Ketentuan Kegiatan Terbatas dan Bersyarat pada Zona Pertambangan Minyak dan Gas, serta Kemungkinan jika Kegiatan Pertambangan Minyak dan Gas dilakukan diluar zona tersebut.</p>																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">NO</th> <th rowspan="3">KEGIATAN</th> <th colspan="2">Zona Perumahan (R)</th> <th>Zona Pertambangan (T)</th> </tr> <tr> <th>Rumah Kepadatan Sangat Tinggi</th> <th>Rumah Kepadatan Tinggi</th> <th>Pertambangan Minyak dan Gas Bumi</th> </tr> <tr> <th>R-1</th> <th>R-2</th> <th>MG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)</td> <td>Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)</td> <td>Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>B3. Persetujuan warga sekitar yang terdampak</td> <td>B3. Persetujuan warga sekitar yang terdampak</td> <td>B3. Persetujuan warga sekitar yang terdampak</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan</td> <td>T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%</td> <td>T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%</td> <td>T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)</td> <td>B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)</td> <td>B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es</td> <td>T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%</td> <td>T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%</td> <td>T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>T2. Waktu operasional maks sampai jam 16.00</td> <td>T2. Waktu operasional maks sampai jam 16.00</td> <td>T2. Waktu operasional maks sampai jam 16.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)</td> <td>B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)</td> <td>B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)</td> </tr> </tbody> </table>				NO	KEGIATAN	Zona Perumahan (R)		Zona Pertambangan (T)	Rumah Kepadatan Sangat Tinggi	Rumah Kepadatan Tinggi	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	R-1	R-2	MG			Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)			B3. Persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3. Persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3. Persetujuan warga sekitar yang terdampak	3	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan	T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%	T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%	T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%			B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	4	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es	T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%	T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%	T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%			T2. Waktu operasional maks sampai jam 16.00	T2. Waktu operasional maks sampai jam 16.00	T2. Waktu operasional maks sampai jam 16.00			B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)																																													
NO	KEGIATAN	Zona Perumahan (R)		Zona Pertambangan (T)																																																																																												
		Rumah Kepadatan Sangat Tinggi	Rumah Kepadatan Tinggi	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi																																																																																												
		R-1	R-2	MG																																																																																												
		Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)																																																																																												
		B3. Persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3. Persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3. Persetujuan warga sekitar yang terdampak																																																																																												
3	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan	T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%	T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%	T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%																																																																																												
		B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)																																																																																												
4	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es	T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%	T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%	T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 3%																																																																																												
		T2. Waktu operasional maks sampai jam 16.00	T2. Waktu operasional maks sampai jam 16.00	T2. Waktu operasional maks sampai jam 16.00																																																																																												
		B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)																																																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">NO</th> <th rowspan="3">KEGIATAN</th> <th>Zona Pengelolaan Persampahan (PP)</th> <th>Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)</th> <th>Zona Pariwisata (W)</th> </tr> <tr> <th>Pengelolaan Persampahan</th> <th>Pembangkit Tenaga Listrik</th> <th>Pariwisata</th> </tr> <tr> <th>PP</th> <th>PTL</th> <th>W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td rowspan="2">Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Angkutan Jalan Rel Lainnya</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> <tr> <td colspan="5">L.II ANGKUTAN PERAIRAN</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td rowspan="5">T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 10% (dalam satu kesatuan Kawasan)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Penumpang</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Penumpang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Barang</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">L.IV PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN</td> </tr> <tr> <td colspan="5">L.IV.1 Pergudangan Dan Penyimpanan</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Aktivitas Cold Storage</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td rowspan="2">T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 10% (dalam satu kesatuan Kawasan)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td rowspan="5">B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Aktivitas Penyimpanan B3</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Penyimpanan Yang Termasuk Dalam Naturally Occuring Radioactive Material (Norm)</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </tbody> </table>				NO	KEGIATAN	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Pengelolaan Persampahan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	PP	PTL	W	9	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	x	x	Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	10	Angkutan Jalan Rel Lainnya	x	x	L.II ANGKUTAN PERAIRAN					1	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang	x	x	T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 10% (dalam satu kesatuan Kawasan)	2	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Penumpang	x	x	3	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang			4	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang			5	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Penumpang			6	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Barang	x	x	B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	L.IV PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN					L.IV.1 Pergudangan Dan Penyimpanan					1	Aktivitas Cold Storage	x	x	T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 10% (dalam satu kesatuan Kawasan)	2	Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat	x	x	3	Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi	x	x	B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	4	Aktivitas Penyimpanan B3	x	x	5	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	x	x	6	Penyimpanan Yang Termasuk Dalam Naturally Occuring Radioactive Material (Norm)	x	x	7	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	x	x
NO	KEGIATAN	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)																																																																																												
		Pengelolaan Persampahan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata																																																																																												
		PP	PTL	W																																																																																												
9	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	x	x	Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)																																																																																												
10	Angkutan Jalan Rel Lainnya	x	x																																																																																													
L.II ANGKUTAN PERAIRAN																																																																																																
1	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang	x	x	T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 10% (dalam satu kesatuan Kawasan)																																																																																												
2	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Penumpang	x	x																																																																																													
3	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang																																																																																															
4	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang																																																																																															
5	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Penumpang																																																																																															
6	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Barang	x	x	B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)																																																																																												
L.IV PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN																																																																																																
L.IV.1 Pergudangan Dan Penyimpanan																																																																																																
1	Aktivitas Cold Storage	x	x	T1. Luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil /kavling/subzona maks 10% (dalam satu kesatuan Kawasan)																																																																																												
2	Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat	x	x																																																																																													
3	Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi	x	x	B1. Dokumen Lingkungan : Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan/atau Dokumen Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)																																																																																												
4	Aktivitas Penyimpanan B3	x	x																																																																																													
5	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	x	x																																																																																													
6	Penyimpanan Yang Termasuk Dalam Naturally Occuring Radioactive Material (Norm)	x	x																																																																																													
7	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	x	x																																																																																													
Pengembangan dan Peningkatan Kualitas jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen di Kecamatan Belakang Padang	<p>Alternatif/rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan setiap kegiatan pada kawasan pengembangan minyak dan gas telah melalui uji AMDAL Membangun instalasi pengolahan limbah, dan memastikan 																																																																																															

KRP Berdampak	Rekomendasi	Hasil Integrasi																								
	<p>limbah tidak dibuang ke laut lepas</p> <ul style="list-style-type: none"> Menetapkan sistem insentif/disinsentif bagi setiap ketaatan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Memastikan perusahaan melakukan kegiatan CSR yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar Melakukan pemetaan luasan dan kondisi ekosistem mangrove secara berkala Membangun bangunan penahan gelombang atau bencana pesisir lainnya disekitar pengembangan migas <p>Indikasi Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 	<p>Alternatif/rekomendasi: Poin (2) dan Poin (6) telah diakomodasi dalam Lampiran V.5.1 Ketentuan Kegiatan Teknis Sarana dan Prasarana Minimal pada Zona Pertambangan Minyak dan Gas.</p> <table border="1" data-bbox="691 199 2783 724"> <thead> <tr> <th>ZONA</th> <th>KODE ZONA</th> <th>SUB ZONA</th> <th>KODE SUB ZONA</th> <th>JENIS</th> <th>PARKIR</th> <th>BONGKAR MUAT</th> <th>SARANA PENUNJANG LAIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona Hutan Produksi</td> <td>KHP</td> <td>Hutan Produksi yang dapat dikonversi</td> <td>HPK</td> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> menyediakan tempat parkir penghuni, baik untuk mobil, motor dan sepeda. Standar penyediaan tempat parkir: <ul style="list-style-type: none"> 1 mobil per 5 unit hunian (SRP: 2,5 x 5,0 m) 1 motor untuk setiap unit hunian (SRP: 0,7 x 2,0 m) 1 sepeda untuk setiap 10 unit hunian (SRP: 0,6 x 1,8 m) </td> <td>Disediakan sesuai dengan kebutuhan.</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Peralatan pemadaman kebakaran Gudang peralatan Tempat sampah terpilah Toilet umum </td> </tr> <tr> <td>Zona Pertambangan</td> <td>T</td> <td>Pertambangan Minyak dan Gas Bumi</td> <td>MG</td> <td>4</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> menyediakan tempat parkir penghuni, baik untuk mobil, motor dan sepeda. Standar penyediaan tempat parkir: <ul style="list-style-type: none"> 1 mobil per 5 unit hunian (SRP: 2,5 x 5,0 m) 1 motor untuk setiap unit hunian (SRP: 0,7 x 2,0 m) 1 sepeda untuk setiap 10 unit hunian (SRP: 0,6 x 1,8 m) </td> <td>Disediakan sesuai dengan kebutuhan.</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Membangun instalasi pengolahan limbah, dan memastikan limbah tidak dibuang ke laut lepas. Membangun bangunan penahan gelombang atau bencana pesisir lainnya disekitar pengembangan migas </td> </tr> </tbody> </table> <p>Alternatif/rekomendasi: Poin (3) telah diakomodasi dalam batang tubuh Ranperkada Bagian Keenam - Ketentuan Pelaksanaan terkait pelaksanaan insentif dan disinsentif.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan Pasal 53</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif. Ketentuan pelaksanaan Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR. Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya. Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya. Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat. Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> pemberian kompensasi; urun saham; pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau d. penghargaan. Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> keringanan pajak; pemberian kompensasi; pengurangan retribusi; imbalan; sewa ruang; urun saham; penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau h. kemudahan prosedur perizinan. Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> pembatasan penyediaan prasarana; pengenaan kompensasi; atau penalti. Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> pengenaan pajak yang tinggi; pembatasan pajak yang tinggi; pengenaan kompensasi; atau penalti. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan walikota. 	ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	JENIS	PARKIR	BONGKAR MUAT	SARANA PENUNJANG LAIN	Zona Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi yang dapat dikonversi	HPK		<ul style="list-style-type: none"> menyediakan tempat parkir penghuni, baik untuk mobil, motor dan sepeda. Standar penyediaan tempat parkir: <ul style="list-style-type: none"> 1 mobil per 5 unit hunian (SRP: 2,5 x 5,0 m) 1 motor untuk setiap unit hunian (SRP: 0,7 x 2,0 m) 1 sepeda untuk setiap 10 unit hunian (SRP: 0,6 x 1,8 m) 	Disediakan sesuai dengan kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> Peralatan pemadaman kebakaran Gudang peralatan Tempat sampah terpilah Toilet umum 	Zona Pertambangan	T	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG	4	<ul style="list-style-type: none"> menyediakan tempat parkir penghuni, baik untuk mobil, motor dan sepeda. Standar penyediaan tempat parkir: <ul style="list-style-type: none"> 1 mobil per 5 unit hunian (SRP: 2,5 x 5,0 m) 1 motor untuk setiap unit hunian (SRP: 0,7 x 2,0 m) 1 sepeda untuk setiap 10 unit hunian (SRP: 0,6 x 1,8 m) 	Disediakan sesuai dengan kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> Membangun instalasi pengolahan limbah, dan memastikan limbah tidak dibuang ke laut lepas. Membangun bangunan penahan gelombang atau bencana pesisir lainnya disekitar pengembangan migas
ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	JENIS	PARKIR	BONGKAR MUAT	SARANA PENUNJANG LAIN																			
Zona Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi yang dapat dikonversi	HPK		<ul style="list-style-type: none"> menyediakan tempat parkir penghuni, baik untuk mobil, motor dan sepeda. Standar penyediaan tempat parkir: <ul style="list-style-type: none"> 1 mobil per 5 unit hunian (SRP: 2,5 x 5,0 m) 1 motor untuk setiap unit hunian (SRP: 0,7 x 2,0 m) 1 sepeda untuk setiap 10 unit hunian (SRP: 0,6 x 1,8 m) 	Disediakan sesuai dengan kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> Peralatan pemadaman kebakaran Gudang peralatan Tempat sampah terpilah Toilet umum 																			
Zona Pertambangan	T	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG	4	<ul style="list-style-type: none"> menyediakan tempat parkir penghuni, baik untuk mobil, motor dan sepeda. Standar penyediaan tempat parkir: <ul style="list-style-type: none"> 1 mobil per 5 unit hunian (SRP: 2,5 x 5,0 m) 1 motor untuk setiap unit hunian (SRP: 0,7 x 2,0 m) 1 sepeda untuk setiap 10 unit hunian (SRP: 0,6 x 1,8 m) 	Disediakan sesuai dengan kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> Membangun instalasi pengolahan limbah, dan memastikan limbah tidak dibuang ke laut lepas. Membangun bangunan penahan gelombang atau bencana pesisir lainnya disekitar pengembangan migas 																			

KRP Berdampak	Rekomendasi	Hasil Integrasi																
		No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta				
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2032	2037		2042	APBD Kota	APBD Provinsi	APBN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)			(7)				
				• Batam (Sekupang) - Singapore (Harbourfront) • Batam (Sekupang) - Malaysia														
		A.3. Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Ketenagalistrikan																
		A.3.1 Rencana Pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi																
		1. Sarana Penyimpanan Bahan Bakar																
		- Pengembangan dan Peningkatan Kualitas infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa depo minyak dan gas (migas)																
		- Pemeliharaan fungsi dan kualitas pelayanan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa depo minyak dan gas (migas)																
		Kelurahan Pemping																
		Kementerian ESDM, PT PGN Kota Batam																
																		V
																		V
		2. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen																
		- Pengembangan dan Peningkatan Kualitas jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen																
		- Pemeliharaan fungsi dan kualitas pelayanan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen																
		Kecamatan Belakang Padang																
		Kementerian ESDM, PT PGN Kota Batam																
																		V
																		V
		3. Pelaksanaan CSR yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar oleh Perusahaan																
																		V

Penambahan program: **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional** dalam indikasi program **tidak diakomodasi** karena berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kebutuhan pengelolaan limbah dan analisis karakteristik wilayah (merupakan hinterland kota Batam), memberikan kesimpulan bahwa tidak dibutuhkan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**.

Pengembangan hunian vertikal

Alternatif/rekomendasi:

- Membatasi koefisien dasar bangunan
- Menyediakan RTH dengan kerapatan sedang-tinggi di kompleks hunian vertikal
- Memastikan terbangunnya jaringan perpipaan air bersih
- Menyediakan sistem persampahan 3R
- Menyediakan saluran drainase yang baik
- Meningkatkan kesiapsiagaan penduduk penguni

Indikasi Program:

- Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota
- Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam

Alternatif/rekomendasi: **Poin (1)** telah diakomodasi dalam Lampiran V.2 Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi terkait pembangunan hunian vertikal.

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	KTB Maksimum	Luas kav. Minimum (m2)	Keterangan
						Fungsi	Fungsi Jalan				
						Lokal/Lingkungan	Lokal/Lingkungan				
ZONA LINDUNG											
1	Badan Air	BA	Badan Air	BA		-	-	-	-	-	Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis bidang sumber daya air
2	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS		-	-	-	-	-	Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis bidang kehutanan
3	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1		20%	0.05	80%	Tidak diizinkan memiliki basemen	-	
			Taman Kecamatan	RTH-3		20%	0.3	80%		-	
			Taman Kelurahan	RTH-4		15%	0.3	85%		-	
			Taman RW	RTH-5		15%	0.3	85%		-	
			Pemukaman	RTH-7		15%	0.2	85%		-	
	Jalur Hijau	RTH-8			10%	1	85%	-			
ZONA BUDIDAYA											
1	Badan Jalan	BJ	Badan jalan	BJ		-	-	-	-	-	
2	Zona Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Tetap	HP		-	-	-	-	-	Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis bidang kehutanan
			Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK		-	-	-	-	-	Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis bidang kehutanan
3	Zona Pertambangan	T	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG		-	-	20%	50%	-	
			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	Vertikal >5 lantai	80	1	20%	60%	1.000	

KRP Berdampak	Rekomendasi	Hasil Integrasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Jalur pejalan kaki	Jalur sepeda	RTH	RTNH	Utilitas perkotaan	Jalan Akses	T. sampah	Sal. air limbah	Tangki septik individual	Sarana Parkir	Taman Bermain Anak	Ruang Nursery																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Pengelolaan Persampahan	Alternatif/rekomendasi: Poin (2) hingga poin (5) telah diakomodasi dalam Lampiran V.4 Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal pada Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dan Lampiran IV Tabel Indikasi Program terkait pembangunan hunian vertikal.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		ZONA LINDUNG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		1	Badan Air	BA	Badan Air	BA		-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		2	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS		V	V	-	-	V	V	-	-	-	V	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		3	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1		V	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Taman Kecamatan	RTH-3		V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	-	V	V	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Taman Kelurahan	RTH-4		V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	-	V	V	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Taman RW	RTH-5		V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	V	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Pemakaman	RTH-7		V	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	V	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		ZONA BUDIDAYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		1	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ		V	V	-	-	V	V	-	V	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		2	Zona Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Tetap	HP		V	-	V	V	V	V	V	-	V	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK		V	-	V	V	V	V	V	V	-	V	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		3	Zona Pertambangan	T	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG		V	-	V	V	V	V	V	-	V	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		4	Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	Vertikal >5 lantai	V	V	V	V	V	V	V	-	V	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						R-2	Vertikal >4 lantai	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Rumah Tapak Besar	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Rumah Tapak Kecil	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Program Utama</th> <th rowspan="2">Lokasi</th> <th rowspan="2">Instansi Pelaksana</th> <th colspan="9">Waktu Pelaksanaan</th> <th colspan="3">Sumber Dana Pemerintah</th> <th rowspan="2">Sumber Dana Swasta</th> </tr> <tr> <th colspan="5">2022-2026</th> <th colspan="4">2027-2037</th> <th>APBD Kota</th> <th>APBD Provinsi</th> <th>APBN</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2032</th> <th>2037</th> <th>2031</th> <th>2036</th> <th>2042</th> <th>(6)</th> <th>(7)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>dalam pemanfaatan kawasan pesisir sebagai daya tarik wisata</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Peningkatan even rutin untuk mendukung kegiatan pariwisata yang mendorong perekonomian lokal dan menangkap tren wisata bahari dan melayu di Pulau Belakang Padang</td> <td></td> <td>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- pengembangan kawasan tematik perkotaan yang berfungsi sebagai objek wisata buatan yang mendukung ekonomi kota</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- pengembangan objek, daya tarik, dan usaha-usaha terkait bidang wisata yang dikembangkan untuk memberi manfaat bagi ekonomi lokal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pemasaran wisata dalam konsep tourism, trade dan investmen (TTI)</td> <td>• Pulau Belakang Padang dan Sekitarnya</td> <td>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>B.2.5</td> <td>Rencana Pengembangan Zona Perumahan (R)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.2.5.1</td> <td>Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)</td> <td>• SWP A blok 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pemutakhiran profil kawasan permukiman kumuh</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pengembangan hunian vertikal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pengelolaan persampahan melalui sistem persampahan 3R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Peningkatan kesiapsiagaan penduduk penguni dalam kondisi darurat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman</td> <td></td> <td>Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Penyiapan lahan untuk permukiman baru</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta	2022-2026					2027-2037				APBD Kota	APBD Provinsi	APBN	(1)	(2)	(3)	(4)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2032	2037	2031	2036	2042	(6)	(7)		dalam pemanfaatan kawasan pesisir sebagai daya tarik wisata																3.	Peningkatan even rutin untuk mendukung kegiatan pariwisata yang mendorong perekonomian lokal dan menangkap tren wisata bahari dan melayu di Pulau Belakang Padang		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam												V	V	V	V		- pengembangan kawasan tematik perkotaan yang berfungsi sebagai objek wisata buatan yang mendukung ekonomi kota														V	V	V	V		- pengembangan objek, daya tarik, dan usaha-usaha terkait bidang wisata yang dikembangkan untuk memberi manfaat bagi ekonomi lokal														V	V	V	V	4.	Pemasaran wisata dalam konsep tourism, trade dan investmen (TTI)	• Pulau Belakang Padang dan Sekitarnya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam												V	V	V	V	B.2.5	Rencana Pengembangan Zona Perumahan (R)																		B.2.5.1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)	• SWP A blok 2																	1.	Pemutakhiran profil kawasan permukiman kumuh														V				2.	Pengembangan hunian vertikal														V	V	V			- Pengelolaan persampahan melalui sistem persampahan 3R																			- Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota																			- Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																			- Peningkatan kesiapsiagaan penduduk penguni dalam kondisi darurat																		3.	Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman		Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam												V				4.	Penyiapan lahan untuk permukiman baru														V			
No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				2022-2026					2027-2037				APBD Kota	APBD Provinsi	APBN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(1)	(2)	(3)	(4)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2032	2037	2031	2036	2042	(6)	(7)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	dalam pemanfaatan kawasan pesisir sebagai daya tarik wisata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.	Peningkatan even rutin untuk mendukung kegiatan pariwisata yang mendorong perekonomian lokal dan menangkap tren wisata bahari dan melayu di Pulau Belakang Padang		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam												V	V	V	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	- pengembangan kawasan tematik perkotaan yang berfungsi sebagai objek wisata buatan yang mendukung ekonomi kota														V	V	V	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	- pengembangan objek, daya tarik, dan usaha-usaha terkait bidang wisata yang dikembangkan untuk memberi manfaat bagi ekonomi lokal														V	V	V	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4.	Pemasaran wisata dalam konsep tourism, trade dan investmen (TTI)	• Pulau Belakang Padang dan Sekitarnya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam												V	V	V	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
B.2.5	Rencana Pengembangan Zona Perumahan (R)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
B.2.5.1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)	• SWP A blok 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.	Pemutakhiran profil kawasan permukiman kumuh														V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2.	Pengembangan hunian vertikal														V	V	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	- Pengelolaan persampahan melalui sistem persampahan 3R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	- Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	- Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	- Peningkatan kesiapsiagaan penduduk penguni dalam kondisi darurat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.	Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman		Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam												V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4.	Penyiapan lahan untuk permukiman baru														V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Rekomendasi penambahan program Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota serta Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dalam indikasi program telah diakomodasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

KRP Berdampak	Rekomendasi	Hasil Integrasi															
		No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2032	2037	APBD Kota		APBD Provinsi	APBN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						(6)			(7)		
		3.	dalam pemanfaatan kawasan pesisir sebagai daya tarik wisata Peningkatan even rutin untuk mendukung kegiatan pariwisata yang mendorong perekonomian lokal dan menangkap tren wisata bahari dan melayu di Pulau Belakang Padang - pengembangan kawasan tematik perkotaan yang berfungsi sebagai objek wisata buatan yang mendukung ekonomi kota - pengembangan objek, daya tarik, dan usaha-usaha terkait bidang wisata yang dikembangkan untuk memberi manfaat bagi ekonomi lokal		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapeltbangda Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam									V	V	V	V
		4.	Pemasaran wisata dalam konsep tourism, trade dan investmen (TTI)	• Pulau Belakang Padang dan Sekitarnya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam									V	V	V	V
		B.2.5	Rencana Pengembangan Zona Perumahan (R)	*													
		B.2.5.1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)	• SWP A blok 2													
		1.	Permutakhiran profil kawasan permukiman kumuh		Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam									V			
		2.	Pengembangan hunian vertikal - Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota - Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan											V	V	V	
		3.	Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman											V			
		4.	Penyiapan lahan untuk permukiman baru											V			
		5.	Sosialisasi hunian sehat											V			
		6.	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman											V			

Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-1) Alternatif/rekomendasi: 1) Menyediakan RTH dengan kerapatan sedang-tinggi di kompleks hunian vertikal 2) Penyediaan sistem jaringan drainase yang terintegrasi 3) Meningkatkan kesiapsiagaan penduduk penguni
Indikasi Program: 1) Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota

Alternatif/rekomendasi: **Poin (1) hingga poin (2) telah diakomodasi** dalam Lampiran V.4 Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal pada Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1) dan Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) dan **Poin (3) dalam** Lampiran IV Tabel Indikasi Program terkait pembangunan hunian vertikal.

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Jalur pejalan kaki	Jalur sepeda	RTH	RTNH	Utilitas perkotaan	Prasarana Lingkungan						
											Jalan Akses	T. sampah	Sal. air limbah	Tangki septik individual	Sarana Parkir	Taman Bermain Anak	Ruang Nursery
ZONA LINDUNG																	
1	Badan Air	BA	Badan Air	BA		-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-
2	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS		V	V	-	-	V	V	-	-	-	V	-	-
3	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1		V	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-
			Taman Kecamatan	RTH-3		V	V	-	-	-	V	-	-	-	V	V	-
			Taman Kelurahan	RTH-4		V	V	-	-	-	V	-	-	-	V	V	-
			Taman RW	RTH-5		V	V	-	-	-	V	-	-	-	-	V	-
			Pemukaman	RTH-7		V	-	-	-	-	V	-	-	-	V	-	
ZONA BUDIDAYA																	
1	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ		V	V	-	-	V	V	-	V	-	-	-	-
2	Zona Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Tetap	HP		V	-	V	V	V	V	V	V	-	V	-	-
			Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK		V	-	V	V	V	V	V	V	V	-	V	-
3	Zona Pertambangan	T	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG		V	-	V	V	V	V	V	V	-	V	-	
4	Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	Vertikal >5 lantai	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	-	-
				R-2	Vertikal >4 lantai	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	-	
					Rumah Tapak Besar	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	-
			Rumah Tapak Kecil	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	-	

Penyiapan lahan untuk permukiman baru (R-2) Alternatif/rekomendasi: 1) Menyediakan RTH dengan kerapatan sedang-tinggi di kompleks hunian vertikal 2) Penyediaan sistem jaringan drainase yang terintegrasi

KRP Berdampak	Rekomendasi	Hasil Integrasi															
		No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta	
						2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042	APBD Kota	APBD Provinsi		APBN
	3) Meningkatkan kesiapsiagaan penduduk penguni	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							(6)			(7)	
	Indikasi Program: 1) Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	2.	Pengembangan hunian vertikal - Pengelolaan persampahan melalui sistem persampahan 3R		Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam									V	V	V	
		3.	Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman											V			
		4.	Penyiapan lahan untuk permukiman baru											V			
		5.	Sosialisasi hunian sehat											V			
		6.	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman											V			
		7.	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota											V	V		
		8.	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan											V			
		9.	Peningkatan kesiapsiagaan penduduk penguni dalam kondisi darurat											V			
		B.2.5.2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)														
		1.	Penataan Kawasan Permukiman		SWP A blok 2, blok 3, dan blok 4;									V			
		2.	Penyediaan Dukungan PSU Kawasan Permukiman		SWP B blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4; dan SWP C blok 1 dan blok 2.									V		V	
		3.	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan BSPS											V			
		4.	Penyiapan lahan untuk permukiman baru											V			
		5.	Sosialisasi hunian sehat											V			
		6.	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman											V			
		7.	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota											V	V		
		8.	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan											V			
		9.	Peningkatan kesiapsiagaan penduduk penguni dalam kondisi darurat											V			
		B.2.6	Rencana Pengembangan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)														
		B.2.6.1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)														

Pembangunan Campuran Intensitas Menengah/Sedang (Perumahan, kegiatan komersial, perkantoran, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial)	Alternatif/rekomendasi: 1) Menyediakan RTH dengan kerapatan sedang-tinggi di kompleks hunian vertikal 2) Penyediaan sistem jaringan drainase yang terintegrasi 3) Meningkatkan kesiapsiagaan penduduk penguni terhadap bencana 4) Menerapkan sistem persampahan 3R 5) Melakukan pembangunan yang terintegrasi antar proyek pembangunan 6) Menggunakan teknologi pembangunan hijau	Alternatif/rekomendasi: Poin (1) telah diakomodasi dalam Lampiran V.4 Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal pada Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (Perumahan, kegiatan komersial, perkantoran, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial).																	
		No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Jalur pejalan kaki	Jalur sepeda	RTH	RTNH	Utilitas perkotaan	Prasarana Lingkungan						
		Jalan Akses	T. sampah	Sal. air limbah	Tangki septik individual	Sarana Parkir	Taman Bermain Anak	Ruang Nursery											
		8	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI		V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	-	V
		9	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH		V	V	V	-	-	-	V	V	V	V	-	-
		10	Zona Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP		V	-	V	V	V	-	V	V	V	V	-	-
		11	Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W		V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	-	V
		12	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	TNI AD	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	-
							TNI AL	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	-	
							Kepolisian	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	-	
		13	Zona Transportasi	TR	Transportasi	TR	Bandara	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V
							Pelabuhan	V	-	V	V	V	V	V	V	V	-	V	
							Terminal	V	-	-	-	V	V	V	V	V	-	V	
		14	Zona Penggunaan Lain	PL	Pergudangan	PL-6		V	-	V	V	V	V	V	V	-	V	-	-
		15	Zona Campuran	C	Campuran Intensitas Sedang	C-2		V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	-	V

KRP Berdampak	Rekomendasi	Hasil Integrasi																																																																																																																																																																																																											
		No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta																																																																																																																																																																																															
						2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		APBD Kota	APBD Provinsi	APBN																																																																																																																																																																																												
	<p>di kawasan perkantoran</p> <p>Indikasi Program:</p> <p>1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana</p> <p>2) Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p>	<p>Alternatif/rekomendasi: Poin (2) hingga poin (6) telah diakomodasi dalam Lampiran IV Tabel Indikasi Program terkait Pembangunan Campuran Intensitas Menengah/Sedang (Perumahan, kegiatan komersial, perkantoran, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial). Dan penambahan program sesuai dengan rekomendasi.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th colspan="5">(5)</th> <th colspan="3">(6)</th> <th>(7)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B.2.8.1</td> <td>Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pembangunan Campuran Intensitas Menengah/Sedang (Perumahan, kegiatan komersial, perkantoran, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pembangunan saluran drainase yang terintegrasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Peningkatan kesiapsiagaan penduduk penguni dalam kondisi darurat/bencana</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pengelolaan persampahan melalui sistem persampahan 3R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Perencanaan pembangunan yang terintegrasi antar proyek pembangunan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pemanfaatan teknologi pembangunan hijau di kawasan perkantoran</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penataan dan peningkatan kualitas Campuran Intensitas Menengah/Sedang</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Perencanaan Kawasan Berorientasi Transit (terintegrasi dengan fasilitas intermoda)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pemeliharaan Campuran Intensitas Menengah/Sedang</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)			(7)	B.2.8.1	Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)													1.	Pembangunan Campuran Intensitas Menengah/Sedang (Perumahan, kegiatan komersial, perkantoran, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial)											V	V	V	V		- Pembangunan saluran drainase yang terintegrasi											V	V	V	V		- Peningkatan kesiapsiagaan penduduk penguni dalam kondisi darurat/bencana											V	V	V	V		- Pengelolaan persampahan melalui sistem persampahan 3R											V	V	V	V		- Perencanaan pembangunan yang terintegrasi antar proyek pembangunan											V	V	V	V		- Pemanfaatan teknologi pembangunan hijau di kawasan perkantoran											V	V	V	V	2.	Penataan dan peningkatan kualitas Campuran Intensitas Menengah/Sedang											V	V	V	V	3.	Perencanaan Kawasan Berorientasi Transit (terintegrasi dengan fasilitas intermoda)											V	V	V	V	4.	Pemeliharaan Campuran Intensitas Menengah/Sedang											V	V	V	V	5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana															6.	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)			(7)																																																																																																																																																																																																	
B.2.8.1	Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)																																																																																																																																																																																																												
1.	Pembangunan Campuran Intensitas Menengah/Sedang (Perumahan, kegiatan komersial, perkantoran, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial)											V	V	V	V																																																																																																																																																																																														
	- Pembangunan saluran drainase yang terintegrasi											V	V	V	V																																																																																																																																																																																														
	- Peningkatan kesiapsiagaan penduduk penguni dalam kondisi darurat/bencana											V	V	V	V																																																																																																																																																																																														
	- Pengelolaan persampahan melalui sistem persampahan 3R											V	V	V	V																																																																																																																																																																																														
	- Perencanaan pembangunan yang terintegrasi antar proyek pembangunan											V	V	V	V																																																																																																																																																																																														
	- Pemanfaatan teknologi pembangunan hijau di kawasan perkantoran											V	V	V	V																																																																																																																																																																																														
2.	Penataan dan peningkatan kualitas Campuran Intensitas Menengah/Sedang											V	V	V	V																																																																																																																																																																																														
3.	Perencanaan Kawasan Berorientasi Transit (terintegrasi dengan fasilitas intermoda)											V	V	V	V																																																																																																																																																																																														
4.	Pemeliharaan Campuran Intensitas Menengah/Sedang											V	V	V	V																																																																																																																																																																																														
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana																																																																																																																																																																																																												
6.	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																																																																																																																																																																																																												
Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP	<p>Alternatif/rekomendasi:</p> <p>1) Mengembangkan IPAL komunal di kawasan perdagangan</p> <p>2) Menciptakan sistem persampahan yang terintegrasi</p> <p>3) Optimalisasi ruang terbuka hijau di kawasan perdagangan</p> <p>4) Memastikan limbah mengalami pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan/badan air</p> <p>5) Membangun saluran drainase yang terintegrasi</p>	<p>Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP dihilangkan, sehingga berimplikasi pada program-program terkait rencana pengembangan Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP yang juga dihilangkan</p>																																																																																																																																																																																																											

KRP Berdampak	Rekomendasi	Hasil Integrasi																
	6) Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP tidak disarankan di wilayah ini.																	
Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP	Alternatif/rekomendasi: 1) Mengembangkan IPAL komunal di kawasan perdagangan 2) Menciptakan sistem persampahan yang terintegrasi 3) Optimalisasi ruang terbuka hijau di kawasan perdagangan 4) Memastikan limbah mengalami pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan/badan air 5) Membangun saluran drainase yang terintegrasi	Alternatif/rekomendasi: Poin (1) hingga poin (4) telah diakomodasi dalam Lampiran V.4 Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal pada Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dan Lampiran IV Tabel Indikasi Program terkait pembangunan hunian vertikal.																
		No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Jalur pejalan kaki	Jalur sepeda	RTH	RTNH	Utilitas perkotaan	Prasarana Lingkungan					Ruang Nursery
		ZONA LINDUNG																
1	Badan Air	BA	Badan Air	BA			-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	
2	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS			V	V	-	-	V	V	-	-	-	V	-	-
3	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1			V	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-
			Taman Kecamatan	RTH-3			V	V	-	-	-	V	-	-	-	V	V	-
			Taman Kelurahan	RTH-4			V	V	-	-	-	V	-	-	-	V	V	-
			Taman RW	RTH-5			V	V	-	-	-	V	-	-	-	-	V	-
			Pemakaman	RTH-7			V	-	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-
		ZONA BUDIDAYA																
1	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ			V	V	-	-	V	V	-	V	-	-	-	-
2	Zona Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Tetap	HP			V	-	V	V	V	V	V	V	-	V	-	-
			Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK			V	-	V	V	V	V	V	V	V	-	V	-
3	Zona Pertambangan	T	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG			V	-	V	V	V	V	V	V	-	V	-	-
4	Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	Vertikal >5 lantai		V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	-	-
					Vertikal >4 lantai		V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	-	-
			Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	Rumah Tapak Besar		V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	-
			Rumah Tapak Kecil			V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	-	-
5	Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan Jasa skala Lingkungan	K-3	Bangunan tunggal		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V
					Bangunan deret		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V

KRP Berdampak	Rekomendasi	Hasil Integrasi															
		No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta			
						2022-2026					2027	2032	2037		APBD Kota	APBD Provinsi	APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	2022	2023	2024	2025	2026	2031	2036	2042	(6)			(7)		
		dalam Pengelolaan Persampahan															
		B.2.9 Rencana Pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa															
		B.2.9.2 Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP (K-3)															
		1. Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, dan blok 5; SWP B blok 7; dan SWP C blok 1, dan blok 2. 	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam								V					
		- Pengembangan IPAL komunal di kawasan perdagangan dan Jasa skala Sub WP															
		- Pembangunan saluran drainase yang terintegrasi															
		2. Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP												V			
		3. Pembenahan sistem perpajakan dan lokasi PKL												V			
		4. Penyediaan fasilitas pendukung												V			
		5. Upaya perlindungan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP dari keberadaan PKL Liar										V					
		6. Pemeliharaan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP										V					
Pembangunan Kawasan Perkantoran	Alternatif/rekomendasi: 1) Mengembangkan mekanisme perpipaan air bersih pada kawasan perkantoran 2) Menciptakan sistem persampahan/penerapan 3R 3) Optimalisasi ruang terbuka hijau di kawasan perkantoran 4) Membangun saluran drainase yang terintegrasi 5) Menggunakan konsep pembangunan hijau 6) Menerapkan sistem insentif/disinsentif bagi pengguna yang melakukan tindakan peduli lingkungan	Alternatif/rekomendasi: Poin (1) hingga poin (6) telah diakomodasi dalam Lampiran IV Tabel Indikasi Program terkait Rincian rencana dalam Pembangunan Kawasan Perkantoran.															
		2. Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP										V					
		3. Pembenahan sistem perpajakan dan lokasi PKL										V					
		4. Penyediaan fasilitas pendukung										V					
		5. Upaya perlindungan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP dari keberadaan PKL Liar										V					
		6. Pemeliharaan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Sub WP										V					
		B.2.10 Rencana Pengembangan Zona Perkantoran (KT)															
		1. Pembangunan Kawasan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok 2; SWP B blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4; dan SWP C blok 1. 	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam								V					
		- Pengembangan mekanisme perpipaan air bersih pada kawasan perkantoran															
		- Pengelolaan persampahan melalui sistem persampahan 3R															
		- Optimalisasi ruang terbuka hijau di kawasan perkantoran															
		- Pembangunan saluran drainase yang terintegrasi															
		- Pengaplikasian konsep pembangunan hijau															
		2. Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Perkantoran										V					
		3. Penyediaan fasilitas pendukung										V					
		4. Upaya perlindungan Kawasan Perkantoran dari keberadaan PKL Liar										V					
		5. Pemeliharaan Kawasan Perkantoran										V					
		6. Pemberian sanksi bagi pengguna yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan															
Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Alternatif/rekomendasi: 1) Memperhatikan koefisien bangunan	Alternatif/rekomendasi: Poin (1) dan poin (2) telah diakomodasi dalam Lampiran IV Tabel Indikasi Program terkait Rincian rencana dalam Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.															

KRP Berdampak	Rekomendasi	Hasil Integrasi											
		No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	KTB Maksimum	Luas kav. Minimum (m2)	Keterangan
								Fungsi Jalan	Fungsi Jalan				
	2) Membangun saluran drainase yang terintegrasi dengan badan air 3) Menambah kapasitas pengetahuan pengguna dalam menghadapi dampak perubahan iklim												
						Bangunan Tunggal Vertikal ≥4 lantai dan Bangunan deret bukan pada jalan utama yang merupakan bagian dari kawasan	60%	8	10%	60%	Bangunan tunggal 3.000 Bangunan deret 40	· Merupakan satu kesatuan dalam 1 kawasan · Proporsi bangunan deret maksimal 30% dari KDB	
			Perdagangan Jasa Skala SWP	K-3	Bangunan tunggal/deret	70%	3,5	10%	70%	40			
6	Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT		70%	2,8	10%	50%	40			
7	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-2		60%	6	10%	60%	-			
		SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-3		60%	2,4	10%	60%	-			
		SPU-4	SPU Skala RW	SPU-4		60%	2,4	10%	60%	-			
8	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI		-	-	10%	50%	-			
9	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH		20%	0,4	10%	60%	-			
10	Zona Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP		5%	0,25	10%	50%	-	KDB diberlakukan untuk sarana penunjang operasional		
11	Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	Wisata alam	30%	1,2	10%	30%	-			
					Wisata buatan	60%	18	10%	30%	-			
12	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	Skala provinsi	60%	6	10%	60%	-			
					Skala kota	60%	6	10%	60%	-			
					Skala kecamatan	70%	4,2	10%	70%	-			
					Skala kelurahan	70%	4,2	10%	70%	-			

Alternatif/rekomendasi: **Poin (2) hingga poin (3)** telah diakomodasi dalam Lampiran IV Tabel Indikasi Program terkait Rincian rencana dalam Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

KRP Berdampak	Rekomendasi	Hasil Integrasi															
		No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta		
						2022	2023	2022-2026		2027	2032	2037	APBD Kota	APBD Provinsi		APBN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						(6)			(7)				
		2.	Penataan kawasan Pergudangan		Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam									V			
		3.	Penyediaan fasilitas pendukung Pergudangan		Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam									V			
		4.	Pemeliharaan Kawasan Pergudangan		Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam									V			
		B.2.12	Rencana Pengembangan Zona Pengelolaan Persampahan (PP)		Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam									V			
		1.	Pembangunan Kawasan Pengelolaan Persampahan	▪ SWP A blok 3	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam									V			
		2.	Penataan kawasan Pengelolaan Persampahan	▪ SWP A blok 3	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam									V			
		3.	Penyediaan fasilitas pendukung Pengelolaan Persampahan	▪ SWP A blok 3	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam									V			
		4.	Pemeliharaan Kawasan Pengelolaan Persampahan	▪ SWP A blok 3	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam									V			
		B.2.13	Rencana Pengembangan Zona Transportasi (TR)		Dinas Perhubungan Kota Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam									V	V	V	V
		1.	Pembangunan Kawasan Transportasi	▪ SWP A blok 1; dan ▪ SWP C blok 1.	Dinas Perhubungan Kota Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam									V			V
		2.	Penataan kawasan Transportasi	▪ SWP A blok 1; dan ▪ SWP C blok 1.	Dinas Perhubungan Kota Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam									V			V
		3.	Penyediaan fasilitas pendukung Kawasan Transportasi	▪ SWP A blok 1; dan ▪ SWP C blok 1.	Dinas Perhubungan Kota Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam									V			V
		4.	Pemeliharaan Kawasan Transportasi	▪ SWP A blok 1; dan ▪ SWP C blok 1.	Dinas Perhubungan Kota Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam									V			V
		B.2.14	Rencana Pengembangan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)		Kodim 0316/ Batam, Polresta Barelang									V			
		1.	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	▪ SWP B blok 7;	Kodim 0316/ Batam, Polresta Barelang									V			
			- Pembangunan saluran drainase yang terintegrasi	▪ SWP B blok 7;	Kodim 0316/ Batam, Polresta Barelang									V			
		2.	Penataan kawasan Pertahanan dan Keamanan	▪ SWP B blok 7;	Kodim 0316/ Batam, Polresta Barelang									V			
		3.	Penyediaan fasilitas pendukung Pertahanan dan Keamanan	▪ SWP B blok 7;	Kodim 0316/ Batam, Polresta Barelang									V			
		4.	Pemeliharaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	▪ SWP B blok 7;	Kodim 0316/ Batam, Polresta Barelang									V			
		5.	Peningkatan kapasitas pengetahuan pengguna dalam menghadapi dampak perubahan iklim	▪ SWP B blok 7;	Kodim 0316/ Batam, Polresta Barelang									V			

DAFTAR PUSTAKA

- Bartesaghi, C., Osmond, P., & Peters, A. (2018). Evaluating the cooling effects of green infrastructure : A systematic review of methods , indicators and data sources. *Solar Energy*, 166(February), 486-508. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2018.03.008>
- Burgman, M. 2005. Risks and decisions for conservation and environmental management. Cambridge University Press, Cambridge, UK
- Bush, D.M.; Neal, W.J.; Young, R.S., and Pilkey, O.H. (1999). Utilization of geoindicators for rapid assessment of coastal-hazard risk and mitigation. *Oc. and Coast. Manag.*, 42.
- Crain, C. M., Kroeker, K., & Halpern, B. S. 2008. Interactive and cumulative effects of multiple human stressors in marine systems. *Ecology Letters*, 11: 1304-1315
- Dawson, T. P., Jackson, S. T., House, J. I., Prentice, I. C., & Mace, G. M. 2011. Beyond Predictions: Biodiversity Conservation in a Changing Climate. *Science*, 332: 53-58
- Deilami, K., Kamruzzaman, M., & Liu, Y. (2018). Urban heat island effect: A systematic review of spatio-temporal factors, data, methods, and mitigation measures. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 67, 30-42. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jag.2017.12.009>
- Duggan, J. M., Eichelberger, B. A., Ma, S., Lawler, J. J., & Ziv, G. (2015). Informing management of rare species with an approach combining scenario modeling and spatially explicit risk assessment. *Ecosystem Health and Sustainability*, 1(6), 1-18. <https://doi.org/10.1890/EHS14-0009.1>
- Kunapo, J., Fletcher, T. D., Ladson, A. R., Cunningham, L., & Burns, M. J. (2018). A spatially explicit framework for climate adaptation. *Urban Water Journal*, 15(2), 159-166. <https://doi.org/10.1080/1573062X.2018.1424216>
- Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- Peraturan Daerah Kota Batam No. 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kota Batam No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041
- Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun
- Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang
- Phelan, P. E., Kaloush, K., Miner, M., Golden, J., Phelan, B., Iii, H. S., & Taylor, R. A. (2015). Urban Heat Island: Mechanisms , Implications , and Possible Remedies. *Annual Review of Environment and Resources*, 285-309. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102014-021155>
- Tolman, H.L. (2009). User manual and system documentation of WAVEWATCH III version 3.14, Technical Note, U. S. Department of Commerce Nat. Oceanic and Atmosph. Admin., Nat. Weather Service, Nat. Centers for Environmental Pred., Camp Springs, MD
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- World Resources Institute (WRI) (2009). "Value of Coral Reefs & Mangroves in the Caribbean, Economic Valuation Methodology V3.0"
- Zardo, L., Geneletti, D., Prez-soba, M., & Eupen, M. Van. (2017). Estimating the cooling capacity of green infrastructures to support urban planning. *Ecosystem Services*, 26, 225-235. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.06.016>